

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA TERNATE
TAHUN ANGGARAN 2020
BAB I PENDAHULUAN

I.1. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Ternate menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Ternate Tahun Anggaran 2020 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

Laporan keuangan yang disusun ini meliputi: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya Lampiran I SAP basis akrual.

Pada dasarnya LKPD Kota Ternate Tahun Anggaran 2020 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi dari *stakeholders* (antara lain masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ternate selama Tahun anggaran 2019 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai pendapatan LRA, Pendapatan LO, Belanja, Beban, Transfer, Pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas dan Arus Kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Ternate serta hasil-hasil yangdicapai;
4. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ternate dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhankas;
5. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kota Ternate berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;dan
6. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Kota Ternate sebagai akibat pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2020.

I.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan keuangan

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4368);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah,
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan,
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 18);
14. Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 42);

15. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 196); sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2015 Nomor 242 A)
16. Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 195).

I.3. Informasi Umum Tentang Entitas Pelaporan Atau Entitas Akuntansi

Kota Ternate adalah salah satu kota yang terletak di sebelah barat Halmahera, Kota ini memiliki sejarah masa lalu karena terkenal dengan rempah-rempah. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Ternate pada tanggal 27 April 1999, maka Kota Ternate telah mengalami peningkatan status yang dulunya Kota Administratif menjadi Kotamadya. Sejak berdiri dari Kota Administratif hingga meningkat status menjadi Kotamadya, secara administratif Kota Ternate terdiri dari 3 Kecamatan dan 58 Kelurahan. Pada tahun 2001 dimekarkan menjadi 4 kecamatan selanjutnya tahun 2009 dimekarkan kembali menjadi 7 kecamatan antara lain Kecamatan Pulau Ternate, Kecamatan Pulau Moti, Kecamatan Pulau Batang Dua, Kecamatan Pulau Hiri, Kecamatan Ternate Selatan, Kecamatan Ternate Tengah dan Kecamatan Ternate Utara. Pada tahun 2018 melalui Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2018, Kota Ternate berkembang menjadi 8 kecamatan dengan kecamatan Ternate Barat sebagai kecamatan baru pemekaran dari Kecamatan Pulau Ternate.

Secara astronomis, Kota Ternate terletak diantara 0025'41,82" - 1021'21,78" Lintang Utara dan antara 12607'32,14" - 127026'23,12" Bujur Timur. Secara geografis Kota Ternate dibatasi oleh :

- Utara : Laut Maluku
- Selatan : Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Selatan
- Timur : Pulau Halmahera
- Barat : Laut Maluku dan Pulau Sulawesi

Luas Kota Ternate adalah 5.709,72 Km², yang terdiri dari daratan 162,17 Km² dan lautan 5.547,55 Km².

Seperti umumnya daerah kepulauan yang memiliki ciri yaitu Desa/Kelurahannya merupakan wilayah pesisir, begitu pula dengan Kota Ternate. Dari 78 Kelurahan yang ada di wilayah Kota Ternate, 57 Kelurahan berklasifikasi Kelurahan Pantai sedangkan 21 Kelurahan lainnya berklasifikasi kelurahan bukan pantai.

Penduduk Kota Ternate berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2020 sebanyak 233.208 jiwa yang terdiri atas 118.448 jiwa penduduk laki-laki dan 114.760 jiwa penduduk perempuan. Jumlah rasio jenis kelamin penduduk Kota Ternate pada tahun 2020 adalah 101. Artinya tiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 101 penduduk laki-laki. (Sumber *Badan Pusat Statistik Kota Ternate 2020*)

Ternate memiliki iklim tropis yang sangat dipengaruhi oleh iklim laut dan memiliki dua musim yang seringkali diselingi dengan dua kali masa pancaroba di setiap tahunnya. Selama tahun 2020, rata-rata suhu tahunan sebesar 27°C suhu udara terhangat mencapai 33 °C di Kota Ternate. Sepanjang tahun 2020 suhu udara tidak mengalami perubahan cuaca ekstrim. Rata-rata dalam setahun, Kota Ternate memiliki kelembaban udara yang cukup tinggi yaitu mencapai 86%.

Pada tahun 2020, tekanan udara sebesar 1008 mb dengan tekanan udara terendah terjadi pada bulan Desember sedangkan tekanan udara tertinggi terjadi pada bulan Februari. Matahari bersinar lebih lama pada bulan Agustus, sementara bersinar lebih cepat pada bulan Januari.

VISI DAN MISI

Visi

Dengan mempertimbangkan keinginan luhur dari para pendiri bangsa dan cerminan hati sanubari rakyat Kota Ternate untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera lahir dan bathin, memperhatikan isu strategis dalam lima tahun mendatang serta memperhatikan amanat konstitusional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, maka Visi Pembangunan Kota Ternate Tahun 2016-2021 adalah :

Terwujudnya Ternate menjadi Kota “Berbudaya,
Agamais, Harmonis, Mandiri, Berkeadilan
dan Berwawasan Lingkungan”

Kota Ternate “BAHARI BERKESAN”

1. Ternate Berbudaya, bahwa kebijakan pemerintahan maupun perilaku masyarakat haruslah mencerminkan nilai-nilai budaya dan adat seatoran sebagai sumber nilai yang terbukti ampuh menjadi spirit sosial dan spirit moral Moloku Kie raha pada masa kejayaannya. Hal ini diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan terhadap nilai budaya dan adat satoran dengan mengupayakan pelestariannya, sekaligus menjadikan sistim nilai yang membentuk kesadaran sosial yang diharapkan terefleksi dalam prilaku sosial masyarakat.
2. Ternate Agamais, adalah upaya menciptakan serta menumbuhkan kesadaran keberagamaan dan spiritualitas di dalam masyarakat yang dimulai sejak masa kanak-kana dan usia remaja, yang diarahkan untuk menangkal berbagai dampak buruk modernitas upaya mewujudkan masyarakat bermartabat, berakhlaq, berbudi pekerti luhur, toleran, penuh belas kasih, yang menempatkan nilai keberagamaan sebagai

basis moral yang membentuk kesadaran sosial dan tercermin dalam kehidupan sosial yang santun, religius, aman dan tentram

3. Ternate Harmonis, artinya mengupayakan terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan sosial dan lingkungan fisik perkotaan, melalui tata ruang perkotaan terpadu, serasi, nyaman dan sehat, yang mampu mengakomodasi dinamika ekonomi, sosila budaya, dan politik secara seimbang melalui ketersediaan ruang publik yang representatif bagi seluruh masyarakat tanpa kesan pengabdian dan diskriminasi, sehingga menumbuhkan rasa memiliki terhadap Kota Ternate, terpeliharanya persatuan dan kesatuan, meningkatkan wawasan kebangsaan, kerukunan dalam pembauran, semangat persaudaraan, sikap toleran baik antar umat beragama, antar etnik, maupun antar kelompok.
4. Ternate Mandiri, artinya menjadikan Ternate Kota Jasa dan Perdagangan sebagai pusat perekonomian Maluku Utara, melalui penataan sistim pengelolaan keuangan daerah yang efisien, ekonomis, kompetitif, dukungan infra struktur ekonomi yang memadai, kepastian hukum, kemudahan investasi. Sekaligus mendorong kreatifitas dan produktifitas melalui pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah agar lebih produktif dan berdaya saing, yang diarahkan pada kemandirian ekonomi masyarakat.
5. Ternate berkeadilan, artinya mewujudkan prinsip persamaan hak warga negara dihadapan hukum dan pemerintahan yang diarahkan pada penegakan supermasi hukum, perlindungan HAM, keterbukaan akses dan kesempatan yang merata dalam pelayanan publik disemua bidang yang diarahkan secara sungguh-sungguh pada upaya menjamin kesejahteraan rakyat melalui kebijakan APBD yang memihak rakyat, serta kualitas pelayanan publik, pemerataan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, teratasinya masalah perkotaan seperti kemiskinan, mengurangi kesenjangan antar wilayah dan sektoral, serta pemberdayaan masyarakat hingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs).
6. Ternate Berwawasan Lingkungan, artinya mengupayakan penataan pembangunan perkotaan lingkungan fisik dan lingkungan sosial budaya, dengan memperhatikan keseimbangan ekologis. Hal ini diarahkan pada upaya revitalisasi lingkungan fisik perkotaan dan lingkungan hidup yang hijau, asri, nyaman, dan sehat melalui penataan yang terpadu dan serasi antara lingkungan hidup dan lingkungan sosial, yang diharapkan memberi ketenangan, kenyamanan dan kedamaian kepada warga

masyarakat, sekaligus mengupayakan pelestarian ekologi pantai, dan menghindari kecenderungan eksploitasi lingkungan fisik dan ekologi pantai sebagai dampak pengembangan city front water dan perilaku masyarakat yang relatif belum ramah lingkungan.

Misi

Berdasarkan rumusan visi pembangunan Kota Ternate sebagaimana telah diuraikan diatas, maka rumusan Misi pembangunan daerah jangka menengah Kota Ternate dalam tahun 2016-2021 ke depan, adalah sebagai berikut:

1. Membangun Ternate yang Mandiri Adil dan Sejahtera
2. Membangun Kota Ternate Sebagai Kota Berbudaya dan Agamais
3. Mewujudkan Infrastruktur Jasa dan Perdagangan yang Merata Antar Wilayah Perkotaan
4. Membangun Kota Ternate Sebagai Kota Pesisir dan Maritim
5. Membangun Kota Ternate Sebagai Pusat Destinasi Wisata Unggulan Berbasis Budaya, Sejarah dan Bahari.

Organisasi dan Kelembagaan

Untuk mencapai Visi dan Misi Kota Ternate, Pemerintahan dibawah kepemimpinan:

Walikota : **Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si**

Wakil Walikota : **Jasri Usman, S.Ag**

Sekretaris Daerah : **Dr. Jusuf Sunya, SP., ME**

Penataan kelembagaan yang sesuai dengan konsep otonomi daerah mempunyai arti penting yang sangat strategis untuk meningkatkan kinerja aparatur. Penataan kelembagaan yang telah dilakukan dan perangkat daerah yang terdapat di lingkungan Pemerintah Kota Ternate membawahi 25 Instutisi Dinas, 6 Institusi Badan Daerah dan 3 Sekretariat, dan perangkat pemerintahan lainnya. Didalamnya terdapat 4.682 Pegawai Negeri Sipil, yang terdiri dari 2991 perempuan dan selebihnya laki-laki. Lebih dari separuh jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kota Ternate (60,58%) merupakan

lulusan sarjana dan masih terdapat 15 orang PNS yang hanya berpendidikan SLTP ataupun dibawahnya.

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Kota Ternate yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun Kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Sekretaris Daerah membawahi tiga orang Asisten, yaitu : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, Asisten Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum. Masing-masing Asisten membawahi sejumlah bagian dalam Sekretariat Daerah dan melakukan koordinasi kegiatan di bidangnya masing-masing.

Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Inspektorat Daerah

Inspektorat dipimpin oleh Inspektur dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat di lingkungan Pemerintah Kota Ternate berjumlah 1 (satu).

Dinas

Dinas merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Jumlah dinas yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Ternate 25 Dinas.

Lembaga Teknis Daerah

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dan berbentuk Badan, Kantor, dan Satpol PP.

Kecamatan

Kecamatan adalah wilayah kerja Kepala Kecamatan sebagai perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kepala Kecamatan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Ternate berjumlah 8 (Delapan) kecamatan.

I.4. Pendekatan Penyusunan Laporan keuangan

I.3.1 Unsur Laporan Keuangan

LKPD Kota Ternate Tahun Anggaran 2020 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas dalam Pemerintah Kota Ternate, yang terdiri dari PPKD (BUD) dan SKPD. LKPD Kota Ternate Tahun Anggaran 2020 terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran(LRA)

LRA memuat informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan Daerah. Data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal didasarkan pada LRA SKPD dan data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, Transfer dan Pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran) didasarkan pada LRA PPKD (BUD).

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

3. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

4. Laporan Perubahan Ekuitas(LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

5. Neraca

Neraca memuat informasi mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Pada Neraca SKPD disajikan mengenai Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca BLUD menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca PPKD (BUD) menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Kewajiban dan Ekuitas.

6. Laporan Arus Kas(LAK)

Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) selama Tahun Anggaran 2020.

7. Catatan atas Laporan Keuangan(CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan dan daftar mengenai nilai suatu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2020 disusun berdasarkan penggabungan antara laporan keuangan SKPD, dengan Laporan keuangan BUD. Laporan keuangan SKPD dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, sedangkan Laporan keuangan BUD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan.

I.5. Sistematika Penyajian Catatan Ataslaporankeuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate disajikan dengan urutan sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
 - I.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - I.2. Landasan Hukum Penyusunan LaporanKeuangan
 - I.3. Pendekatan Penyusunan LaporanKeuangan
 - I.4. Sistematika Penyajian Catatan atas LaporanKeuangan

- Bab II Ekonomi Makro
 - II. 1 EkonomiMakro
 - II. 2 Kebijakan KeuanganDaerah
 - II. 3 Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal Pemerintah Kota
 Ternate
 - II. 4 Indikator Pencapaian Kinerja Program Pemerintah
 Kota Ternate

- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Fiskal
 - III.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran KinerjaFiskal
 - III.2. Faktor Pendukung dan Penghambat pencapaian kinerja

- Bab IV Ikhtisar Pencapaian Kinerja Program Pemerintah Kota Ternate
 - IV.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Program Pemerintah
 Kota Ternate

- IV.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja
- Bab V Kebijakan Akuntansi
 - V.1. Entitas Pelaporan
 - V.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - V.3. Kebijakan Akuntansi
- Bab VI Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
 - VI.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - VI.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
 - VI.3. Neraca
 - VI.4. Laporan Operasional (LO)
 - VI.5. Laporan Arus Kas
 - VI.6. Laporan Perubahan Ekuitas
- Bab VII Penjelasan atas Informasi Non Keuangan
- Bab VIII Penutup

BAB II

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target

Kinerja APBD

III.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2020 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kota Ternate yaitu (minimal) :

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 3,46 %
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,80
- c. Gini Ratio sebesar 0,272 %
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 79,82
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar -0,85
- f. Tingkat Inflasi sebesar 2,13 %
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp10.549.290.7

III.2. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2.1 Persentase Penduduk Miskin Kota Ternate

No	Tingkat Kemiskinan*	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/turun (%)
1	Kab/Kota (%)	3,14	3,46	0,32
2	Kab/Kota (Ribu Orang)	7,25	8,18	12,83
3	Provinsi (%)	6,77	6,78	0,01
4	Nasional (%)	9,41	9,78	0,37
5	Peringkat Provinsi**	1	1	
6	Peringkat Nasional	-	-	

Catatan : * Angka Kemiskinan yang digunakan merupakan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Bulan Maret

** Peringkat diurutkan dari terkecil ke terbesar

Sumber Dokumen: BPS Kota Ternate

Persentase penduduk miskin Kota Ternate pada Tahun 2019 sebesar 3.14% mengalami kenaikan dimana pada Tahun 2020 persentase penduduk miskin menjadi 3.46% . Persentase penduduk miskin Kota Ternate masih di atas provinsi dan nasional atau di bawah provinsi dan nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.1.1 Tingkat Kedalam Kemiskinan Kota Ternate

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/Turun (poin)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota	0,62	0,38	-0,24
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	0,89	0,94	0,05
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,55	1,61	0,06
4	Peringkat Provinsi	4	1	
5	Peringkat Nasional	-	-	

Catatan : * Angka Tingkat Kedalaman Kemiskinan yang digunakan merupakan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Bulan Maret

** Peringkat diurutkan dari terkecil ke terbesar

Sumber Dokumen: BPS Kota Ternate

Tabel 2.1.2 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kota Ternate

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/Turun (poin)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab/Kota	0,20	0,10	-0,10
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,20	0,21	0,01
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,37	0,38	0,01
4	Peringkat Provinsi	6	3	
5	Peringkat Nasional	-	-	

Catatan : * Angka Tingkat Keparahan Kemiskinan yang digunakan merupakan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Bulan Maret

** Peringkat diurutkan dari terkecil ke terbesar

Sumber Dokumen: BPS Kota Ternate

III.3. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. **Penganggur terbuka**, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kota Ternate Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Ternate Tahun 2020 adalah sebesar 5,80 %, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Ternate

No	Uraian*	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	5,87	5,80	-0,07
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	4,81	5,15	0,34
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,23	7,07	1,84
4	Peringkat Provinsi**	10	8	
5	Peringkat Nasional	-	-	

Catatan : * Angka TPT Tahunan yang digunakan merupakan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional Bulan Agustus.

** Peringkat diurutkan dari terkecil ke terbesar

Sumber Dokumen: BPS Kota Ternate

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Prov/Kab/Kota Ternate Tahun 2020 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 5,80 % sedangkan TPT pada Tahun 2019 adalah sebesar 5,87 % atau lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2019. Namun/Dengan demikian TPT Kota Ternate masih lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Maluku Utara/Nasional yang sebesar 0,34 %. dan sebesar 1,84 %.

III.4. Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana :

- Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
- Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kota Ternate. Realisasi

pencapaian Gini Ratio Kota Ternate Tahun 2020 adalah sebesar 0,272 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.3 Gini Ratio Kota Ternate

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/turun (%)
1	Tingkat Kab/Kota	0,268	0,272	0,004
2	Tingkat Provinsi	0,312	0,308	-0,004
3	Tingkat Nasional	0,38	0,381	-0,001
3	Peringkat Provinsi	6	6	
4	Peringkat Nasional	-	-	

Sumber Dokumen: BPS Kota Ternate

Pada Tahun 2020, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kota Ternate yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,272. Angka ini turun/naik 0,004 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2019 yang sebesar 0,268 dan lebih tinggi/rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi dan Nasional.

III.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standart of living). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat , yaitu ;

- a. Rendah (< 60)
- b. Sedang ($60 \leq IPM < 70$)
- c. Tinggi ($70 \leq IPM < 80$)
- d. Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kota Ternate Realisasi pencapaian IPM Kota Ternate Tahun 2020 adalah sebesar 79,82 poin dengan kategori sangat rendah sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.4 Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/turun (poin)
1	Kabupaten/Kota	80,03	79,82	-0,21
2	Provinsi	68,7	68,49	-0,21
3	Indonesia/Nasional	71,92	71,94	0,02
4	Peringkat Provinsi	1	1	
5	Peringkat Nasional	-	-	

Sumber Dokumen BPS Kota Ternate

Realisasi pencapaian IPM Kota Ternate adalah sebesar 79,82 poin, dibandingkan Tahun 2019 sebesar 80,03 poin mengalami penurunan sebesar (0.21) poin.. Peningkatan/penurunan IPM tersebut disebabkan meningkatnya/menurunnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), atau dan harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita IPM di Kota Ternate pada saat ini berada pada urutan 2 dari 10 Kab/Kota yang ada di Provinsi Maluku Utara dan berada pada urutan 27 untuk peringkat nasional (Indonesia) dari 534 Kab/Kota yang ada di Indonesia.

III.6. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

No	Uraian	Kota Ternate			Provinsi	Nasional
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2020
1	PDRB (harga konstan 2010) (Milyar Rp)	6.736,30	7.286,00	7.223,80	27.868,50	10.722.442,70
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	8,26	8,16	-0,85	4.92	-2,07
3	Peringkat Provinsi	3	3	10	-	
4	Peringkat Nasional (Indonesia)	-	-	-	-	

Sumber Dokumen: BPS Kota Ternate.

Dalam skala propinsi laju pertumbuhan Kota Ternate menempati urutan 1 dari laju pertumbuhan Kota atau kabupaten lain dalam wilayah Propinsi Maluku Utara.

III.7. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Prov/Kab/Kota Ternate dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (creeping inflation) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang (Gallopung Inflation) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) Inflasi Berat (High Inflation) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30 – 100 % setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) Hiperinflasi (Hyper Inflation) Jenis inflasi ini sangat

dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Prov/Kab/Kota Ternate Tingkat Inflasi Prov/Kab/Kota Ternate Tahun 2020 adalah sebesar 2,13 % dengan kategori ringan/sedang/berat/sangat berat sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.6 Tingkat Inflasi Kota Ternate

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Kab/Kota (%)	2,02	2,13	0,11
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	2,02	2,13	0,11
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	2,72	1,68	-1,04
4	Peringkat Provinsi*	-	-	
5	Peringkat Nasional**	28	64	

Catatan : * Di Propinsi Maluku Utara hanya Kota Ternate yang merupakan kota IHK/Inflasi, wilayah lain selain Kota Ternate tidak dihitung angka IHK/Inflasi.

** Peringkat diurutkan dari inflasi terkecil ke terbesar. Peringkat 2019 merupakan peringkat dari 82 kota IHK/ Inflasi, peringkat 2020 merupakan peringkat dari 90 Kota IHK/ Inflasi, pada 2020 BPS menambahkan cakupan penghitungan ke 8 kota yakni Gunungsitoli, Waingapu, Sintang, Kotabaru, Tanjung Selor, Kotamobagu, Luwuk dan Timika.

Sumber Dokumen: BPS Kota Ternate

Tingkat inflasi di Kota Ternate Tahun 2019 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 2,02 %, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2020 adalah sebesar 2,13 % atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2019. Namun/Dengan demikian inflasi Kota Ternate masih lebih tinggi/rendah dibandingkan tingkat inflasi Nasional yang sebesar 2,72 % dan sebesar 1,68 %.

III.8. Struktur Perekonomian Kota Ternate

Struktur perekonomian Kota Ternate dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel.2.1.7 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Dalam Milyar Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	368,41	404,98	430,48
3	Pertambangan dan Penggalan	6,94	7,72	7,97
4	Industri Pengolahan	302,31	309,05	283,57
5	Pengadaan Listrik dan Gas	13,71	14,74	15,54
6	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,84	7,23	7,84
7	Konstruksi	653,37	718,42	740,13

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
8	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.550,31	2.805,48	2.650,54
9	Transportasi dan Pergudangan	1.611,18	1.772,05	1.385,62
10	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	106,29	115,21	107,41
11	Informasi dan Komunikasi	748,15	804,82	861,72
12	Jasa Keuangan dan Asuransi	662,8	709,23	770,84
13	Real Estate	22,88	24,69	23,59
14	Jasa Perusahaan	72,15	79,3	78,25
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.566,76	1.756,43	2.020,54
16	Jasa Pendidikan	497,18	534,63	562,02
17	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	313,23	348,28	394,13
18	Jasa lainnya	185,32	205,21	209,1
19	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	9.687,83	10.617,49	10.549,29
20	Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas	9.687,83	10.617,49	10.549,29
21	PDRB Provinsi	36.468,79	39.694,05	42.142,24
22	PDB Nasional	14.838.756,00	15.832.535,40	15.434.151,80
23	Peringkat Provinsi	3	3	10
24	Peringkat Nasional	-	-	-

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA
FISKAL PEMERINTAH KOTA
TERNATE

III. 1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN SASARAN KINERJA FISKAL

Anggaran Daerah pada hakikatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Pada Tahun Anggaran 2020 anggaran Belanja Daerah Kota Ternate ditetapkan sebesar Rp1.043.913.742.281,00 dan direncanakan didanai melalui penerimaan pendapatan yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp82.548.422.000,00 , Pendapatan Dana Perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebesar Rp942.468.720.281,00 dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp18.896.600.000,00 sehingga akan menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp0,00 yang ditutup melalui SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan rencana pinjaman daerah.

Realisasi sasaran kinerja fiskal Pemerintah Kota Ternate selama Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat secara ringkas pada tabel 2 berikut ini:

**Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Fiskal Pemerintah Kota Ternate
Tahun Anggaran 2020**

URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%	SELISIH
PENDAPATAN - LRA	1.043.913.742.281,00	945.272.548.210,52	90,55	(98.641.194.070,48)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA	82.548.422.000,00	98.448.042.450,52	119,26	15.899.620.450,52
PENDAPATAN TRANSFER - LRA LAIN2	942.468.720.281,00	846.824.505.760,00	89,85	(95.644.214.521,00)
PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	18.896.600.000,00	-	-	(18.896.600.000,00)
BELANJA	1.044.728.905.814,00	943.351.349.388,26	90,30	(101.377.556.425,74)
BELANJA OPERASI	784.671.795.578,00	718.788.379.789,26	91,60	(65.883.415.788,74)
BELANJA MODAL	220.057.110.236,00	188.517.945.361,00	85,67	(31.539.164.875,00)
BELANJA TAK TERDUGA	40.000.000.000,00	36.045.024.238,00	90,11	(3.954.975.762,00)
PEMBIAYAAN	-	(4.806.514.549,84)	-	(4.806.514.549,84)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	(4.806.514.549,84)	-	(4.806.514.549,84)
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	-	(4.806.514.549,84)	-	(4.806.514.549,84)
SISA KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SIKPA) SESUDAH KOREKSI	(1.628.273.333,00)	(3.572.059.647,58)	-	(1.943.786.314,58)

Tabel di atas memperlihatkan bahwa realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp945.272.548.210,52 tidak mencapai target yang telah ditetapkan dari anggaran sebesar Rp1.043.913.742.281,00 atau 90,55%.

Untuk melihat perkembangan target dan realisasi penerimaan PAD dari tahun 2016 sampai dengan 2020 secara jelas dapat dilihat pada Tabel dan Grafik berikut ini:

Perkembangan PAD Tahun Anggaran 2016 – 2020

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Perkembang	
			Target	Realisasi
2016	73.934.252.000,00	69.390.176.544,11		
2017	117.400.328.450,00	93.755.330.223,97	58,79	35,11
2018	153.234.457.600,00	96.425.003.776,58	30,52	2,85
2019	108.316.480.000,00	105.903.491.250,12	(29,31)	9,83
2020	82.548.422.000,00	98.448.042.450,52	(23,79)	(7,04)

Secara Keseluruhan dari tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun anggaran 2020 baik target maupun realisasi PAD Kota Ternate terus menerus mengalami kenaikan.

Dilihat dari sisi target anggaran, dari tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun anggaran 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp43.466.076.450,00 atau 58,79%, dari tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2018 mengalami kenaikan Rp35.834.129.150,00 atau 30,52%, dari tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2019 mengalami penurunan Rp44.917.977.600,00 atau 29,31%, dan tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2020 mengalami penurunan Rp25.768.058.000,00 atau 23,79%

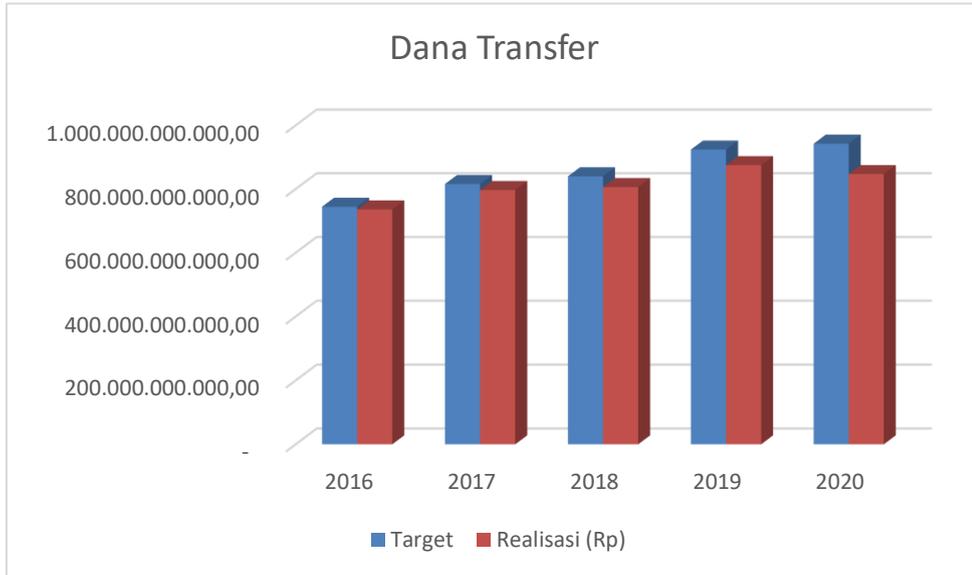
Kemudian apabila dilihat dari sisi realisasi penerimaan PAD, dari tahun anggaran 2016 sampai tahun anggaran 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp24.365.153.679,86 atau 35,11%, kemudian tahun anggaran 2017 sampai tahun anggaran 2018 sebesar Rp2.669.673.552,61 atau 2,85%, tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp9.478.487.473,54 atau 9,83% dan tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp7.455.448.799,60 atau 7,04%

Untuk Dana Perimbangan, realisasi penerimaan adalah sebesar Rp846.824.505.760,00 atau 89,85% dari target yang ditetapkan sebesar Rp942.468.720.281,00. Perkembangan target dan realisasi penerimaan yang berasal dari Pendapatan Transfer dari tahun 2016 sampai dengan 2020 secara jelas dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel Perkembangan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2016-2020

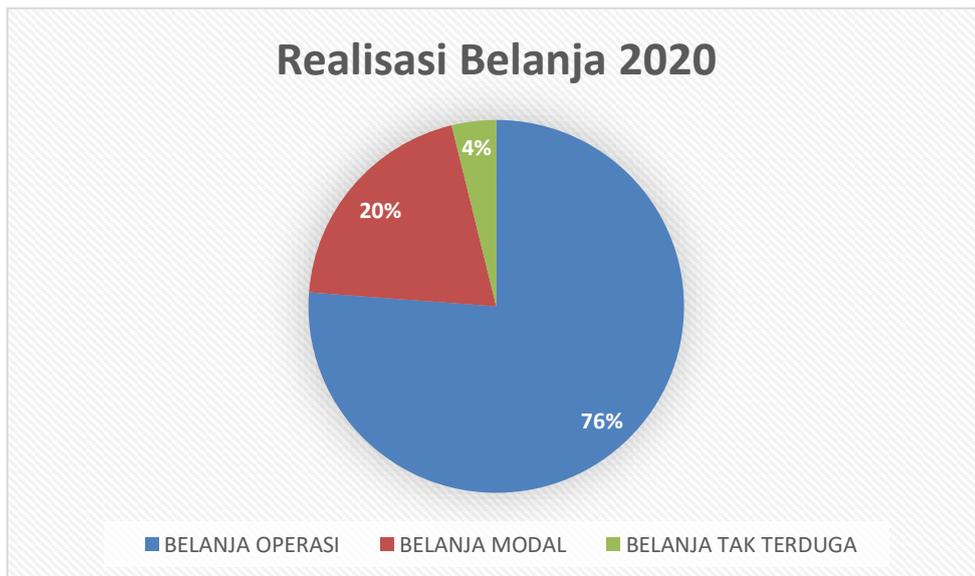
Tahun Anggaran	Target	Realisasi (Rp)	% Perkembangan	
			Target	Realisasi
2016	744.346.850.000,00	735.977.355.407,00		
2017	815.706.786.000,00	796.804.528.491,00	2,54	(2,57)
2018	839.948.502.000,00	806.104.834.365,00	4,15	(4,25)
2019	923.812.131.000,00	874.822.346.811,00	5,83	(6,08)
2020	942.468.720.281,00	846.824.505.760,00	10,35	(10,93)

Grafik Perkembangan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2016 – 2020



Untuk belanja daerah tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp1.044.728.905.814,00 dan realisasikan sebesar Rp943.351.349.388,26 atau 90,30% sehingga masih terdapat sisa anggaran belanja daerah sebesar Rp101.377.556.425,74 atau 9,70%.

Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp784.671.795.578,00 dan yang direalisasikan sebesar Rp718.788.379.789,26 atau sebesar 91,60%. Anggaran Belanja Modal sebesar Rp220.057.110.236,00 dan Realisasi Rp188.517.945.361,00 atau 85,67%, sedangkan Belanja Tak Terduga dianggarkan Rp40.000.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp36.045.024.238,00 atau 90,11%.



No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	407.110.329.060,00	399.268.221.088,00	98,07
2	Belanja Barang Dan Jasa	316.026.635.518,00	260.888.108.201,26	82,55
3	Belanja Subsidi	-	-	-
4	Belanja Hibah	59.497.831.000,00	56.616.300.500,00	95,16
5	Belanja Bantuan Sosial	2.037.000.000,00	2.015.750.000,00	98,96
6	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-
Total		784.671.795.578,00	718.788.379.789,26	91,60

Belanja Modal diperuntukkan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan- kegiatan dan program. Pada tahun anggaran 2020, Belanja Modal mendapat alokasi anggaran sebesar Rp220.057.110.236,00 dan terealisasi sebesar Rp188.517.945.361,00 atau 85,67%.

Adapun belanja Tak Terduga untuk Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp40.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp36.045.024.238,00 atau 90,11%.

Dalam hal Pembiayaan Daerah sebagai pos untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus anggaran dari target Penerimaan Pembiayaan netto sebesar Rp0,00 dapat direalisasikan sebesar (Rp4.806.514.549,84), realisasi penerimaan ini seluruhnya berasal dari SIKPA tahun anggaran sebelumnya.

III. 2 FAKTOR PENDUKUNGDAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

Secara umum faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja keuangan Tahun Anggaran 2020, yaitu:

1. Belum optimalnya kinerja pelaksanaan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dalam menyusun Analisis Beban Kerja dan target SKPD;
2. Belum optimalnya kinerja Kerjasama Informasi dan Media Massa dalam jumlah kerjasama bidang informasi dan komunikasi yang dilaksanakan oleh Pemda dengan media cetak dengan kecenderungan masyarakat lebih menyukai informasi yang berasal dari media elektronik dibandingkan dengan media cetak;
3. Kualitas dan profesionalisme SDM aparatur belum memadai;
4. Kelembagaan perangkat daerah yang belum ramping struktur dan kaya fungsi;
5. Kapasitas keuangan daerah yang belum optimal;
6. Belum optimalnya pengelolaan aset;
7. Belum optimalnya penyusunan produk hukum daerah;
8. Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Sedangkan faktor-faktor penunjang pencapaian kinerja adalah:

1. Adanya perbaikan sistem kerja dan sarana prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja;
2. Adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal, ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan;
3. Semakin meningkatnya koordinasi antara dinas/kantor/badan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
4. Semakin meningkatnya koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan instansi vertikal lainnya dan
5. Dengan meningkatnya penyebarluasan informasi pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah.

BAB IV
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA
PROGRAM PEMERINTAH KOTA
TERNATE

VI.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM

Pencapaian kinerja program merupakan gambaran tentang ketercapaian serangkaian aktivitas dalam bentuk pelaksanaan kegiatan, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan kegiatan merupakan representasi dari peran SKPD terhadap pencapaian sasaran pembangunan melalui kontribusi terhadap indikasi kegiatan yang didefinisikan dalam dokumen rencana sebagai wujud sinergitas peran.

Pelaksanaan program dan kegiatan ini disesuaikan dengan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Ternate pada Tahun Anggaran 2020, alokasi Belanja Daerah yang terbesar adalah untuk menunjang pelaksanaan urusan pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp221.609.890.401,00 atau 32,12% dari total anggaran Belanja Daerah yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan 15 program dengan 108 kegiatan. Tabel di bawah ini menggambarkan secara rinci alokasi Belanja Daerah untuk setiap urusan.

Alokasi Belanja Daerah Per Urusan Tahun Anggaran 2020

NO	NAMA SKPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020
A	<i>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</i>	516,036,077,003.00	470,258,223,892.35
1	DINAS PENDIDIKAN	221,609,890,401.00	214,624,321,586.00
2	DINAS KESEHATAN	94,509,272,156.00	75,346,227,078.35
3	DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG	153,016,397,962.00	138,501,376,247.00
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN & PERTANAHAN	21,722,238,212.00	18,416,755,235.00
5	DINAS KEBAKARAN	6,657,696,052.00	6,194,141,675.00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12,761,404,706.00	12,183,715,382.00
7	DINAS SOSIAL	5,759,177,514.00	4,991,686,689.00
B	<i>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</i>	101,898,221,471.00	90,836,303,533.00
8	DINAS TENAGA KERJA	3,908,238,473.00	3,253,328,161.00
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK	5,490,062,765.00	4,815,828,618.00
10	DINAS KETAHAHAN PANGAN	4,336,564,352.00	3,838,007,761.00
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	24,407,978,508.00	22,587,718,295.00
12	DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL	5,450,387,420.00	4,922,756,247.00
13	DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN & KELUARGA BERENCANA	9,013,558,092.00	6,989,720,502.00
14	DINAS PERHUBUNGAN	12,316,414,754.00	11,259,103,304.00
15	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA & PERSANDIAN	4,838,437,314.00	3,751,973,261.00
16	DINAS KOPERASI USAHA KECIL & MENENGAH	8,119,431,485.00	7,701,732,706.00

NO	NAMA SKPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020
17	DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	5,786,540,452.00	5,395,154,885.00
18	DINAS PEMUDA & OLAH RAGA	7,259,582,495.00	6,693,700,142.00
19	DINAS KEBUDAYAAN	6,448,367,071.00	5,714,744,566.00
20	DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP DAERAH	4,522,658,290.00	3,912,535,085.00
C	Urusan Pilihan	63,268,896,140.00	57,216,873,740.00
21	DINAS KELAUTAN & PERIKANAN	15,135,124,760.00	12,900,015,502.00
22	DINAS PARIWISATA	14,011,812,528.00	12,030,416,320.00
23	DINAS PERTANIAN	12,324,598,558.00	11,888,768,549.00
24	DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN	21,797,360,294.00	20,397,673,369.00
D	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	363,525,711,200.00	325,039,948,222.91
25	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)	15,206,501,258.00	14,738,852,777.00
26	WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA	631,562,792.00	603,132,934.00
27	SEKRETARIAT DAERAH	42,123,598,402.00	36,785,938,049.00
28	SEKRETARIAT DPRD	26,199,705,611.00	19,381,384,099.00
29	KECAMATAN TERNATE UTARA	18,265,092,179.00	17,224,729,607.00
30	KECAMATAN TERNATE TENGAH	20,780,017,792.00	19,889,637,519.91
31	KECAMATAN TERNATE SELATAN	21,126,275,995.00	20,175,690,740.00
32	KECAMATAN PULAU TERNATE	7,518,298,808.00	7,393,481,375.00
33	KECAMATAN MOTI	6,133,501,794.00	5,766,331,716.00
34	KECAMATAN PULAU HIRI	5,890,047,452.00	5,705,205,136.00
35	KECAMATAN PULAU BATANG DUA	6,546,616,776.00	6,133,446,528.00
36	KECAMATAN TERNATE BARAT	9,485,378,137.00	8,673,059,958.00
37	INSPEKTORAT DAERAH	7,717,771,961.00	5,709,271,817.00
38	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN DAERAH	11,033,688,552.00	9,146,117,721.00
39	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH	12,925,695,683.00	9,613,556,751.00
40	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH (PPKD)	101,534,831,000.00	94,677,074,738.00
41	BADAN PENGELOLAAN PAJAK & RETRIBUSI DAERAH	23,506,494,417.00	20,745,321,613.00
42	BADAN KEPEGAWAIAN & PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAERAH	14,212,774,429.00	11,746,731,208.00
43	BADAN KESATUAN BANGSA & POLITIK	5,753,357,789.00	4,811,832,864.00
44	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6,934,500,373.00	6,119,151,072.00
TOTAL		1,044,728,905,814.00	943,351,349,388.26

Secara umum hasil yang dicapai dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan diantaranya adalah terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi gedung kantor, gedung sekolah, puskesmas, posyandu, pengadaan buku dan alat tulis sekolah, tersedianya meubelair dan alat kantor (termasuk sekolah), terlaksananya penyediaan alat angkutan (kendaraan dinas dan alat berat), terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase, terlaksananya penyediaan alat-alat kedokteran untuk kebutuhan puskesmas, terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi PJU dan rehabilitasi taman.

Penjelasan secara rinci mengenai hasil pencapaian dari kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dapat ditemui pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tahun Anggaran 2020.

VI.2. FAKTOR PENDUKUNGDAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian tujuan dan sasaran program seringkali menjadi tidak maksimal, hal tersebut disebabkan proporsi anggaran terhadap kegiatan utama dan kegiatan penunjang yang kurang didefinisikan secara memadai;
2. Efektivitas program dan kegiatan seringkali kurang terarah, hal tersebut disebabkan masih kurang tersedianya petunjuk teknis pelaksanaan sebagai instrumen kendali;
3. Dalam menyusun skenario pencapaian tujuan dan sasaran program dan kegiatan, seringkali kurang mempertimbangkan faktor eksternalitas yang dapat mempengaruhi kinerja.

Disamping penghambat juga tentunya terdapat faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja program, antara lain:

1. Tersedianya pendanaan yang memadai yang sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan;
2. Meningkatnya pemahaman dari para Panitia Pengelola Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan yang diembannya;
3. Tersedia media baik bagi masyarakat dan SKPD dalam menyalurkan aspirasi baik saran maupun kebutuhan akan pelaksanaan program dalam bentuk Forum Musrenbang mulai dari tingkat Kelurahan hingga tingkat SKPD; dan
4. Tersedianya media dalam rangka pemantauan pelaksanaan kegiatan dan program melalui laporan dan rapat evaluasi bulanan.

BAB V

KEBIJAKAN AKUNTANSI

V.1. ENTITAS PELAPORAN

Entitas Pelaporan dalam LKPD Kota Ternate Tahun Anggaran 2020 adalah Pemerintah Kota Ternate. Selain itu Pemerintah Kota Ternate memiliki entitas akuntansi yang terdiri dari SKPD dan PPKD (BUD) yang menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya. Entitas Akuntansi Pemerintah Kota Ternate Terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
4. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman & Pertanahan
5. Dinas Kebakaran
6. Satuan Polisi Pamong Praja
7. Dinas Sosial
8. Dinas Tenaga Kerja
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
10. Dinas Ketahanan Pangan
11. Dinas Lingkungan Hidup
12. Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
13. Dinas Pengendalian Kependudukan & Keluarga Berencana
14. Dinas Perhubungan
15. Dinas Komunikasi Informatika & Persandian
16. Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah
17. Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
18. Dinas Pemuda & Olah Raga
19. Dinas Kebudayaan
20. Dinas Perpustakaan & Arsip Daerah
21. Dinas Kelautan & Perikanan
22. Dinas Pariwisata
23. Dinas Pertanian
24. Dinas Perindustrian & Perdagangan
25. Sekretariat Daerah
26. Sekretariat DPRD
27. Kecamatan Ternate Utara
28. Kecamatan Ternate Tengah
29. Kecamatan Ternate Selatan
30. Kecamatan Pulau Ternate
31. Kecamatan Moti
32. Kecamatan Pulau Hiri
33. Kecamatan Pulau Batang Dua
34. Kecamatan Ternate Barat

35. Inspektorat Daerah
36. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian & Pengembangan Daerah
37. Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah
38. Badan Pengelolaan Pajak & Retribusi Daerah
39. Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah
40. Badan Kesatuan Bangsa & Politik
41. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

LKPD Kota Ternate TA 2020 mencakup transaksi keuangan yang berasal dari APBD dan pelaksanaan APBD pada seluruh SKPD dan PPKD (BUD) dalam lingkungan Pemerintah Kota Ternate.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Ternate Tahun 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual, dimana pada tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas menuju akrual. Perubahan basis akuntansi ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, dan Peraturan WaliKota Ternate Nomor 15 Tahun 2014.

1. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

LP SAL disajikan berdasarkan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran. LP SAL disajikan pada entitas akuntansi PPKD (BUD) dan entitas pelaporan. Penyajian LP SAL mengacu pada Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, dan Peraturan WaliKota Ternate Nomor 15 Tahun 2014.

2. Laporan Operasional

Laporan Operasional disusun dan disajikan berdasarkan transaksi selama tahun anggaran 2020 dengan menelusuri baik transaksi kas dan transaksi non kas. Penyajian Laporan Operasional mengacu pada Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, dan Peraturan WaliKota Ternate Nomor 15 Tahun 2014. Laporan operasional yang disajikan tidak melulu terpaku pada struktur APBD Pemerintah Kota Ternate, sehingga bisa saja terdapat perbedaan penyajian satu transaksi pada LRA dan LO, contohnya adalah penyajian penerimaan hasil lelang dari aset daerah yang sudah dihapuskan, penyajian penerimaan dan pengeluaran hibah, dan sebagainya.

3. Laporan Perubahan Ekuitas(LPE)

Perubahan ekuitas disusun dan disajikan berdasarkan transaksi selama tahun anggaran 2020. Penyajian LPE mengacu pada Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, dan Peraturan WaliKota Ternate Nomor 15 Tahun 2014.

4. Catatan atas Laporan Keuangan(CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan disusun untuk menyajikan penjelasan dan daftar mengenai nilai suatu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan

Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

V.2. BASIS AKUNTANSI

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian LKPD Kota Ternate tahun Anggaran 2020 adalah basis akrual . Dalam basis akrual mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

V.3. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian LKPD Kota Ternate Tahun Anggaran 2019 telah mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan WaliKota Ternate Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi. Dengan demikian, dalam penyusunan LKPD Kota Ternate Tahun Anggaran 2020 telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan Pemerintah Kota Ternate.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPD Kota Ternate Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Peraturan WaliKota Ternate Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi adalah:

1. Pendapatan

- a. Pendapatan-LO** adalah hak Pemerintah Kota Ternate yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Laporan Operasional melaporkan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Pendapatan operasional dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (exchange transactions) dan transaksi non-pertukaran (non-exchange transactions). Pendapatan operasional yang berasal dari transaksi non pertukaran pada umumnya timbul dari pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kota Ternate untuk meminta pembayaran kepada masyarakat, seperti pajak, bea, denda, dan penalti, serta penerimaan hibah. Sebaliknya, masyarakat tidak menerima manfaat secara langsung dari pembayaran tersebut. Di samping itu ada kalanya Pemerintah Kota Ternate menyediakan barang dan jasa ke masyarakat atau entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu, misalnya menyediakan layanan kesehatan dengan imbalan sebagai pendapatan. Dalam kebijakan ini, pendapatan dimaksud dikelompokkan sebagai pendapatan pertukaran. Pendapatan Pemerintah Kota Ternate dapat dikelola oleh berbagai entitas pengelola seperti unit pengelola pajak dan unit pengumpul pendapatan lainnya. Akan tetapi, secara akuntansi pendapatan tersebut adalah pendapatan entitas perbendaharaan umum (Bendahara Umum Daerah), kecuali pendapatan yang ditetapkan lain. Pada umumnya pendapatan operasional dikelola oleh Bendahara Umum Daerah selaku pengelola pendapatan secara terpusat. Pendapatan yang dikelola oleh entitas akuntansi SKPD adalah berupa pendapatan yang berasal dari dana limpahan yang ditetapkan dalam anggaran.

Dikecualikan dari ketentuan umum sentralisasi pendapatan ini adalah pendapatan dari dana yang disisihkan untuk dikelola oleh entitas akuntansi secara mandiri, seperti misalnya badan layanan umum daerah. Pendapatan Operasional yang diperoleh dari transaksi non-pertukaran timbul dari:

- 1) Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah untuk memaksakan pembayaran oleh publik (seperti pajak daerah, denda dan sanksi);
- 2) Perimbangan keuangan, berbentuk kas atau non kas, dari entitas pelaporan yang lebih tinggi (Pemerintah dan Pemerintah Provinsi) untuk Pemerintah Daerah;
- 3) Hibah yang diterima dari pemerintah asing dan atau lembaga internasional;
- 4) Penghapusan hutang;
- 5) Sumbangan dari masyarakat dan/atau lembaga masyarakat;
- 6) Dana limpahan yang ditetapkan dalam anggaran untuk entitas akuntansi.

Pendapatan-LO dari jenis transaksi pertukaran tertentu harus diakui sebagai berikut:

- 1) Bila barang ataupun jasa tertentu yang dibuat atau dihasilkan untuk memenuhi kontrak (jangka pendek ataupun jangka panjang), pendapatan harus diakui secara proporsional dengan total biaya yang diperkirakan dapat menghasilkan/menyelesaikan barang atau jasa tersebut guna memenuhi kontrak yang ada. Jika diperkirakan adanya kerugian, pendapatan harus tetap diakui mengikuti proporsi dengan perkiraan total biaya dan biaya harus tetap diakui sampai dengan barang ataupun jasa tersebut dapat memenuhi kontrak yang ada.
- 2) Bila uang muka diterima, seperti pada kegiatan yang berskala besar dan berjangka panjang, pendapatan tidak boleh diakui sampai biaya-biaya yang berhubungan dengan pendapatan tersebut telah terjadi (tanpa memperhatikan apakah uang muka tersebut dapat dikembalikan/refundable). Kenaikan kas dan kenaikan pada kewajiban, seperti “pendapatan yang diterima di muka” harus dicatat pada saat kas diterima.

Sentralisasi Pendapatan

Pendapatan Pemerintah Daerah dapat dikelola oleh berbagai entitas pengelola seperti unit pengelola pajak dan unit pengumpul pendapatan lainnya. Akan tetapi, secara akuntansi pendapatan tersebut adalah pendapatan entitas perbendaharaan umum (Bendahara Umum Daerah), kecuali pendapatan yang ditetapkan lain.

- b. Pendapatan-LRA** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kota Ternate. Pengakuan pendapatan adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi BUD;
- 2) Pendapatan diakui pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD untuk seluruh transaksi SKPD;

Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek, Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA, Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama, Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak

berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran), Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

2. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat:

- a. timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum negara/daerah;
- b. terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
- c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, bantuan keuangan, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

3. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan

yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga.

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja **operasi** antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanjaperjalanan.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset takberwujud.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

- a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - (1) bertambah ekonomis/efisien,dan/atau
 - (2) bertambah umur ekonomis,dan/atau
 - (3) bertambah volume,dan/atau
 - (4) bertambah kapasitas produksi,dan/atau
- b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Hibah adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada Pemerintah Pusat atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

Bantuan Sosial adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk transfer uang atau barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.

Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan

dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

4. Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada Pemerintah Daerah, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

5. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Ternate, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Kas Daerah serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Kas Daerah.

6. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset nonlancar yaitu :

a. Aset Lancar

Aset lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan.

Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, piutang retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang.

Penyisihan terhadap piutang pajak daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:

- 1) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 0% (nol persen).
- 2) Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun sejak tanggal di tetapkan penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen).

- 3) Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen).
- 4) Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (seratus persen)

Penyisihan terhadap piutang retribusi daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:

- 1) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 0% (nol persen)
- 2) Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen).
- 3) Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen).
- 4) Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (seratus persen).

Untuk Piutang dari Dana Bagi Hasil tidak dilakukan penyisihan, karena pencatatan piutang berdasarkan SK Gubernur dan pada tahun berikutnya piutang tersebut pasti dibayarkan berdasarkan SK yang sudah terbit.

Persediaan mencakup (1) barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas, (2) barang dan jasa yang akan diserahkan/dijual ke Masyarakat/Pihak lain.

b. Aset Non lancar

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Kota Ternate atau yang digunakan masyarakat umum.

Aset non lancar diklasifikasikan menjadi:

- 1) investasi jangka panjang Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen.
- 2) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Penyajian investasi pada Neraca Pemerintah Kota Ternate per 31 Desember 2020 terbatas pada investasi jangka panjang.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

a) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidakberkelanjutan;

b) Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. investasi yang tidak dimaksudkan dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara.

3) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari:

- a) Tanah;
- b) Peralatan dan mesin;
- c) Gedung dan bangunan;
- d) Jalan, irigasi, dan jaringan;
- e) Aset tetap lainnya; dan
- f) Konstruksi dalam pengerjaan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Menurut Lampiran, tentang Akuntansi Aset Tetap pada Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas. Pelaksanaan penyusutan dilakukan bersamaan dengan penerapan basis akrual terhitung sejak tahun perolehannya

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut :

- a) Peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000 ke atas.
- b) Aset tetap lainnya seperti bang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, buku-buku perpustakaan dan aset tetap lainnya tanpa batasan nilai tertentu.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi sebesar Rp10.000.000,00 ke atas.

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Sedangkan pengeluaran setelah perolehan awal untuk aset tetap gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud diatas diperlakukan sebagai berikut:

Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berupa pembangunan dan peningkatan/rehabilitasi harus dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan, sedangkan pengeluaran yang berupa pemeliharaan tidak dikapitalisasi/dicatat sebagai biaya.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing- masing periode dengan jumlah yang sama.

Untuk perhitungan penyusutan, aset tetap yang diperoleh pada awal sampai dengan pertengahan tahun buku, dianggap diperoleh pada awal tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan Aset tetap yang diperoleh setelah pertengahan tahun buku sampai dengan akhir tahun, dianggap diperoleh pada awal tahun buku berikutnya. Penyusutan masa manfaat atau umur ekonomis yang digunakan sebagai dasar perhitungan penyusutan berdasarkan pada Keputusan Walikota Nomor 030/Kep.452 –

DPKD/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Umur Ekonomis Barang Milik Daerah.

- 4) Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
- 5) Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam aset lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan, Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun. Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud, dan Asetlain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TP/TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang

melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TP/TGR yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tak berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Amortisasi adalah alokasi sistematis dari nilai aset tak berwujud yang dapat didepresiasi selama masa manfaat aset tersebut Metode amortisasi yang dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method).

Untuk perhitungan amortisasi, aset tak berwujud yang diperoleh pada awal sampai dengan pertengahan tahun buku, dianggap diperoleh pada awal tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan aset tak berwujud yang diperoleh setelah pertengahan tahun buku sampai dengan akhir tahun, dianggap diperoleh pada awal tahun bukuberikutnya.

Aset lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TP/TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun aset tak berwujud. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap Pemerintah Kota

Ternate yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Ternate.

7. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kota Ternate. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan

setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga (*Account Payable*), Utang Bunga (*Accrued Interest*), Utang Perhitungan pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Utang bunga atas utang Pemerintah Kota Ternate dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang Pemerintah Kota Ternate dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Saat ini Pemerintah Kota Ternate tidak memiliki Kewajiban jangka panjang.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah Kota Ternate pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain

perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Kewajiban Pemerintah Kota Ternate dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Kota Ternate pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar

surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

c. Kewajiban Kontijensi

Kewajiban kontijensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah Kota Ternate, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena kemungkinan besar pemerintah tidak mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau jumlah tersebut tidak dapat diukur dengan handal.

8. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kota Ternate, yaitu selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Ternate.

BAB VI

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Bab ini membahas secara rinci mengenai akun-akun yang terdapat pada laporan keuangan yang terdiri dari pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Pembiayaan, Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Selain itu menjelaskan pula mengenai posisi perubahan saldo anggaran lebih dan posisi perubahan ekuitas, serta penjelasan mengenai penerimaan kas dan pengeluaran kas selama tahun anggaran 2020. Penjelasan atas akun-akun tersebut didasarkan pada urutan penyajian laporan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate Tahun Anggaran 2020.

VI.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN – LRA

VI.1.1. PENDAPATAN –LRA

Pada Tahun Anggaran 2020 Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp. 1.043.913.742.281,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 945.313.760.645,52 atau 90,55% dari target yang telah ditetapkan. Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2020 yang telah diterima di Kas Daerah terdiri dari:

No.	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020 (audited)		Realisasi 2019 (audited)
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	82.548.422.000,00	78.274.781.177,55	94,82	105.903.491.250,12
2	Pendapatan Transfer	942.468.720.281,00	846.824.505.760,00	89,85	874.822.346.811,00
3	Lain-Lain Pendapatan	18.896.600.000,00	20.214.473.707,97	106,97	0,00
J u m l a h		1.043.913.742.281,00	945.313.760.645,52	90,55	980.725.838.061,12

Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2019, maka realisasi Tahun Anggaran 2020 lebih rendah 3,61% atau Rp. 35.412.077.415,60.



Grafik VI.1. Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020

Berdasarkan grafik di atas, jelas terlihat bahwa Pemerintah Kota Ternate masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pendanaan dari Pemerintah Pusat untuk menjalankan urusan yang menjadi kewenangannya, dimana Pendapatan Transfer mencapai 89,59% dari total penerimaan Pendapatan Daerah.

VI.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah untuk Tahun Anggaran 2020 yang telah diterima oleh Kas Daerah terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020 (audited)		Realisasi 2019 (audited)
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	Pajak Daerah	46.130.000.000,00	49.802.378.454,00	107,96	57.996.842.888,00
2	Retribusi Daerah	24.283.500.000,00	16.077.017.079,00	66,21	18.048.954.310,75
3	Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	1.875.000.000,00	1.310.008.542,79	69,87	1.206.784.356,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	10.259.922.000,00	11.085.377.101,76	108,5	28.650.909.695,37
	J u m l a h	82.548.422.000,00	78.274.781.177,55	119,26	105.903.491.250,12

Berdasarkan rincian PAD di atas terlihat bahwa total target dari Pendapatan Asli Daerah telah mencapai target yang dari total Pendapatan Asli Daerah yang telah di anggarkan. Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD Tahun Anggaran 2019, maka terjadi penurunan sebesar Rp. 27.628.710.072,57 atau 26,09%. Adapun penerimaan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah dengan kontribusi sebesar 108,05%.

VI.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

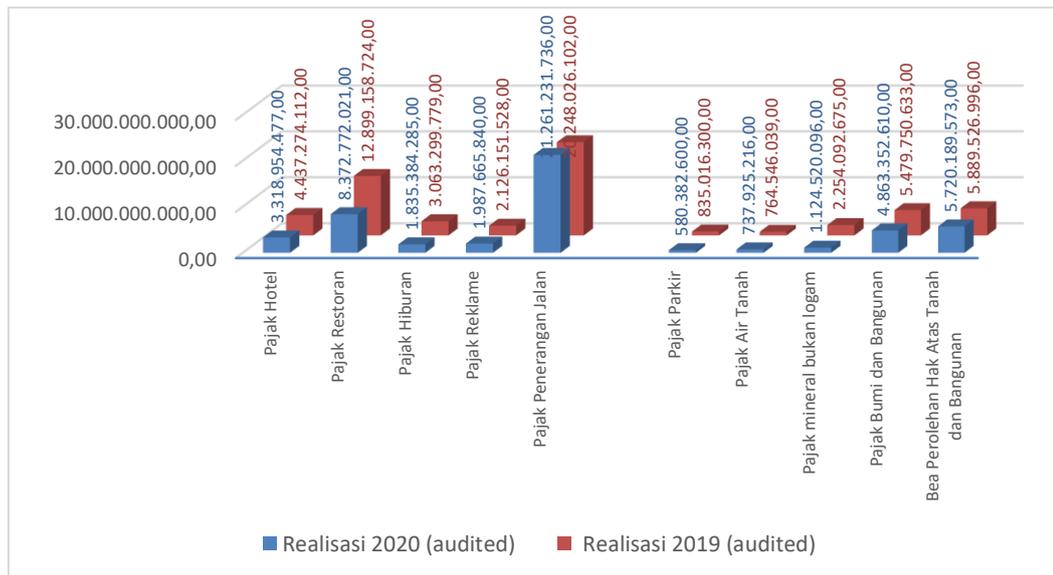
Pendapatan Pajak Daerah adalah akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari pajak daerah yang ditetapkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Adapun Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pemungutan pajak daerah dibagi berdasarkan kategori pajaknya, seperti :

No.	PERDA	Tentang	Organisasi Perangkat Daerah
1.	14 Tahun 2014	Pajak Hotel	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
2.	15 Tahun 2014	Pajak Restoran	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
3.	16 Tahun 2014	Pajak Hiburan	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
4.	17 Tahun 2014	Pajak Reklame	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
5.	18 Tahun 2014	Pajak Penerangan Jalan	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
6.	19 Tahun 2014	Pajak Mineral Bukan Logam	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
7.	20 Tahun 2014	Pajak Parkir	Dinas Perhubungan
8.	21 Tahun 2014	Pajak Air Tanah	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
9.	22 Tahun 2014	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
10.	5 Tahun 2013	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Jumlah Pajak Daerah yang dapat dipungut serta disetorkan ke Kas Daerah selama tahun anggaran 2020 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020 (audited)		Realisasi 2019 (audited)
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	Pajak Hotel	2.500.000.000,00	3.318.954.477,00	132,76	4.437.274.112,00
2	Pajak Restoran	7.000.000.000,00	8.372.772.021,00	119,61	12.899.158.724,00
3	Pajak Hiburan	1.625.000.000,00	1.835.384.285,00	112,95	3.063.299.779,00
4	Pajak Reklame	1.397.500.000,00	1.987.665.840,00	142,23	2.126.151.528,00
5	Pajak Penerangan Jalan	20.047.500.000,00	21.261.231.736,00	106,05	20.248.026.102,00
6	Pajak Parkir	340.000.000,00	580.382.600,00	170,70	835.016.300,00
7	Pajak Air Tanah	470.000.000,00	737.925.216,00	157,01	764.546.039,00
8	Pajak mineral bukan logam	1.350.000.000,00	1.124.520.096,00	83,30	2.254.092.675,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan	6.000.000.000,00	4.863.352.610,00	81,06	5.479.750.633,00
s10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	5.400.000.000,00	5.720.189.573,00	105,93	5.889.526.996,00
Jumlah		46.130.000.000,00	49.802.378.454,00	107,96	57.996.842.888,00

Berdasarkan rincian penerimaan Pajak Daerah di atas terlihat bahwa tidak seluruh akun Pajak melampaui target penerimaan yang ditetapkan, dengan persentase pelampauan target tertinggi pada realisasi penerimaan Pajak Parkir sebesar 170,70% atau melebihi target sebesar Rp. 240.382.600,00 dan apabila dilihat dari sisi nilai pelampauan target tertinggi maka kontribusi realisasi terbesar penerimaan Pajak Daerah untuk Tahun Anggaran 2020 adalah pada realisasi Pajak Restoran yaitu sebesar Rp. 8.372.772.021,00 atau sebesar 119,61% dari Anggaran Pajak Restoran.



Grafik VI.1.3. Perbandingan Realisasi Pajak Daerah TA 2019– 2020

(Dalam Jutaan Rupiah)

Berdasarkan grafik realisasi di atas terlihat bahwa, sebagian besar komponen Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2020 memiliki realisasi penerimaan yang lebih besar dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2019.

VI.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari retribusi daerah sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Adapun Peraturan Daerah serta Organisasi Perangkat Daerah Penanggung

No.	PERDA	Tentang	Uraian	Organisasi Perangkat Daerah
I Retribusi Jasa Umum				
1.	11 Tahun 2011	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	Pengambilan / Pengumpulan Sampah dari Sumbernya ke Lokasi Pembuangan Sementara	Dinas Lingkungan Hidup
2.	3 Tahun 2011	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Dinas Perhubungan
3.	10 Tahun 2010	Retribusi Pelayanan Pasar	Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.	14 tahun 2011	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Retribusi PKB Mobil Bus Bus	Dinas Perhubungan
5.	24 Tahun 2014	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	Dinas Kebakaran
6.	11 Tahun 2010	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7.	23 Tahun 2018	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
II Retribusi Jasa Usaha				
1.	22 Tahun 2018	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Penyewaan Tanah dan Bangunan	1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan 3. Dinas Pemuda dan Olahraga 4. Dinas Kelautan dan Perikanan 5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) 6. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah 7. Dinas Pariwisata 8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	6 Tahun 2016	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	Pelelangan Ikan	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.	9 Tahun 2010	Retribusi Terminal	Tempat Kegiatan Usaha	Dinas Perhubungan
4.	7 Tahun 2016	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Pelayanan Tempat Khusus Parkir	Dinas Perhubungan
5.	4 Tahun 2018	Retribusi Rumah Potong Hewan	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong	Dinas Pertanian
6.	13 Tahun 2011	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan	Dinas Perhubungan
7.	26 Tahun 2014	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Pelayanan Tempat Rekreasi	Dinas Pariwisata
III Retribusi Perijinan Tertentu				
1.	2 Tahun 2018	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Pemberian Izin Untuk Mendirikan Suatu Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	14 Tahun 2011	Retribusi Izin Trayek	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	Dinas Perhubungan
3.	25 tahun 2014	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	Dinas Tenaga Kerja

Jawab Retribusi Daerah tersebut adalah :

Jumlah Retribusi Daerah yang dapat dipungut serta telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun anggaran 2020 dan 2019 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020 (audited)		Realisasi 2019 (audited)
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
I	Retribusi Jasa Umum	14.691.250.000,00	11.575.204.829,00	78,79	12.985.887.090,00
1	Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari Sumbernya ke Lokasi Pembuangan Sementara	2.331.250.000,00	2.386.031.500,00	102,35	3.255.529.000,00
2	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.525.000.000,00	638.700.000,00	41,88	775.200.000,00
3	Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang	9.060.000.000,00	7.774.982.829,00	85,82	7.459.248.090,00
4	Retribusi PKB Mobil Bus Bus	200.000.000,00	0	0,00	300.850.000,00
5	Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	1.125.000.000,00	712.540.000,00	63,34	1.105.440.000,00
6	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	75.000.000,00	8.100.000,00	10,80	19.200.000,00
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	375.000.000,00	54.850.500,00	14,63	70.420.000,00
II	Retribusi Jasa Usaha	6.927.250.000,00	2.189.939.288,00	31,61	3.274.859.088,00
1	Penyewaan Tanah dan Bangunan	5.170.000.000,00	1.017.006.088,00	19,67	1.758.552.188,00
2	Pelelangan Ikan	75.000.000,00	155.025.100,00	206,70	7.700.000,00
3	Tempat Kegiatan Usaha	550.000.000,00	166.430.000,00	30,26	347.176.000,00
4	Pelayanan Tempat Khusus Parkir	425.000.000,00	369.000.000,00	86,82	622.600.000,00
5	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong	107.250.000,00	129.002.000,00	120,28	168.487.000,00
6	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan	175.000.000,00	162.165.100,00	92,67	146.361.900,00
7	Pelayanan Tempat Rekreasi	425.000.000,00	191.311.000,00	45,01	223.982.000,00
III	Retribusi Perijinan Tertentu	2.665.000.000,00	2.311.872.962,00	86,75	1.788.208.132,75
1	Pemberian Izin Untuk Mendirikan Suatu Bangunan	2.515.000.000,00	2.307.681.962,00	91,76	1.749.798.132,75
2	Retribusi Izin Gangguan	0	0	0	-
3	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	150.000.000,00	4.191.000,00	2,79	20.410.000,00
4	Retribusi Izin Perikanan	0	0	0	-
5	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	0	0	0	18.000.000,00
Jumlah		24.283.500.000,00	16.077.017.079,00	66,21	18.048.954.310,75

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dari 19 jenis retribusi yang dikelola pada Tahun Anggaran 2020 dan secara keseluruhan total penerimaan retribusi hanya mencapai 66,21%, dari target yang ditentukan dan untuk tahun 2020 SKPD pengelola Retribusi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No.	Jenis Retribusi	SKPD Pengelola	Realisasi 2020 (audited)	Realisasi 2019 (audited)
			(Rp)	(Rp)
1.	Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari Sumbernya ke Lokasi Pembuangan Sementara	Dinas Lingkungan Hidup	2.386.031.500,00	3.255.529.000,00
2.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Dinas Perhubungan	638.700.000,00	775.200.000,00
3.	Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.774.982.829,00	7.459.248.090,00
4.	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus	Dinas Perhubungan	0,00	300.850.000,00
5.	Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	Dinas Kebakaran	712.540.000,00	1.105.440.000,00
6.	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.100.000,00	19.200.000,00
7.	Retribusi Pelayanan Tera Ulang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	54.850.500,00	70.420.000,00
8.	Penyewaan Tanah dan Bangunan	1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan 3. Dinas Pemuda dan Olah Raga 4. Dinas Kelautan dan Perikanan 5. PPKD 6. BP2RD 7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 8. Dinas Perhubungan 9. Dinas Pariwisata	1.017.006.088,00	1.758.552.188,00
9.	Pelelangan Ikan	Dinas Kelautan dan Perikanan	155.025.100,00	7.700.000,00
10.	Tempat Kegiatan Usaha	Dinas Perhubungan	166.430.000,00	347.176.000,00
11.	Pelayanan Tempat Khusus Parkir	Dinas Perhubungan	369.000.000,00	622.600.000,00
12.	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum	Dinas Pertanian	129.002.000,00	168.487.000,00
13.	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan	Dinas Perhubungan	162.165.100,00	146.361.900,00
14.	Pelayanan Tempat Rekreasi	Dinas Pariwisata	191.311.000,00	223.982.000,00
15.	Pemberian Izin Untuk Mendirikan Suatu Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.307.681.962,00	1.749.798.132,75
16.	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	Dinas Perhubungan	4.191.000,00	20.410.000,00
17.	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	0,00	18.000.000,00
Jumlah			16.077.017.079,00	18.048.954.310,75

VI.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari deviden/bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga, untuk tahun anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp1.875.000.000,00 dan realisasinya adalah Rp.1.310.008.542,79 atau 69,87% sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

No	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020 (audited)		Realisasi 2019 (audited)
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	1.875.000.000,00	1.310.008.542,79	69,87	1.206.784.356,00

VI.1.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Lain-lain PAD yang sah merupakan pendapatan dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin kecuali Jasa giro dan Bunga Deposito. Adapun rincian anggaran dan realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2020 dan 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020 (audited)		Realisasi 2019 (audited)
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	Hasil Penjualan Peralatan/Mesin	0,00	708.115.000,00	0,00	398.638.889,00
2	Jasa Giro Kas Daerah LRA	0,00	162.108.129,29	0,00	46.125.339,35
	Jasa Giro Bendahara	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3	Penerimaan Bunga Deposito	0,00	14.221.000,00	0,00	1.983.979.763,25
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum	0,00	43.331.080,00	0,00	604.838.362,57
5	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	27.946.767,00	0,00	0,00
6	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	24.097.916,00	0,00	0,00
7	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	3.614.368,00	0,00	0,00
8	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0,00	738.368,00	0,00	0,00
9	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	0,00	126.334,00	0,00	0,00
10	Pendapatan Denda Retribusi	0,00	1.022.387,00	0,00	0,00
11	Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21	0,00	1.781.721,00	0,00	20.188.533,00
12	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	273.118.836,00	0,00	6.960.000,00
13	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	998.018.764,95	0,00	0,00
14	Pendapatan BLUD	0,00	1.272.400.643,00	0,00	0,00

15	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	3.879.922.000,00	4.616.736.141,43	137,14	3.246.811.779,09
16	Pendapatan Dana Kapitasi JKN-LRA	6.000.000.000,00	2.814.974.819,09	46,22	3.858.332.533,62
17	Pendapatan Non Kapitasi	380.000.000,00	123.024.827,00	32,37	301.810.000,00
18	Pendapatan Dana Bos	0,00	0,00	0,00	18.183.199.495,49
JUMLAH		10.259.922.000,00	11.085.377.101,76	108,05	28.650.909.695,37

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Tahun Anggaran 2020 dari anggaran sebesar Rp10.259.922.000,00 dan ternyata realisasinya adalah sebesar Rp11.085.377.101,76 atau 108,05%, Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 17.565.532.593,61 atau 61,31% dari Anggaran Tahun 2019 yang sebesar Rp. 28.650.909.695,37. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan pada beberapa jenis penerimaan diantaranya Jasa Giro, Pendapatan dari Pengembalian, Penerimaan Lain-lain PAD yang sah, Pendapatan Dana Kapitasi JKN-LRA dan adapun terjadi penurunan dikarenakan perubahan alokasi penganggaran Pendapatan Dana BOS. Pendapatan juga diterima dari Pendapatan Denda Pajak dan Pendapatan dari Denda Retribusi.

Rincian Pendapatan Dana Kapitasi JKN per puskesmas Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut.

No.	Nama FKTP	Anggaran Pendapatan TA 2020	Pendapatan TA 2020	Pendapatan TA 2019
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Puskesmas Jambula	445.380.000,00	265.039.700,00	277.878.535,94
2.	Puskesmas Gambesi	505.660.000,00	271.357.103,31	232.738.082,02
3.	Puskesmas Kalumata	1.046.920.000,00	833.980.939,32	824.276.126,04
4.	Puskesmas Kalumpang	586.540.000,00	438.419.703,02	458.844.652,00
5.	Puskesmas Kota	590.540.000,00	426.010.800,00	405.205.563,15
6.	Puskesmas Sulamadaha	537.300.000,00	329.113.700,00	284.552.136,09
7.	Puskesmas Siko	1.265.392.000,00	757.281.524,80	829.772.992,18
8.	Puskesmas Mayau	286.308.000,00	166.207.068,13	170.758.219,89
9.	Puskesmas Hiri	316.580.000,00	187.477.453,64	187.711.608,09
10.	Puskesmas Moti	419.380.000,00	344.869.454,87	186.594.617,68
JUMLAH		6.000.000.000,00	4.019.757.447,09	3.858.332.533,08

Rincian Pendapatan Dana BOS per sekolah Tahun 2020 dan 2019 dapat dilihat pada Lampiran 1.

VI.1.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan akun untuk menampung penerimaan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan dan transfer dana lainnya, dan transfer dari Pemerintah Propinsi, serta Bantuan Keuangan. Untuk Tahun Anggaran 2020 Pendapatan Transfer yang telah diterima oleh Pemerintah Kota Ternate melalui Kas Daerah terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020 (audited)		Realisasi 2019 (audited)
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	758.495.108.281,00	753.906.203.283,00	99,39	797.014.845.832,00
2	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	64.961.612.000,00	65.584.074.000,00	100,96	44.225.740.000,00
3	Transfer Pemerintah Provinsi	119.012.000.000,00	27.334.228.477,00	22,97	33.581.760.979,00
JUMLAH		942.468.720.281,00	846.824.505.760,00	89,85	874.822.346.811,00

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada Tahun 2020 realisasi Pendapatan Transfer mencapai nilai sebesar Rp. 846.824.505.760,00 atau 89,85% dari target yang dianggarkan sebesar Rp. 942.468.720.281,00 dan jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2019, maka di Tahun Anggaran 2020 terjadi penurunan sebesar Rp. 27.997.841.051,00 atau 3,31%.

VI.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan

Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari bagi hasil Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan, untuk tahun anggaran 2020 dan 2019 realisasi penerimaan akun ini terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020 (audited)		Realisasi 2019 (audited)
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	Bagi Hasil Pajak – LRA	21.822.651.049,00	17.998.507.800,00	82,48	12.255.786.432,00
	Bagi Hasil Dari Pajak Bumi & Bangunan Sektor Pertambangan – LRA	5.411.053.068,00	4.644.850.724,00	85,84	5.290.741.689,00
	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 ; Pasal 29 ; dan PPh Pasal 21 – LRA	16.411.597.981,00	13.353.657.076,00	81,37	6.965.044.743,00
2	Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LRA	23.404.087.232,00	25.322.364.016,00	108,20	8.763.514.762,00
	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan - LRA	0,00	517.452.237,00	0,00	0
	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LRA	581.367.000,00	0,00	0,00	9.075.200,00
	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) – LRA	0,00	0,00	0,00	8.141.595.762,00
	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi & Iuran Eksploitasi (Royalti) – LRA	0,00	2.010.081.850,00	0,00	590.155.800,00
	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LRA	1.647.661.150,00	788.276.289,00	47,84	22.688.000,00
	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LRA	1.394.353.609,00	7.904.609,00	0,57	0,00
	Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - LRA	80.677.020,00	48.785.045,00	60,47	0,00
	Bagi Hasil Pertambangan umum	19.700.028.453,00	21.949.863.986,00	111,42	0,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	602.070.200.000,00	599.701.700.000,00	99,61	653.094.117.000,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	111.198.170.000,00	110.883.631.467,00	100,66	122.901.427.638,00
JUMLAH		758.495.108.281,00	753.906.203.283,00	99,39	797.014.845.832,00

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi penerimaan yang berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan sebesar Rp. 753.906.203.283,00 atau 99,39%. Realisasi tertinggi dihasilkan dari Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA yaitu sebesar Rp. 599.701.700.000,00 atau mencapai 99,61%. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pada Tahun Anggaran 2019, maka terjadi Penurunan sebesar Rp. 43.108.642.549,00 atau 5,41%.

Untuk Dana Alolasi Khusus di Tahun 2020 di bagi menjadi 2 Bagian yaitu DAK Fisik dan Dak Non Fisik, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020 (audited)		Realisasi 2019 (audited)
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	DAK Bidang Infrastruktur Jalan - LRA	11.507.003.000,00	8.319.060.250,00	72,30	14.154.723.000,00
2	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DAK Bidang Bidang Infrastruktur Air Minum – LRA	0,00	1.795.500.750,00	0,00	2.230.431.300,00
4	DAK Bidang Bidang Infrastruktur Sanitasi – LRA	4.261.054.000,00	4.261.054.000,00	100,00	2.540.726.000,00
5	DAK Bidang Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman – LRA	2.851.745.000,00	712.936.250,00	25,00	4.223.172.000,00
6	DAK Bidang Kesehatan – LRA	0,00	16.622.985.248,00	0,00	13.770.294.761,00
7	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan – LRA	2.578.833.000,00	859.581.000,00	33,33	2.978.122.520,00
8	DAK Bidang Prasarana Pemerintahan - LRA	0,00	2.138.808.750,00	0,00	0,00
9	DAK Bidang Perdagangan – LRA	0,00	0,00	0,00	3.080.545.180,00
10	DAK Bidang Pertanian – LRA	0,00	0,00	0,00	2.311.148.850,00
11	DAK Bidang Pendidikan – LRA	0,00	11.481.904.010,00	0,00	15.603.268.050,00
12	DAK Bidang Pariwisata	2.109.786.000,00	0,00	0,00	3.423.135.692,00
13	DAK Infrastruktur Publik daerah	0,00	0,00	0,00	2.065.394.250,00
14	DAK Bidang Industri Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	990.651.800,00
Jumlah DAK Fisik		23.308.421.000,00	46.191.830.258,00	198,18	67.371.613.403,00
15	Peningkatan Kapasitas Koperasi UKM	0,00	417.358.000,00	0,00	0,00
16	DAK Bidang Industri Kecil dan Menengah	352.040.000,00	352.040.000,00	100,00	0,00
17	DAK Bidang Kesehatan (Penurunan Stunting)	400.387.000,00	0,00	0,00	0,00
18	DAK Bidang Kesehatan (Pengendalian Penyakit)	2.572.270.000,00	0,00	0,00	0,00
19	DAK Bidang Pendidikan (SD)	5.089.981.000,00	0,00	0,00	0,00
20	DAK Bidang Pendidikan (SMP)	3.788.882.000,00	0,00	0,00	0,00
21	DAK Bidang Pendidikan (SKB)	1.085.691.000,00	0,00	0,00	0,00
22	DAK Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Dasar)	11.063.021.000,00	0,00	0,00	0,00
23	DAK Bidang Kesehatan (Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan)	1.180.315.000,00	0,00	0,00	0,00
24	DAK Bidang Kesehatan (KB)	1.452.464.000,00	0,00	0,00	0,00
25	DAK Non Fisik (DAK) - TPG PNSD	40.654.003.000,00	40.654.003.000,00	100,00	39.853.699.210,00
26	DAK Non Fisik (DAK) - Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.131.750.000,00	509.288.000,00	45,00	1.308.000.000,00
27	DAK Non Fisik (DAK) - BO Penyelenggaraan PAUD	2.580.000.000,00	3.039.100.000,00	117,79	1.956.600.000,00
28	DAK Non Fisik (DAK) - Bantuan Operasional Kesehatan	8.782.004.000,00	11.595.775.460,00	132,04	8.210.794.075,00
29	Akreditasi Puskesmas	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
30	Jaminan Persalinan	1.628.329.000,00	0,00	0,00	0,00
31	DAK Non Fisik (DAK) - Bantuan Operasional Keluarga Berencana	2.244.287.000,00	2.922.959.000,00	130,24	2.129.504.950,00
32	DAK Non Fisik (DAK) - Dana Pelayanan Adimintrasi Kependudukan	967.738.000,00	914.923.269,00	94,54	1.106.580.000,00
33	DAK Pelayanan Kepariwisataaan	344.050.000,00	2.958.029.000,00	859,77	521.736.000,00
34	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1.028.200.000,00	1.328.325.480,00	129,19	442.900.000,00
35	DAK Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	327.600.000,00	0,00	0,00	0,00
36	Pengawasan Obat dan Makanan	247.615.000,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020 (audited)		Realisasi 2019 (audited)
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
37	Dana Operasional Kapasitas Koperasi & UKM	417.358.000,00	0,00	0,00	0,00
38	DAK Bidang Sosial	51.764.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah DAK Non Fisik		87.889.749.000,00	64.691.801.209,00	74,49	55.529.814.235,00
Total DAK		111.198.170.000,00	110.883.631.467,00	100,66	122.901.427.638,00

VI.1.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Akun Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari Dana Penyesuaian yang terdiri dari dana tambahan Penghasilan Guru PNSD dan Dana Insentif Daerah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020 (audited)		Realisasi 2019 (audited)
		2020 (Rp)	2020 (Rp)	%	(Rp)
1	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LRA	0,00	622.462.000,00	0,00	0,00
2	Dana Insentif Daerah - LRA	64.961.612.000,00	64.961.612.000,00	100,96	44.225.740.000,00
JUMLAH		64.961.612.000,00	65.584.074.000,00	100,96	44.225.740.000,00

Dana Insentif Daerah yaitu dana yang diberikan Oleh Pemerintah Pusat dengan kriteria utama adalah Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun lalu dan bisa menetapkan Perda APBD tepat waktu.

Dari tabel di atas, terlihat bahwa realisasi penerimaan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya untuk pada Tahun 2020 seluruhnya berasal dari komponen Dana Penyesuaian yaitu Dana Insentif Daerah yang apabila dibandingkan dengan total realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2019 mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp. 21.358.334.000,00 atau 32,57%.

VI.1.1.2.3. Transfer Pemerintah Provinsi

Akun Transfer bagi hasil pajak dan bagi hasil lainnya Provinsi adalah yang dibagikan ke Kabupaten/Kota sesuai dengan kontribusi yang diberikan oleh masing-masing daerah, dan untuk Tahun 2019 dana bagi hasil sepenuhnya berasal dari bagi hasil pajak dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020 (audited)		Realisasi 2019 (audited)
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	36.500.000.000,00	6.003.010871,00	16,45	12.506.896.963,00
2	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	19.162.000.000,00	5.243.927.517,00	27,37	5.750.156.853,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	42.000.000.000,00	8.924.663.359,00	21,25	8.546.758.540,00
4	Pajak pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	14.350.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Bagi Hasil Propinsi (Pajak Rokok)	7.000.000.000,00	7.162.626.730,00	102,32	6.777.948.623,00
Jumlah		119.012.000.000,00	27.334.228.477,00	22,97	33.581.760.979,00

Tabel rincian di atas memperlihatkan bahwa secara keseluruhan realisasi penerimaan untuk akun ini sebesar Rp. 27.334.228.477,00 atau 22,97% sehingga tidak dapat mencapai target penerimaan dari yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pada Tahun Anggaran 2019, maka terjadi Penurunan sebesar Rp. 6.247.532.502,00 atau (22,86%).

VI.1.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah Penerimaan daerah yang bukan bersumber dari PAD dan Dana Transfer, merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya. Pada Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kota Ternate tidak menerima Lain-lain Pendapatan yang Sah dari Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat.

VI.1.1.3.1. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah daerah dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi pemerintah daerah.

No	Uraian	Anggaran	Realisasi (audited)		Realisasi 2019 (audited) (Rp)
		2020 (Rp)	2020 (Rp)	%	
1.	Pendapatan Hibah	18.896.600.000,00	20.214.473.707,97	106,97	0,00

Pendapatan Hibah Kota Ternate untuk Tahun 2020 adalah Rp20.214.473.707,97 yang merupakan reklasifikasi dari pendapatan dana bos tahun 2020.

VI.1.2. BELANJA

Sebagai penerapan dari kebijakan belanja daerah, maka pada Tahun Anggaran 2020 akun Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp. 1.044.728.905.814,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 943.351.349.388,26 atau 90,30%, sehingga terdapat sisa anggaran belanja daerah sebesar Rp. 101.377.556.425,74 (9,70%). Rincian mengenai alokasi Belanja Daerah dan realisasi pengeluaran yang telah dilakukan baik melalui Kas Daerah maupun Bendahara Pengeluaran SKPD adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020 (audited)		Realisasi 2019 (audited)
			(Rp)	%	(Rp)
1	Belanja Operasional	784.671.795.578,00	718.788.379.789,26	91,60	740.775.272.170,13
2	Belanja Modal	220.057.110.236,00	188.517.945.361,00	85,67	227.983.098.820,75
3	Belanja Tak Terduga	40.000.000.000,00	36.045.024.238,00	90,11	4.949.851.000,00
JUMLAH		1.044.728.905.814,00	943.351.349.388,26	90,30	973.708.221.990,88

Berdasarkan tabel realisasi di atas, terlihat bahwa realisasi belanja baik Belanja Operasi, Belanja Modal maupun Belanja Tak Terduga seluruhnya berada di bawah alokasi anggaran yang disediakan dengan realisasi terendah pada akun Belanja Modal yaitu sebesar 85,67%.

VI.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pos pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Kota Ternate yang memberi manfaat jangka pendek. Pos Belanja Operasi terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020 (audited)		Realisasi 2019 (audited)
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	Belanja Pegawai	407.110.329.060,00	399.268.221.088,00	98,07	374.039.975.403,00
2	Belanja Barang dan Jasa	316.026.635.518,00	260.888.108.201,26	82,55	335.021.558.747,13
4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Hibah	59.497.831.000,00	56.616.300.500,00	95,16	19.829.980.000,00
5	Belanja Bantuan Sosial	2.037.000.000,00	2.015.750.000,00	98,96	11.883.758.020,00
6	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
J u m l a h		784.671.795.578,00	718.788.379.789,26	91,60	740.775.272.170,13

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi pengeluaran Tahun Anggaran 2020 untuk Belanja Operasi adalah sebesar Rp. 718.788.379.789,26 atau (91,60%) dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 784.671.795.578,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp. 65.883.415.788,74 atau (8,40%). Apabila dibandingkan dengan realisasi pengeluaran pada pos Belanja Operasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 740.775.272.170,13 maka terjadi penurunan realisasi belanja sebesar Rp. 21.986.892.380,87 atau (3,06%). Berikut penjelasan ringkas mengenai realisasi Belanja Operasi Tahun 2020.

VI.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah daerah. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 399.268.221.088,00 atau 98,07% dengan sisa anggaran belanja sebesar Rp. 7.842.107.972,00 atau 1,93%, realisasi anggaran 2020 di tunjukan seperti pada tabel di bawah ini:

No.	Objek Belanja Pegawai	Anggaran 2020	Realisasi 2020 (audited)		Realisasi 2019 (audited)
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	335.559.775.313,00	334.936.232.530,00	99,81	339.193.195.814,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	62.799.464.947,00	56.521.674.741,00	90,00	25.840.618.297,00
3	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	5.212.368.800,00	5.141.938.942,00	98,65	5.192.943.792,00
4	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.253.925.000,00	1.623.675.000,00	72,04	2.530.250.000,00
5	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	616.925.000,00	486.614.375,00	78,88	703.875.000,00
6	Belanja Uang Lembur	667.870.000,00	558.085.500,00	83,56	579.092.500,00
J u m l a h		407.110.329.060,00	399.268.221.088,00	98,07	374.039.975.403,00

- a. Realisasi belanja pegawai yang tidak terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan (belanja tidak langsung) sebesar Rp. 398.710.135.588,00 diantaranya diperuntukkan bagi pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan CPNS (termasuk guru), gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, dan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Pembayaran belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan (belanja langsung) sebesar Rp. 558.085.500,00 diantaranya dalam bentuk uang lembur PNS dan uang lembur non PNS.

VI.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

Belanja Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2020 direalisasikan sebesar Rp. 260.888.108.201,26 atau 82,55% dari anggaran yang telah ditetapkan dengan sisa anggaran sebesar Rp. 55.138.527.316,74 atau 16,46%. Realisasi pos belanja ini terutama digunakan untuk memenuhi kebutuhan alat tulis kantor, kebutuhan barang cetakan, pembayaran tagihan air, listrik, dan telepon, penyediaan bibit tanaman dan ternak, persediaan obat, penyediaan bahan material untuk pemeliharaan bangunan dan gedung, serta jaringan irigasi, biaya perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah. Pengeluaran belanja barang ini melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap SKPD. Belanja Barang ini terdiri dari:

No.	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020 (audited)		Realisasi 2019 (audited)
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	14.992.625.294,00	12.941.247.053,00	86,32	14.606.862.217,00
2	Belanja Bahan/Material	16.526.224.765,00	12.901.279.619,00	78,07	15.130.993.644,00
3	Belanja Jasa Kantor	25.358.002.376,00	19.423.028.550,00	76,60	25.991.753.708,00
4	Belanja Premi Asuransi	8.315.768.074,00	4.870.266.701,00	58,57	3.281.827.159,00
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.915.923.279,00	7.963.078.041,00	80,31	8.620.944.732,00
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.579.423.343,00	5.219.586.133,00	79,33	8.436.629.776,00
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.207.122.287,00	2.021.540.420,00	91,59	3.194.489.943,00
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	911.139.000,00	583.228.000,00	64,01	1.100.644.400,00
9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.615.691.000,00	634.208.273,00	39,25	1.457.602.000,00
10	Belanja Makanan dan Minuman	17.362.673.240,00	11.311.873.784,00	65,15	23.742.498.516,00
11	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	816.270.900,00	617.679.500,00	75,67	1.517.184.600,00
12	Belanja Pakaian Kerja	209.986.150,00	181.894.575,00	86,62	613.816.000,00
13	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	396.180.000,00	298.680.000,00	75,39	616.459.950,00

No.	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020 (audited)		Realisasi 2019 (audited)
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
14	Belanja Perjalanan Dinas	48.687.659.717,00	38.103.141.705,00	78,26	69.112.782.603,00
15	Belanja Pemeliharaan	5.391.642.955,00	3.833.535.443,00	71,10	8.952.899.659,00
16	Belanja Jasa Konsultansi	1.457.550.000,00	1.028.137.050,00	70,54	533.351.900,00
17	Belanja Barag Untuk Diserahkan kpd Masyarakat/Pihak Ketiga	30.980.678.407,00	28.307.188.607,91	91,37	22.770.702.152,00
18	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.252.300.000,00	1.038.465.000,00	82,92	680.000.000,00
19	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi & Bimbingan Teknis PNS	1.037.332.900,00	958.440.000,00	92,39	3.873.179.811,00
20	Belanja Honorarium Non Pegawai	19.600.000,00	10.000.000,00	51,02	279.835.250,00
21	Belanja Honorarium PNS	20.870.945.100,00	15.048.644.556,00	72,10	33.830.984.612,00
22	Belanja Honorarium Non PNS	77.113.028.000,00	68.893.617.000,00	89,34	63.966.750.917,00
23	Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS	3.533.287.126,00	3.493.602.809,00	98,88	3.743.227.070,00
24	Belanja Barang Dana BOS	10.129.983.870,00	12.994.560.082,00	128,28	14.644.735.256,53
25	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	6.350.000.000,00	5.065.875.899,35	79,78	3.733.017.422,60
26	Belanja Modal yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi	495.579.335,00	401.700.000,00	81,06	588.385.450,00
27	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/ Instruktur/Moderator	3.500.018.400,00	2.743.609.400,00	78,39	0,00
	Jumlah	316.026.635.518,00	260.888.108.201,26	82,55	335.021.558.747,13

VI.1.2.1.3. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi merupakan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2020 tidak dianggarkan dan tidak ada realisasinya.

VI.1.2.1.4. Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus.

Pos Belanja Hibah Pemerintah Daerah Kota Ternate pada Tahun Anggaran 2020 dialokasikan sebesar Rp. 59.497.831.000,00 dan pada akhir tahun 2020 direalisasikan sebesar Rp. 56.616.300.500,00 atau 95,16% yang terdiri atas belanja hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp. 52.608.550.500,00 dan belanja Hibah Dana Bos sebesar Rp. 4.007.750.000,00 dengan rincian belanja hibah sebagai berikut :

a. Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan

No	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020 (audited)		Realisasi 2019 (audited)
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	PKK Kota Ternate	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
2	Dharma Wanita Kota Ternate	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	600.000.000,00
3	Pramuka	200.000.000,00	100.000.000,00	50,00	550.000.000,00
4	KORPRI	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	800.000.000,00
5	KONI Kota Ternate	1.200.000.000,00	1.100.000.000,00	91,67	4.500.000.000,00
6	PMI	500.000.000,00	300.000.000,00	60,00	300.000.000,00
7	Komisi Penanggulangan AIDS	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	350.000.000,00
8	Badan Amil Zakat (BAZDA)	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	1.402.400.000,00
9	Dewan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
10	PGRI	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
11	MUI	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00
12	TNI	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	0,00
13	Mesjid Agung Al-Munawwar	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
14	POLRES (Pengamanan)	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	100,00	0,00
15	KNPI	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
16	Persatuan Wiredatama RI	0,00	0,00	0,00	0,00
17	GOW	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
18	ICMI	0,00	0,00	0,00	0,00
19	KPU	26.050.000.000,00	26.050.000.000,00	100,00	2.750.000.000,00
20	BAWASLU Kota Ternate	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
21	Bantuan Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	2.600.000.000,00	2.515.000.000,00	96,73	0,00
22	Hibah Kepada Perhotelan 28 Hotel	1.969.388.784,00	900.370.110,00	45,72	0,00
23	Hibah Kepada Restoran 23 Restoran	1.617.712.216,00	893.180.390,00	55,21	0,00
Jumlah		55.187.101.000,00	52.608.550.500,00	95,33	13.902.400.000,00

b. Belanja Hibah Dana Bos

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020 (audited)	%	Realisasi 2019 (audited)
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Dana BOS Ke SD Swasta	935.775.000,00	832.870.000,00	89,00	1.257.300.000,00
3	Dana BOS Ke SMP Swasta	1.340.640.000,00	1.193.000.000,00	88,99	2.423.340.000,00
5	BOSDA Madrasah Ibtidayah	235.530.000,00	209.360.000,00	88,89	280.560.000,00
4	BOSDA Madrasah Tsanawiyah	236.385.000,00	210.120.000,00	88,89	309.780.000,00
5	BOP PAUD	1.562.400.000,00	1.562.400.000,00	100,00	1.656.600.000,00
Jumlah		4.310.730.000,00	4.007.750.000,00	92,97	5.927.580.000,00

VI.1.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan Sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.

Belanja Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2020 dialokasikan sebesar Rp. 2.037.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 2.015.750.000,00 atau 98,96%. Realisasi pos belanja ini diperuntukkan untuk Organisasi Sosial kepada Masyarakat. Realisasi tersebut menurun sebesar Rp. 9.868.008.020,00 (83,04%) dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 11.883.758.020,00. Rincian Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020 (audited)		Realisasi 2019 (audited)
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1.	Bantuan Sosial untuk Organisasi Sosial kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	9.316.186.500,00
2.	Bantuan Sosial kepada Masyarakat	2.037.000.000,00	2.015.750.000,00	98,96	2.567.571.520,00
Jumlah		2.037.000.000,00	2.015.750.000,00	98,96	11.883.758.020,00

VI.1.2.1.6. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Belanja Bantuan Keuangan seluruhnya merupakan Bantuan kepada Partai Politik (Banparpol), untuk Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan direalisasikan Rp0,00. Realisasi tersebut turun sama dengan realisasi Tahun Anggaran 2019.

Anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebenarnya disajikan dengan klasifikasi sebagai Transfer mengikuti Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Sementara untuk realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 813.109.720,00 tetap disajikan sesuai laporan keuangan audited Tahun 2019.

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2020 yang disajikan sebagai Transfer tersebut adalah sebesar Rp. 813.109.800,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 686.743.920,00 atau 84,46%. Rincian penjelasan Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2020 dan 2019 disajikan pada penjelasan akun Transfer.

VI.1.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Anggaran dan realisasi belanja modal Pemerintah Kota Ternate adalah pada Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020 (audited)		Realisasi 2019 (audited)
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	Belanja Modal Tanah	6.652.962.340,00	6.149.586.820,00	92,43	13.410.478.426,72
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.654.934.174,00	17.076.909.415,00	66,56	33.844.534.175,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	67.978.256.611,00	59.390.064.040,00	87,37	77.852.294.958,81
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	115.823.505.111,00	103.748.096.799,00	89,57	98.142.571.908,22
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.947.452.000,00	2.153.288.287,00	54,55	4.733.219.352,00
J u m l a h		220.057.110.236,00	188.517.945.361,00	85,67	227.983.098.820,75

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada Tahun Anggaran 2020 Belanja Modal mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 220.057.110.236,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 188.517.945.361,00 atau 85,67%. Realisasi Belanja Modal ini dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh OPD selama tahun anggaran 2020.

Terdapat perbedaan antara jumlah realisasi Belanja Modal dengan jumlah penambahan aset tetap dan aset lainnya hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2020, hal ini disebabkan karena tidak seluruh realisasi Belanja Modal menghasilkan aset tetap dan aset lainnya, karena apabila terdapat anggaran dengan kode rekening Belanja Modal namun setelah dihitung perjenis satuan barangnya tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap dan tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap dan aset lainnya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Ternate Nomor 15 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi, maka barang yang diperoleh akan di kelompokkan dalam barang inventaris.

Berikut disajikan grafik mengenai proporsi realisasi masing-masing pos Belanja Modal untuk Tahun Anggaran 2020.

Grafik VI.2.2 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2020



Rincian masing-masing belanja modal dijelaskan sebagai berikut:

VI.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah berdasarkan definisi PP Nomor 71 Tahun 2010 adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan samoa tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai. Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp. 6.652.962.340,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 6.149.586.820,00 atau 92,43%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp. 7.260.891.606,72 atau 54,14% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 13.410.478.426,72.

Dari realisasi Belanja Modal Tanah tersebut diatas yang menjadi aset dari pemerintah kota Ternate adalah sebesar Rp. 3.086.400.000,00 dan yang tidak menjadi asset dari Pemerintah Daerah Kota Ternate adalah sebesar Rp. 3.063.186.820,00.

Rincian Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2020 dan 2019 terdiri dari:

No.	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020 (audited)		Realisasi 2019 (audited)
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1.	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	3.178.041.820,00	2.886.936.820,00	90,84	1.077.519.081,00
2.	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kosong	3.298.670.520,00	3.086.400.000,00	93,56	11.977.010.000,00
3.	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Pengairan	0,00	0,00	0,00	355.949.345,72
4.	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	86.000.000,00	86.000.000,00	100,00	0,00
5.	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Olah Raga	90.250.000,00	90.250.000,00	100,00	0,00
Jumlah		6.652.962.340,00	6.149.586.820,00	92,43	13.410.478.426,72

Rincian Belanja Modal Tanah per OPD adalah sebagai berikut:

No.	OPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020 (audited)		Realisasi 2019 (audited)
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1.	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3.298.670.520,00	3.086.400.000,00	93,56	11.977.010.000,00
2.	Dinas Pariwisata	600.000.000,00	593.335.000,00	98,89	0,00
3.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	302.040.000,00	17.600.000,00	5,83	0,00
4.	Kecamatan Ternate Utara	282.795.000,00	282.795.000,00	100,00	55.000.000,00
5.	Kecamatan Ternate Tengah	97.408.370,00	12.754.000,00	13,09	159.807.301,00
6.	Kecamatan Ternate Selatan	423.158.450,00	423.158.450,00	100,00	0,00
7.	Kecamatan Pulau Ternate	172.352.000,00	172.352.000,00	100,00	0,00
8.	Kecamatan Moti	85.000.000,00	85.000.000,00	100,00	242.511.400,00
9.	Kecamatan Pulau Hiri	245.250.000,00	245.250.000,00	100,00	171.385.000,00

No.	OPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020 (audited)		Realisasi 2019 (audited)
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
10.	Kecamatan Pulau Batang Dua	480.750.000,00	480.750.000,00	100,00	303.386.380,00
11.	Kecamatan Ternate Barat	665.538.000,00	665.538.000,00	100,00	145.429.000,00
12.	Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	355.949.345,72
Jumlah		6.652.962.340,00	6.149.586.820,00	92,43	13.410.478.426,72

VI.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap Peralatan dan Mesin yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun dan menambah aset pemerintah. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp. 25.654.934.174,00 dan direalisasikan sebesar sebesar Rp. 14.916.209.311,00 atau 58,14%. Realisasi tersebut menurun sebesar Rp. 18.928.324.864,00 (55,93%) dibanding realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 33.844.534.175,00. Adapun dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut diatas yang menjadi aset dari Pemerintah Kota Ternate adalah sebesar Rp. 14.549.834.172,00 dan yang tidak menjadi aset dari Pemerintah Daerah Kota Ternate adalah sebesar Rp. 2.527.075.243,00.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2020 dan 2019 dapat dilihat pada halaman tabel di bawah ini :

NO	URAIAN	Anggaran 2020	Realisasi 2020 (audited)		Realisasi 2019 (audited)
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Excavator	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengangkat	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Proses	0,00	0,00	0,00	1.121.439.000,00
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan	0,00	0,00	0,00	115479000
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.303.000.000,00	1.258.000.000,00	96,55	1.420.818.503,00
7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	200.000.000,00	198.000.000,00	99,00	5000000
8	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	250.000.000,00	199.900.000,00	79,96	174980000
9	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	3.327.787.955,00	1.212.312.498,00	36,43	472.490.000,00
10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	171.700.000,00	53.200.000,00	30,98	711.832.000,00
11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	192.500.000,00	192.500.000,00	100	349441000

NO	URAIAN	Anggaran 2020	Realisasi 2020 (audited)		Realisasi 2019 (audited)
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang	0,00	0,00	0,00	25000000
13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<i>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus</i>	0,00	0,00	0,00	392881500
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Perkakas Bengkel Service	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu	0,00	0,00	0,00	0,00
18	<i>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Pabrik Es</i>	1.706.401.000,00	1.704.076.000,00	99,86	970012116
19	<i>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Konstruksi Logam</i>	0,00	0,00	0	990651800
20	<i>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool)</i>	50.000.000,00	49.450.000,00	98,90	99792000
21	<i>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal</i>	0,00	0,00	0,00	71784000
22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<i>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora</i>	0,00	0,00	0,00	5000000
24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0,00	0,00	0,00	18.975.000,00
25	<i>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Peternakan</i>	0,00	0,00	0,00	99000000
26	<i>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pasca Panen</i>	0,00	0,00	0,00	7500000
27	<i>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Produksi Perikanan</i>	0,00	0,00	0,00	277586520
28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	50.000.000,00	0,00	0,00	296.589.604,00
29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<i>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penangkap Ikan</i>	0,00	0,00	0,00	53674000

NO	URAIAN	Anggaran 2020	Realisasi 2020 (audited)		Realisasi 2019 (audited)
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00
34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	37.069.900,00
36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	6.770.900,00	6.261.700,00	92,48	0,00
37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)	70.000.000,00	69.685.000,00	99,55	0,00
38	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	45.000.000,00	34.300.000,00	76,22	0,00
39	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	3.405.691.004,00	3.391.710.228,00	99,59	3.560.018.095,00
40	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	3.569.660.680,00	1.950.507.450,00	54,64	3.901.806.687,00
41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	261.934.700,00
43	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	536.082.570,00	411.754.419,00	76,81	825.535.499,00
44	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	38.320.000,00	28.933.300,00	75,50	7.184.050,00
45	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.819.158.219,00	1.544.852.364,00	84,92	3.596.797.755,00
46	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	2.100.000,00	0,00	0,00	231.122.129,00
47	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	2.500.000,00	0,00	0,00	211.504.000,00
48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	1.811.060.346,00	1.415.229.764,00	78,14	2.519.744.330,00
49	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	11.400.000,00	11.400.000,00	100,00	16.275.350,00
50	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	0,00	0,00	0,00	147.597.000,00
51	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	403.137.400,00	24.142.625,00	5,99	376.715.210,00
52	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	508.750.900,00	249.306.900,00	49,00	691.254.500,00

NO	URAIAN	Anggaran 2020	Realisasi 2020 (audited)		Realisasi 2019 (audited)
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
53	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	39.000.000,00	39.000.000,00	100,00	140.579.500,00
54	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	12.000.000,00	11.000.000,00	91,67	20.318.000,00
55	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	24.000.000,00	17.500.000,00	72,92	189.654.250,00
56	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	40.000.000,00	11.000.000,00	27,50	8.400.000,00
57	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	52.500.000,00	51.205.000,00	97,53	0,00
58	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruang Pejabat	17.000.000,00	7.000.000,00	41,18	53.040.000,00
59	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	78.541.500,00	75.867.675,00	96,60	175.725.500,00
60	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	203.620.000,00	169.819.000,00	83,40	244.863.400,00
61	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
62	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	0,00	0,00	0,00	228.151.460,00
64	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial	99.400.000,00	99.000.000,00	99,60	248.265.000,00
65	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena SHF/Parabola	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	0,00	0,00	0,00	4.009.866.839,00
67	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Farmasi	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	2.695.129.200,00	1.302.173.602,00	48,32	788.047.268,00
69	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Kesenian	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	2.828.722.500,00	1.207.765.890,00	42,70	2.475.476.460,00

NO	URAIAN	Anggaran 2020	Realisasi 2020 (audited)		Realisasi 2019 (audited)
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
74	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan umum	0,00	0,00	0,00	858200000
75	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bantu Kemanan	80.500.000,00	80.056.000,00	99,45	288.511.250,00
Jumlah		25.654.934.174,00	17.076.909.415,00	66,56	33.844.534.175,00

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin per OPD adalah sebagai berikut:

No.	OPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020 (audited)		Realisasi 2019 (audited)
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1.	Dinas Pendidikan	6.416.767.404,00	4.375.928.694,00	68,20	6.970.585.239,00
3.	Dinas Kesehatan	4.868.794.655,00	1.674.373.600,00	34,39	5.663.285.607,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum	624.737.400,00	39.812.500,00	6,37	583.167.500,00
5.	Dinas Perumahan	1.824.133.575,00	1.660.576.125,00	91,03	2.683.808.590,00
6.	Dinas Kebakaran	84.000.000,00	83.999.999,00	100,00	159.264.499,00
7.	Satpol PP	90.000.000,00	25.000.000,00	27,78	29.227.500,00
8.	Dinas Sosial	28.579.000,00	21.264.000,00	74,40	8.977.000,00
9.	Dinas Tenaga Kerja	446.029.500,00	363.910.400,00	81,59	236.303.290,00
10.	Dinas Pemeberdayaan Perempuan	223.562.870,00	132.000.000,00	59,04	200.751.950,00
11.	Dinas Ketahanan Pangan	88.600.000,00	0,00	0,00	239.631.890,00
12.	Dinas Lingkungan Hidup	323.221.270,00	273.015.945,00	84,47	408.994.000,00
13.	Dinas Kependudukan	51.500.000,00	51.491.000,00	99,98	331.293.500,00
14.	Dinas KB	753.000.000,00	436.343.000,00	57,95	145.785.000,00
15.	Dinas Perhubungan	652.750.000,00	589.389.000,00	90,29	770.784.500,00
16.	Dinas Kominfo	114.000.000,00	55.000.000,00	48,25	218.539.500,00
17.	Dinas Koperasi	347.211.000,00	346.400.000,00	99,77	130.200.000,00
18.	Dinas Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	173.425.965,00
19.	Dinas Pemuda dan Olah Raga	124.000.000,00	123.774.000,00	99,82	76.000.000,00
20.	Dinas Kebudayaan	163.500.000,00	33.000.000,00	20,18	182.000.000,00
20.	Dinas Perpustakaan	16.300.000,00	0,00	0,00	732.204.430,00
21.	Dinas Kelautan	2.121.401.000,00	2.098.162.000,00	98,90	2.690.120.136,00
22.	Dinas Pariwisata	89.100.000,00	60.100.000,00	67,45	997.478.000,00
23.	Dinas Pertanian	624.975.400,00	619.000.000,00	99,04	576.793.518
24.	Dinas Perindustrian	42.707.400,00	29.700.000,00	69,54	1.130.157.800,00
25.	Sekretariat Daerah	1.621.699.800,00	1.243.788.800,00	76,70	3.843.724.983,00
26.	Sekretariat DPRD	412.700.000,00	388.680.000,00	94,18	102.722.750,00
27.	Kec. Ternate Utara	283.400.000,00	195.200.000,00	68,88	191.000.000,00
28.	Kec. Ternate Tengah	77.500.000,00	76.277.000,00	98,42	194.887.501,00
29.	Kec. Ternate Selatan	256.125.000,00	236.025.000,00	92,15	185.833.500,00
30.	Kec. Pulau Ternate	104.000.000,00	104.000.000,00	100,00	778.357.630,00

No.	OPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020 (audited)		Realisasi 2019 (audited)
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
31.	Kec. Moti	67.000.000,00	32.000.000,00	47,76	143.814.600,00
32.	Kec. Pulau Hiri	0,00	0,00	0,00	73.500.000,00
33.	Kec. Pulau Batang Dua	347.000.000,00	313.683.000,00	90,40	288.000.000,00
34.	Kec. Ternate Barat	18.700.000,00	18.700.000,00	100,00	84.150.000,00
35.	Inspektorat Daerah	47.500.000,00	0,00	0,00	85.000.000,00
36.	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	894.450.900,00	378.333.999,00	42,30	435.825.500,00
37.	BPKAD	300.500.000,00	199.140.323,00	66,27	527.720.000,00
38.	BP2RD	530.000.000,00	249.241.000,00	47,03	988.834.337,00
39.	Badan Kepegawaian	167.488.000,00	148.100.000,00	88,42	345.416.500,00
41.	Kesbang	300.000.000,00	294.000.000,00	98,00	79.300.000,00
42.	BPBD	108.000.000,00	107.500.000,00	99,54	157.667.460,00
Jumlah		25.654.934.174,00	17.076.909.415,00	66,56	33.844.534.175,00

VI.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap gedung dan bangunan yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun dan menambah aset pemerintah.

Untuk Tahun 2020 realisasi belanja modal gedung dan bangunan pada Pemerintah kota Ternate adalah sebesar Rp. 59.390.064.040,00 dimana terdapat belanja modal gedung dan bangunan yang diakui sebagai penambahan aset adalah sebesar Rp. 10.007.186.258,00 dan yang tidak diakui sebagai aset adalah sebesar Rp. 49.382.877.782,00

NO	URAIAN	Anggaran 2020	Realisasi 2020 (audited)		Realisasi 2019 (audited)
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	5.444.731.032,00	4.470.766.608,00	82,11	13.296.983.330,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	810.462.550,00	121.220.000,00	14,96	938.861.391,90
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	6.420.116.632,00	4.357.508.378,00	67,87	6.338.808.572,91
5	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
6	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.663.606.707,00	2.234.945.508,00	83,91	1.152.844.000,00
7	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	9.894.957.999,00	8.889.445.422,00	89,84	11.319.622.672,00
8	Belanja Modal Gedung dan	4.653.419.010,00	2.745.671.740,00	59,00	18.351.506.253,00

NO	URAIAN	Anggaran 2020	Realisasi 2020 (audited)		Realisasi 2019 (audited)
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
	Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga				
9	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	33.956.476.300,00	33.445.265.500,00	98,49	17.192.196.738,00
10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	80.000.000,00	0,00	0,00	373.530.090,00
11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pemotongan Hewan	0,00	0,00	0,00	393.321.596,00
13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pabrik	0,00	0,00	0,00	308.900.000,00
14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Museum	1.032.161.900,00	1.032.161.900,00	100,00	583.462.100,00
15	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	219.701.025,00	79.680.025,00	36,27	1.317.802.858,00
16	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.318.480.600,00	855.588.159,00	64,89	5.318.676.062,00
17	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan	0,00	0,00	0,00	149.617.400,00
19	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	0,00	0,00	0,00	291.880.620,00
20	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	0,00	0,00	0,00	474.281.275,00
21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II	1.332.142.856,00	1.005.928.800,00	75,51	0,00
22	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	102.000.000,00	101.882.000,00	99,88	0,00
Jumlah		67.978.256.611,00	59.390.064.040,00	87,37	77.852.294.958,81

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan per OPD adalah sebagai berikut:

No.	OPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020 (audited)		Realisasi 2019 (audited)
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1.	Dinas Pendidikan	11.051.235.310,00	9.913.289.436,00	89,70	11.789.733.101,00
2.	Dinas Kesehatan	8.537.038.114,00	6.128.710.962,00	71,79	7.989.443.636,81
3.	Dinas Pekerjaan Umum	39.311.092.710,00	37.323.234.640,00	94,94	39.039.605.996,00
4.	Dinas Perumahan	392.882.600,00	99.495.000,00	25,32	4.487.148.315,00
5.	Dinas Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	OPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020 (audited)		Realisasi 2019 (audited)
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
6.	Satpol PP	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	234.244.650,00
9.	Dinas Pemeberdayaan Perempuan	0,00	0,00	0,00	174.715.000,00
10.	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	61.300.000,00
12.	Dinas Kependudukan	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Dinas KB	0,00	0,00	0,00	531.450.000,00
14.	Dinas Perhubungan	401.701.025,00	181.562.025,00	45,20	923.719.472,00
15.	Dinas Kominfo	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Dinas Koperasi	0,00	0,00	0,00	59.900.000,00
17.	Dinas Penanaman Modal	100.000.000,00	95.595.000,00	95,60	0,00
18.	Dinas Pemuda dan Olah Raga	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Dinas Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Dinas Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Dinas Kelautan	105.000.000,00	0,00	0,00	336.738.172,00
22.	Dinas Pariwisata	3.192.883.256,00	2.074.979.507,00	64,99	1.829.669.538,00
23.	Dinas Pertanian	0,00	0,00	0,00	1.535.852.494,00
24.	Dinas Perindustrian	1.660.744.700,00	1.229.644.700,00	74,04	3.757.890.638,00
25.	Sekretariat Daerah	701.364.342,00	608.477.170,00	86,76	1.255.572.140,00
26.	Sekretariat DPRD	287.000.000,00	244.861.046,00	85,32	294.060.000,00
27.	Kec. Ternate Utara	0,00	0,00	0,00	302.002.165,00
28.	Kec. Ternate Tengah	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	281.326.400,00
29.	Kec. Ternate Selatan	24.509.100,00	24.509.100,00	100,00	526.810.000,00
30.	Kec. Pulau Ternate	75.000.000,00	74.800.000,00	99,73	120.497.600,00
31.	Kec. Moti	268.500.000,00	268.500.000,00	100,00	114.784.400,00
32.	Kec. Pulau Hiri	301.025.000,00	300.925.000,00	99,97	189.944.000,00
33.	Kec. Pulau Batang Dua	53.761.000,00	53.761.000,00	100,00	61.340.000,00
34.	Kec. Ternate Barat	146.800.000,00	0,00	0,00	122.731.000,00
35.	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	148.458.644,00
36.	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	406.321.454,00	256.321.454,00	63,08	1.267.579.220,00
37.	BPKAD	400.000.000,00	0,00	0,00	199.800.000,00
38.	BP2RD	311.398.000,00	261.398.000,00	83,94	199.278.375,00
39.	Badan Kepegawaian	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Kesbang	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	BPBD	0,00	0,00	0,00	21.700.000,00
Jumlah		67.978.256.611,00	59.390.064.040,00	87,37	77.852.294.958,81

VI.1.2.2.4. Belanja Modal jalan irigasi dan jaringan

Belanja Modal jalan irigasi dan jaringan adalah Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap jalan irigasi dan jaringan yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun dan menambah nilai aset pemerintah. Untuk Tahun 2020 Pemerintah Kota Ternate menganggarkan belanja modal jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp. 115.823.505.111,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 103.748.096.799,00. Penambahan aset yang telah direalisasikan adalah sebesar Rp. 40.940.215.226,00 dan yang tidak menjadi aset adalah sebesar Rp. 62.807.881.573,00.

NO	URAIAN	Anggaran 2020	Realisasi 2020 (audited)		Realisasi 2019 (audited)
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	85.629.138.711,00	82.744.157.476,00	96,63	70.067.189.943,00
2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	1.851.159.425,00	1.062.345.448,00	57,39	7.512.009.539,00
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	10.716.395.900,00	8.197.166.285,00	76,49	4.155.183.950,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi	0,00	0,00	0,00	175.187.843,00
6	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi	4.316.288.150,00	4.185.402.481,00	96,97	3.929.006.769,00
7	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi	1.562.434.435,00	1.523.607.904,00	97,51	680.994.400,00
8	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang Surut	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	0,00	0,00	0,00	41.585.000,00
11	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai	0,00	0,00	0,00	91.253.438,00
12	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air	2.143.150.000,00	1.996.111.000,00	93,14	5.103.337.593,00
13	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	3.174.281.180,00	2.817.049.600,00	88,75	544.297.050,00
14	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Kotor	0,00	0,00	0,00	7.754.000,00
15	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Tawar	180.501.310,00	180.501.310,00	100,00	95.987.705,00
16	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	0,00	0,00	92.616.240,00
17	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	5.945.301.000,00	812.344.925,00	13,66	3.213.403.577,22
18	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	105.900.000,00	30.455.370,00	28,76	0,00
19	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan	198.955.000,00	198.955.000,00	100,00	2.175.192.000,00

NO	URAIAN	Anggaran 2020	Realisasi 2020 (audited)		Realisasi 2019 (audited)
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
	Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringan Sambungan Kerumah				
22	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	0,00	0,00	0,00	257.572.861,00
Jumlah		115.823.505.111,00	103.748.096.799,00	89,57	98.142.571.908,22

Rincian Belanja Modal Jalan dan Irigasi per OPD adalah sebagai berikut:

No.	OPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020 (audited)		Realisasi 2019 (audited)
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	91.253.438,00
2	Dinas Kesehatan	1.485.000.000,00	416.963.257,00	28,08	799.403.577,22
3	Dinas Pekerjaan Umum	96.241.083.983,00	86.836.577.401,00	90,23	78.072.679.751,00
4	Dinas Perumahan Permukiman	588.750.000,00	0,00	0,00	1.341.032.900,00
5	Dinas Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Satpol PP	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	180.501.310,00	180.501.310,00	100,00	95.987.705,00
12	Dinas Kependudukan	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas KB	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Perhubungan	760.000.000,00	276.664.200,00	36,40	887.662.805,00
15	Dinas Kominfo	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Koperasi	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Pemuda dan Olah Raga	0,00	0,00	0,00	99.860.000,00
19	Dinas Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dinas Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Dinas Kelautan	0,00	0,00	0,00	192.783.373,00
22	Dinas Pariwisata	1.361.178.005,00	1.153.882.448,00	84,77	1.631.930.200,00
23	Dinas Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Dinas Perindustrian	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kec. Ternate Utara	2.111.107.000,00	2.035.662.370,00	96,43	2.941.730.170,00
28	Kec. Ternate Tengah	2.976.703.100,00	2.901.703.100,00	97,48	2.560.198.598,00
29	Kec. Ternate Selatan	3.335.996.713,00	3.335.996.713,00	100,00	3.511.186.471,00
30	Kec. Pulau Ternate	1.402.148.000,00	1.401.148.000,00	99,93	743.318.200,00
31	Kec. Moti	747.960.000,00	747.960.000,00	100,00	519.978.600,00
32	Kec. Pulau Hiri	1.158.040.000,00	1.158.040.000,00	100,00	939.289.000,00
33	Kec. Pulau Batang Dua	532.825.000,00	532.825.000,00	100,00	528.490.120,00
34	Kec. Ternate Barat	799.062.000,00	774.062.000,00	96,87	1.092.337.200,00
35	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
37	BPKAD	0,00	0,00	0,00	0,00
38	BP2RD	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Badan Kepegawaian	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	OPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020 (audited)		Realisasi 2019 (audited)
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
40	Kesbang	0,00	0,00	0,00	0,00
41	BPBD	2.143.150.000,00	1.996.111.000,00	93,14	2.093.449.800,00
Jumlah		115.823.505.111,00	103.748.096.799,00	89,57	98.142.571.908,22

VI.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal aset tetap lainnya adalah Pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap lainnya yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun dan menambah nilai aset pemerintah dan pada tahun 2019 Kota Ternate menggarkan belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp. 3.947.452.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.153.288.287,00 sedangkan yang menjadi penambahan nilai aset pada realisasi belanja modal Aset tetap lainnya adalah 1.709.929.818,97 dan yang tidak menjadi aset adalah sebesar Rp. 443.358.468,03.

NO	URAIAN	Anggaran 2020	Realisasi 2020 (audited)		Realisasi 2019 (audited)
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	3.330.822.000,00	1.590.450.537,00	47,75	3.644.061.011,00
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan	0,00	0,00	0,00	59.212.000,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Olah Raga	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Air	0,00	0,00	0,00	396.209.000,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	0,00	0,00	0,00	148.650.000,00
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Ikan	0,00	0,00	0,00	136.950.000,00
7	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Barang Kerajinan	50.000.000,00	48.675.000,00	97,35	0,00
8	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias	320.000.000,00	318.562.750,00	99,55	348.137.341,00
9	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	246.630.000,00	195.600.000,00	0,00	0,00
Jumlah		3.947.452.000,00	2.153.288.287,00	54,55	4.733.219.352,00

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per OPD adalah sebagai berikut:

No	OPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020 (audited)		Realisasi 2019 (audited)
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	Dinas Pendidikan	3.330.822.000,00	1.590.450.537,00	47,75	3.423.771.011,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00

No	OPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020 (audited)		Realisasi 2019 (audited)
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	250.000.000,00	249.084.000,00	99,63	348.137.341,00
5	Dinas Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dinas Sosial	30.500.000,00	30.500.000,00	100,00	0,00
8	Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Pemuda dan Olah Raga	100.000.000,00	99.800.000,00	99,80	0,00
19	Dinas Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	0,00	0,00	279.502.000,00
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	533.159.000,00
22	Dinas Pariwisata	0,00	0,00	0,00	148.650.000,00
23	Dinas Pertanian	66.000.000,00	65.300.000,00	98,94	0,00
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	50.000.000,00	48.675.000,00	97,35	0,00
25	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Ternate Utara	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Ternate Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Ternate Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Pulau Ternate	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Moti	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Pulau Hiri	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Pulau Batang Dua	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Ternate Barat	50.130.000,00	0,00	0,00	0,00
35	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	70.000.000,00	69.478.750,00	99,26	0,00
37	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		3.947.452.000,00	2.153.288.287,00	54,55	4.733.219.352,00

VI.1.2.3. Belanja Tak Terduga

Akun belanja ini diperuntukkan bagi keperluan penanganan bencana alam, bencana sosial dan untuk pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kota Ternate. Pada Tahun Anggaran 2020 Belanja Tak Terduga dianggarkan sebesar Rp. 40.000.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 36.045.024.238,00 dengan persentase realisasi sebesar (90,11%).

No	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020 (audited)		Realisasi 2019 (audited)
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	Belanja Tak Terduga	40,000,000,000.00	36.045.024.238,00	90,11	4.949.851.000,00
J u m l a h		40,000,000,000.00	36.045.024.238,00	90,11	4.949.851.000,00

Adapun rincian belanja tak terduga Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.	U R A I A N	Realisasi 2020 (audited)
1	Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Untuk Mengurangi Resiko Bencana Banjir Dan Tanah Longsor Kota Ternate Tahun 2019 (Pemb.Talud Penahan Kel.Makassar Barat) Sesuai SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tanggal,02 Mei 2019	240.629.000,00
2	Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Biaya perencanaan Terknis Dan Pengawasan Teknis Swakelola Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Tanah Kel.Makassar Barat (Lingk.Kubur Islam) Sesuai SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tanggal.02 Mei 2019	17.000.000,00
3	Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Biaya perencanaan Terknis Dan Pengawasan Teknis Swakelola Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Tanah Kel.Gambesi RT.01/RW.01 Sesuai SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tanggal.02 Mei 2019	13.755.000,00
4	Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Biaya perencanaan Terknis Dan Pengawasan Teknis Swakelola Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Tanah Kel.Maliaro RT.06/RW.03 Sesuai SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tanggal.02 Mei 2019	10.790.000,00
5	Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Biaya perencanaan Terknis Dan Pengawasan Teknis Swakelola Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Tanah Kel.Kalamatan Pesantren Sesuai SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tanggal.02 Mei 2019	13.050.000,00
6	Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Biaya perencanaan Terknis Dan Pengawasan Teknis Swakelola Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Tanah Kel.Tobona RT.05/RW.03 Sesuai SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tanggal.02 Mei 2019	8.050.000,00
7	Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Biaya perencanaan Terknis Dan Pengawasan Teknis Swakelola Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Tanah Kel.Tobololo RT.04/RW.02 Sesuai SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tanggal.02 Mei 2019	9.362.500,00
8	Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Biaya perencanaan Terknis Dan Pengawasan Teknis Swakelola Pekerjaan Pembuatan Saluran Sekunder Kel.Kastela RT.02/RW.03 Sesuai SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tanggal.02 Mei 2019	5.600.000,00
9	Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Biaya perencanaan Terknis Dan Pengawasan Teknis Swakelola Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Tanah Kel.Tanah Tinggi RT.12/RW.06 Sesuai SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tanggal.02 Mei 2019	6.440.000,00
10	Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Biaya perencanaan Terknis Dan Pengawasan Teknis Swakelola Pekerjaan Normalisasi Kali Mati Kelurahan Kulaba RT.03/RW.02 Sesuai SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tanggal.02 Mei 2019	13.300.000,00
11	Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Biaya perencanaan Terknis Dan Pengawasan Teknis Swakelola Pekerjaan Pembuatan Saluran Sekunder Kel.Tabona RT.12/RW.06 Sesuai SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tanggal.02 Mei 2019	7.190.400,00

No.	URAIAN	Realisasi 2020 (audited)
12	Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Biaya perencanaan Terknis Dan Pengawasan Teknis Swakelola Pererjaan Normalisasi Saluran Ake Mangga Dua Kel.Bastiong Talangame Sesuai SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tanggal.02 Mei 2019	5.692.400,00
13	Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Biaya perencanaan Terknis Dan Pengawasan Teknis Swakelola Pererjaan Pemb.Talud Penahan Tanah Kel.Tanah Tinggi Sesuai SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tanggal.02 Mei 2019	8.400.000,00
14	Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Biaya perencanaan Terknis Dan Pengawasan Teknis Swakelola Pekerjaan Normalisasi Saluran Kelurahan Akehuda RT.04/RW.02 Sesuai SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tanggal.02 Mei 2019	4.746.000,00
15	Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Biaya perencanaan Terknis Dan Pengawasan Teknis Swakelola Pekerjaan Pemb.Talud Penahan Tanah Kel. Kampong Pisang RT.08/RW.04 Sesuai SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tanggal.02 Mei 2019	6.300.000,00
16	Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Biaya perencanaan Terknis Dan Pengawasan Teknis Swakelola Pekerjaan Pemb.Talud Penahan Tanah Kel. Jati RT.13/RW.07 Sesuai SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tanggal.02 Mei 2019	6.650.000,00
17	Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Biaya perencanaan Terknis Dan Pengawasan Teknis Swakelola Pekerjaan Pembuatan Saluran Sekunder Kel.Makassar Barat RT.04/RW.02 Sesuai SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tanggal.02 Mei 2019	9.880.000,00
18	Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Biaya perencanaan Terknis Dan Pengawasan Teknis Swakelola Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Tanah Kawasan Bastiong Talangame Dan Mangga Dua Utara Sesuai SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tanggal.02 Mei 2019	5.390.000,00
19	Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Biaya perencanaan Terknis Dan Pengawasan Teknis Swakelola Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Tanah Kel.Fitu RT.07/RW.04 Sesuai SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tanggal.02 Mei 2019	6.440.000,00
20	Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Biaya perencanaan Terknis Dan Pengawasan Teknis Swakelola Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Tanah Kel.Soa RT/RW.02 Sesuai SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tanggal.02 Mei 2019	6.720.000,00
21	Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Biaya perencanaan Terknis Dan Pengawasan Teknis Swakelola Pererjaan Pembangunan Talud Penahan Tanah Kel.Taduma Rt.05/Rw.03 Sesuai SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tanggal.02 Mei 2019	5.460.000,00
22	Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Biaya perencanaan Terknis Dan Pengawasan Teknis Swakelola Pererjaan Pembangunan Talud Penahan Tanah Kel.Jati- Perumahan Sesuai SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tanggal.02 Mei 2019	6.860.000,00
23	Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Biaya perencanaan Terknis Dan Pengawasan Teknis Swakelola Pererjaan Pembangunan Talud Penahan Tanah Kel.Marikurubu Rt.05/Rw.03 Sesuai SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tanggal.02 Mei 2019	8.400.000,00
24	Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Untuk Mengurangi Resiko Bencana Banjir Dan Tanah Longsor Kota Ternate Tahun 2019 (Pemb.Talud Penahan Kel.Kalumata (Pesantren) Sesuai SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tanggal,02 Mei 2019	186.156.000,00
25	Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Untuk Mengurangi Resiko Bencana Banjir Dan Tanah Longsor Kota Ternate Tahun 2019 (Pemb.Talud Penahan Kel.Maliaro) Sesuai SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tanggal,02 Mei 2019	153.331.000,00
26	Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Untuk Mengurangi Resiko Bencana Banjir Dan Tanah Longsor Kota Ternate Tahun 2019 (Pemb.Talud Penahan Tanah Kel.Tanah Tinggi) Sesuai SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tanggal,02 Mei 2019	91.830.000,00
27	Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Untuk Mengurangi Resiko Bencana Banjir Dan Tanah Longsor Kota Ternate Tahun 2019 (Pek.Normalisasi Saluran Akehuda Kel.Akehuda) Sesuai SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tanggl,02 Mei 2019	67.299.000,00

No.	U R A I A N	Realisasi 2020 (audited)
28	Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Untuk Mengurangi Resiko Bencana Banjir Dan Tanah Longsor Kota Ternate Tahun 2019 (Pemb Talud Penahan Tanah Kel.Kampung Pisang) Sesuai SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tanggal 02 Mei 2019	89.600.000,00
29	Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Untuk Mengurangi Resiko Bencana Banjir Dan Tanah Longsor Kota Ternate Tahun 2019 (Pek.Normalisasi Kali Mati Kel.Kulaba) Sesuai SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tanggl,02 Mei 2019	173.883.000,00
30	Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Untuk Mengurangi Resiko Bencana Banjir Dan Tanah Longsor Kota Ternate Tahun 2019 (Pemb Talud Penahan Tanah Kel.Gambesi) Sesuai SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tanggl 02 Mei 2019	182.000.000,00
31	Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Penetapan Status Penangan Darurat CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID - 19) Tahun 2020	249.114.000,00
32	Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Tahap Ke-II (Dua) Penetapan Status Darurat CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Sesuai SK Walikota No.50/III.6/KT/2020 Tanggal,16 Maret 2020	225.400.000,00
33	Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Tahap Pertama Perpanjangan Status Penangan Darurat Bencana Non Alam CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Sesuai SK Walikota No.51/III.6/KT/2020 Tanggal,26 Maret 2020	500.000.000,00
34	Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Tahap Ke-II (Dua) Perpanjangan Status Penangan Darurat Bencana Non Alam CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Sesuai SK Walikota No.51/III.6/KT/2020 Tanggal,26 Maret 2020	772.500.000,00
35	Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Tahap Ke-III (Tiga) Perpanjangan Status Penangan Darurat Bencana Non Alam CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Sesuai SK Walikota No.51/III.6/KT/2020 Tanggal,26 Maret 2020	2.685.000.000,00
36	Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Tahap Ke-IV (Empat) Perpanjangan Status Penangan Darurat Bencana Non Alam CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Sesuai SK Walikota No.51/III.6/KT/2020 Tanggal,26 Maret 2020	2.632.000.000,00
37	Pengesahan atas pertanggungjawaban nihil kegiatan Dana Tanggap Darurat Covid-19 tahap I	1.670.029.800,00
38	Pengesahan atas pertanggungjawaban tambahan uang persediaan nihil kegiatan Covid-19 (Tahap II)	5.008.749.300,00
39	Pengesahan atas pertanggungjawaban nihil dan tidak terduga untuk penggunaan covid-19	5.071.802.463,00
40	Pengesahan atas pertanggungjawaban tambahan uang persediaan nihil (TUP) Dana Tidak Terduga (Covid-19) Bulan Juni 2020	4.537.486.675,00
41	Pengesahan atas pertanggungjawaban tambahan uang nihil kegiatan Belanja Tidak terduga (Covid-19) Bulan Juli 2020	2.086.635.000,00
42	Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Penetapan Siaga Darurat Banjir ,Tanah Longsor dan Abarasi Pantai di Wilayah Kota Ternate Tahun 2019 (Pemb.Talud Penahan Tanah Kel.Kampung pisang) Sesuai SK Walikota No.75/III.6/KT/2020 Tanggal, 14 Juli 2020	199.000.000,00
43	Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Penetapan Siaga Darurat Banjir ,Tanah Longsor dan Abarasi Pantai di Wilayah Kota Ternate Tahun 2019 (Pemb.Talud Penahan Tanah Ke.Takome) Sesuai SK Walikota No.75/III.6/KT/2020 Tanggal, 14 Juli 2020	199.752.000,00
44	Pengesahan atas pertanggungjawaban nihil kegiatan covid-19	250.000.000,00
45	Pengesahan atas pertanggungjawaban Covid-19 Bulan September	5.042.728.700,00
46	Pengesahan atas pertanggungjawaban tambahan uang persediaan nihil untuk kegiatan Covid-19 tahap 13	2.065.266.000,00
47	Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Penetapan Siaga Darurat Banjir ,Tanah Longsor dan Abarasi Pantai di Wilayah Kota Ternate Tahun 2019 (Pemb.Talud Penahan Tanah Kel.Foramadyahe) Sesuai SK Walikota No.75/III.6/KT/2020 Tanggal, 14 Juli 2020	198.686.000,00
48	Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Penetapan Siaga Darurat Banjir ,Tanah Longsor dan Abarasi Pantai di Wilayah Kota Ternate Tahun 2019 (Pemb.Talud Penahan Ombak Kel.Sulamadaha) Sesuai SK Walikota No.75/III.6/KT/2020 Tanggal, 14 Juli 2020	199.667.000,00
49	Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Penetapan Siaga Darurat Banjir ,Tanah Longsor dan Abarasi Pantai di Wilayah Kota Ternate Tahun 2019 (Pemb.Talud Penahan Tanah Kel.Rua (Akerica) Sesuai SK Walikota	159.765.000,00

No.	U R A I A N	Realisasi 2020 (audited)
	No.75/III.6/KT/2020 Tanggal, 14 Juli 2020	
50	Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Penetapan Siaga Darurat Banjir ,Tanah Longsor dan Abarasi Pantai di Wilayah Kota Ternate Tahun 2019 (Pemb.Talud Penahan Tanah Kel.Sasa) Sesuai SK Walikota No.75/III.6/KT/2020 Tanggal, 14 Juli 2020	199.800.000,00
51	Setor Kembali Pengembalian Uang Harian Tim Medis Penanganan Covid-19 Anggaran BTT Tahun 2020 Bulan Juli	(6.750.000,00)
52	Setor Kembali Pengembalian Uang Harian Tim Medis Penanganan Covid-19 Anggaran BTT Tahun 2020 Bulan Mei	(85.050.000,00)
53	Setor Kembali Pengembalian Uang Harian Tim Medis Penanganan Covid-19 Anggaran BTT Tahun 2020 Bulan April	(60.000.000,00)
54	Setor Kembali Pengembalian Uang Harian Tim Medis Penanganan Covid-19 Anggaran BTT Tahun 2020 Bulan Juni	(186.300.000,00)
55	Belanja Bantuan Tidak Terduga Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Abrasi Pantai di Wilayah Kota Ternate Tahun 2020 (Pemb. Talut Penahan Tanah Kel. Rua) Sesuai SK Walikota No. 75/III.6/KT/2020 tgl. 14 Juli 2020	199.708.000,00
56	Pengesahan atas pertanggungjawaban tambahan uang nihil kegataan Covid-19 tahap 13	859.830.000,00
Total Belanja Tak Terduga		36.045.024.238,00

VI.1.3. TRANSFER

Akun Transfer ini digunakan untuk menampung pengeluaran uang dari Pemerintah Kota Ternate ke entitas pelaporan lain. Pada Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kota Ternate mengalokasikan Transfer sebesar Rp. 813.109.800,00 berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Banparpol) dengan realisasi sebesar Rp. 686.743.920,00 atau 84,46%. Realisasi tersebut turun sebesar Rp. 58.180.584,00 atau (7,81%) dibanding realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 744.924.504,00. Realisasi Tahun Anggaran 2019 disajikan dengan saldo Rp0,00, namun demikian saldo sebenarnya disajikan dengan klasifikasi sebagai Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp. 813.109.800,00 sesuai laporan keuangan audited Tahun 2019. Saldo Tahun Anggaran 2020 disajikan sebagai Transfer mengikuti Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dengan Rincian Banparpol Tahun Anggaran 2020 dan 2019 disajikan sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran Tahun 2020	Realisasi 2020 (audited)		Realisasi 2019 (audited)
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	DPD Golkar	106.917.440,00	83.828.580,00	78,40	71.278.293,00
2	DPD Demokrat	84.435.330,00	60.925.790,00	72,16	78.557.946,00
3	DPD PAN	49.567.430,00	0,00	0,00	47.728.977,00
4	DPC PDI - P	100.995.560,00	83.424.080,00	82,60	96.602.690,00
5	DPC Hanura	43.127.790,00	43.872.070,00	101,73	43.313.860,00
6	DPD PKS	49.567.430,00	45.668.050,00	92,13	48.592.585,00
7	DPC PPP	84.039.000,00	53.321.190,00	63,45	76.359.488,00
8	DPC PBB	43.516.110,00	35.579.820,00	81,76	41.532.038,00
9	DPD Nasdem	82.760.700,00	79.265.820,00	95,78	81.886.980,00
10	DPC Gerindra	62.325.360,00	48.345.840,00	77,57	41.550.240,00
11	DPC PKPI	49.397.540,00	0,00	0,00	37.048.155,00
12	DPC PKB	56.460.110,00	70.221.200,00	124,37	59.900.382,00
13	DPC Berkarya	0,00	39.446.840,00	100,00	9.861.710,00
14	DPC PERINDO	0,00	42.844.640,00	100,00	10.711.160,00
J u m l a h		813.109.800,00	686.743.920,00	84,46	744.924.504,00

VI.1.4. SURPLUS/DEFISIT

Dalam APBD Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kota Ternate menganggarkan defisit anggaran sebesar (Rp. 1.628.273.333,00) namun dalam realisasinya terjadi surplus sebesar Rp. 1.275.667.337,00.

No	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020 (audited)		Realisasi 2019 (audited)
		(Rp)	Rp.	%	(Rp)
1	Surplus/Defisit	(1.628.273.333,00)	1.275.667.337,00	(78,34)	6.272.691.566,24
J u m l a h		(1.628.273.333,00)	1.275.667.337,00	(78,34)	6.272.691.566,24

VI.1.5. PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Ternate, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dimana dalam penganggaran Pemerintah Kota Ternate terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

VI.1.5.1. Penerimaan Pembiayaan

Akun Penerimaan Pembiayaan merupakan akun untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Ternate yang perlu dibayar kembali yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran. Penerimaan Pembiayaan Kota Ternate untuk Tahun Anggaran 2020 seluruhnya terdiri dari Penggunaan SILPA yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu sebesar (Rp.4.806.514.549,84).

VI.1.5.2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan merupakan akun untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Ternate yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus anggaran. Pada Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kota Ternate tidak menganggarkan Pengeluaran Pembiayaan.

VI.1.6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Akun Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama Tahun Anggaran 2020.

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020 (audited)		Realisasi 2019 (audited)
		Rp.	%	Rp.
SILPA/SIKPA	(1.628.273.333,00)	(3.530.847.212,58)	216,85	(6.884.296.384,80)
J u m l a h	(1.628.273.333,00)	(3.530.847.212,58)	216,85	(6.884.296.384,80)

SILPA untuk Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar (Rp. 1.628.273.333,00) dan direalisasikan sebesar (Rp. 3.530.847.212,58) atau 216,85%.

VI.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019.

VI.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal adalah Saldo Anggaran Lebih pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019. Saldo Anggaran Lebih awal Tahun 2020 adalah sebesar (Rp. 4.806.514.549,84).

VI.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan adalah sebesar Saldo Anggaran Lebih Tahun 2019 yang digunakan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, yaitu sebesar (Rp. 4.806.514.549,84).

VI.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Ternate pada Tahun Anggaran 2020 menghasilkan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) sebesar (Rp. 3.530.847.212,58).

PENJELASAN POS-POS NERACA

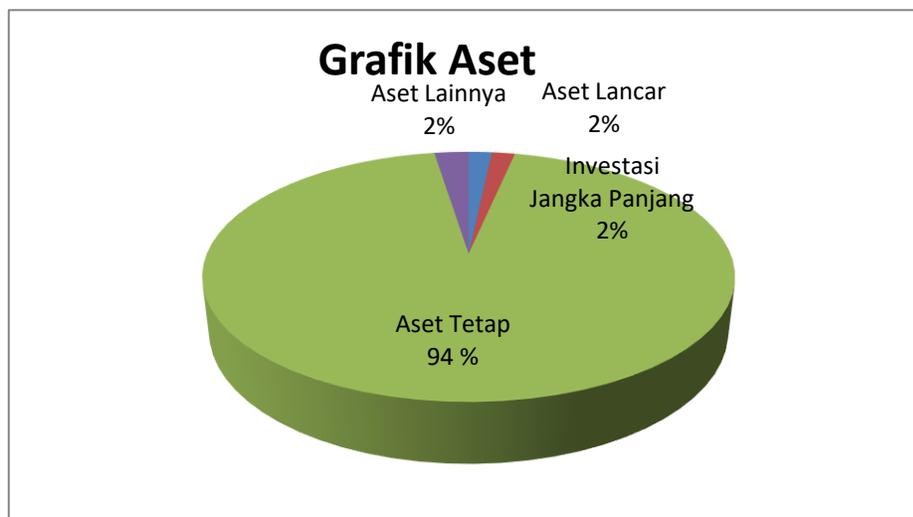
VI.3. ASET

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset Pemerintah Kota Ternate terbagi dalam:

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2020	Saldo 31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan	
		(Rp)	(Rp)	Jumlah	%
1	Aset Lancar	30.211.861.888,68	30.667.578.477,07	(455.716.588,39)	(1.51)
2	Investasi Jangka Panjang	57.896.703.796,80	58.871.704.161,51	(975.000.364,71)	(1.66)
3	Aset Tetap	2,449,905,961,395.74	2,328,875,007,026.74	121,030,954,369.00	5.20
4	Aset Lainnya	64.403.640.619,96	63.627.498.505,67	776.142.114,29	1.21
Jumlah		2.602.418.167.701,18	2.482.041.788.170,99	120.376.379.530,19	4,85

Berdasarkan rincian Aset di atas terlihat bahwa secara umum terjadi peningkatan Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota sebesar Rp120.376.379.530,19 atau 4,85%. Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Ternate sebagian besar terdiri dari Aset Tetap, yaitu 94,13% dari keseluruhan Aset yang dimiliki. Berikut komposisi Aset Kota Ternate.

**Grafik VI.4. Komposisi Aset Pemerintah Kota Ternate
Per 31 Desember 2020**



VI.3.1. Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki atau untuk dijual kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Ternate pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:

No	Uraian	Saldo 31 Des. 2020	Saldo 31 Des. 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		(Rp)	(Rp)	
1	Kas dan Setara Kas	2,433,047,993.06	4,562,837,822.82	(2,129,789,829.76)
	a. Kas di Kas Daerah	48,237,857.42	497,494,798.33	(449,256,940.91)
	b. Kas di Bendahara Pengeluaran	1,036,132.00	-	1,036,132.00
	c. Kas di Bendahara Penerimaan	-	1,004,913,000.00	(1,004,913,000.00)
	d. Kas BLUD	442,791,289.88		
	e. Kas di FKTP	946,255,465.02	2,320,806,457.16	(1,374,550,992.14)
	f. Kas Dana Bos	33,301,183.29	28,641,007.32	4,660,175.97
	g. Kas Lainnya	961,426,065.45	710,982,560.01	250,443,505.44
2	Piutang	20,282,751,206.00	14,740,991,500.61	5,541,759,705.39
	a. Piutang Pendapatan	29,944,506,021.66	25,417,214,727.54	4,527,291,294.12
	b. Piutang Lainnya	1,677,614,752.00	582,337,000.00	1,095,277,752.00
	c. Penyisihan Piutang	(11,339,369,567.66)	(11,258,560,226.93)	(80,809,340.73)
3	Beban Dibayar Dimuka	68,106,849.31	61,779,773.94	6,327,075.37
4	Persediaan	7,427,955,840.31	11,301,969,379.70	(3,874,013,539.39)
	Jumlah	30,211,861,888.68	30,667,578,477.07	(455,716,588.39)

VI.3.1.1. Kas di Kas Daerah

Kas dalam Kas Daerah berada dibawah penguasaan BUD yang disimpan pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Saldo Kas di Kas Daerah terdiri dari Penerimaan dan Pendapatan Daerah, penyetoran Pengembalian sisa uang persediaan, penerimaan pembiayaan, dan penerimaan perhitungan pihak ketiga.

Saldo kas di Kas Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 masing- masing sebesar Rp.48,237,857.42,- dan Rp.497.494.798.33 meliputi uang kas yang ada di bendahara umum daerah selaku pemegang kas daerah dalam bentuk rekening giro dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Bank	Peruntukan Rekening	No. Rekening	Saldo Tahun 2020	Saldo Tahun 2019
1	Bank Maluku Malut	RKUD	601022001	-	-
2	Bank Maluku Malut	Pengeluaran	601002034	-	-
3	Bank Maluku Malut	Penerimaan	601002024	-	-
4	Bank Maluku Malut	Deposit	601022001	-	-
5	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	Gaji	11100103	-	-
6	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	Rek RKUD	9912300011100100	-	493,702,059.33
7	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	Deposito	111000103	-	-
8	Bank Pembiayaan Rakyat Modern	Deposito	5111100090	-	-
9	Bank Rakyat Indonesia	Penerimaan	10301001765308	-	-
10	Bank Rakyat Indonesia	Deposito	10301001765308	-	-
11	Bank Rakyat Indonesia	Pembiayaan	10301002007305	-	-
12	Bank Rakyat Indonesia	PBB	10301001766304	-	-
13	Bank Maluku Malut	Returan SP2D	0601002044	-	-
14	Bank Negara Indonesia	Penerimaan (PPJ)	86130053	6,194,278.00	3,792,739.00
15	Bank Syariah mandiri	Penerimaan	7373737458	5,556,642.52	
16	Rekening Penerimaan PFK BPRS	Penerimaan	11100238	36,486,936.90	
Jumlah				48,237,857.42	497,494,798.33

VI.3.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo sisa kas belanja yang belum disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah sampai dengan akhir periode akuntansi. Sisa Kas per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp1.036.132,00 dan Rp0,00 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut.

No	OPD	Saldo 31 Des. 2020	Saldo 31 Des. 2019
		(Audited)	(Audited)
		(Rp)	(Rp)
1	Dinas Kebakaran	1,000,000.00	0.00
2	BP2RD	36,132.00	0.00
Jumlah		1,036,132.00	

VI.3.1.3. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo pada Bendahara Penerimaan yang berasal dari penerimaan pendapatan daerah yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2020. Kas di kas Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp.234.463,00 dan Rp.1.004.913.000,00. Saldo tersebut merupakan saldo setoran Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

VI.3.1.4. Kas Di BLUD

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp.442.791.289,88 dan Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama FKTP	Saldo Awal 2020	Pendapatan	Belanja	Saldo Akhir 2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Puskesmas Kalumata	469,111,623.81	860,271,689.32	1,039,323,193.30	290,060,119.83
2	Puskesmas Kalumpang	273,978,767.82	453,870,203.02	575,117,800.79	152,731,170.05
JUMLAH		743,090,391.63	1,314,141,892.34	1,614,440,994.09	442,791,289.88

VI.3.1.5. Kas di FKTP

Kas di FKTP merupakan kas yang berada dalam penguasaan Bendahara JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), yaitu Puskesmas, yang berasal dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diterima dari BPJS Kesehatan. Pengelolaan dana kapitasi tersebut dilaksanakan oleh Bendahara JKN masing-masing Puskesmas untuk melaksanakan pelayanan kesehatan. BPJS Kesehatan membayarkan dana kapitasi tersebut langsung ke Puskesmas atau tidak melalui Kas Daerah

Saldo Kas di FKTP per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp946.255.465,02 dan Rp2.320.806.457,16,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama FKTP	Saldo Awal 2020	Pendapatan	Belanja	Saldo Akhir 2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Puskesmas Siko	544,306,052.90	757,281,524.80	915,255,829.00	386,331,748.70
2	Puskesmas Sulamadaha	104,623,370.64	329,113,700.00	349,592,579.00	84,144,491.64
3	Puskesmas Gambesi	54,163,129.37	271,357,103.31	322,883,479.00	2,636,753.68
4	Puskesmas Kota	358,661,123.57	426,010,800.00	582,866,217.20	201,805,706.37
5	Puskesmas Jambula	112,208,142.51	265,039,700.00	336,302,205.00	40,945,637.51
6	Puskesmas Mayau	61,772,054.62	166,207,068.13	186,545,918.03	41,433,204.72
7	Puskemas Hiri	117,451,382.60	187,477,453.64	253,251,764.00	51,677,072.24
8	Puskesmas Perawatan Moti	224,530,809.32	298,071,800.00	401,961,614.03	120,640,995.29
9	Puskesmas Bahari Berkesan	-	46,797,654.87	30,157,800.00	16,639,854.87
JUMLAH		1,577,716,065.53	2,747,356,804.75	3,378,817,405.26	946,255,465.02

VI.3.1.6. Kas di Bendahara Bos

Kas di Bendahara BOS merupakan kas yang berada dalam penguasaan Bendahara BOS di SD dan SMP. Dana BOS diterima sekolah dari Pemerintah Pusat melalui Kas Daerah Pemerintah Provinsi, tidak melalui Kas Daerah Kabupaten/Kota. Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp33.301.183,29 dan Rp28.641.007,32. Rincian Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2020 dan 2019 tersebut sebagai berikut:

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR PER 31 DES 2019
1	SDN SE-KOTA TERNATE	16,595,458.12	13,404,921,109.33	13,403,430,818.08	18,085,749.37
2	SMPN SE-KOTA TERNATE	12,045,549.20	6,809,552,598.64	6,806,382,713.92	15,215,433.92
JUMLAH		28,641,007.32	20,214,473,707.97	20,209,813,532.00	33,301,183.29

Jumlah sekolah penerima Dana BOS Tahun 2020 dan 2019 sebanyak 98 sekolah terdiri dari 83 SD dan 15 SMP. Rincian Saldo Kas Dana BOS SD dan SMP per 31 Desember 2020 dan 2019 dapat dilihat pada Lampiran 1.

VI.3.1.7. Kas Lainnya

Kas lainnya merupakan kas dari utang PFK yang belum disetor sampai dengan akhir periode akuntansi. Saldo kas lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp961.426.039.45 dan Rp710.982.560.01. Saldo PFK tersebut merupakan saldo PFK Dana Kelurahan dan Dana BOS yang belum disetorkan per 31 Desember 2020 dan 2019. Rincian Utang PFK 2020, sebagai berikut:

NO	SKPD	Saldo 31 Des 2020	Saldo 31 Des 2019
1	Dinas Pendidikan	115,247,575.00	9,510,837.00
2	Kec. Ternate Utara	98,204,247.00	1,102,088.00
3	Kec. Ternate Tengah	88,759,059.00	27,272,726.00
4	Kec. Ternate Selatan	315,912,373.44	313,864,498.00
5	Kec. Pulau Ternate	-	1,367,565.00
6	Kec. Pulau Moti	221,028,180.01	108,831,586.01
7	Kec. Pulau Hiri	117,729,149.00	107,979,154.00
8	Kec. Ternate Barat	4,545,456.00	141,054,106.00
JUMLAH		961,426,039.45	710,982,560.01

Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan merupakan tagihan pendapatan daerah kepada pihak ketiga (Wajib Pajak Daerah, Wajib Retribusi dan lain-lain) yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (Dua Belas) bulan kedepan. Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp29.582.979.587,66 dan Rp25.999.551.727,54 Rincian Piutang Pendapatan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo 31 Des 2020	Saldo 31 Des 2019
		(Rp)	(Rp)
1	Piutang Pajak	21,012,513,843.00	16,366,554,408.88
2	Piutang retribusi	3,957,840,350.66	1,046,729,433.66
3	Piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah	378.114.000.00	582,337,000.00
4	Piutang bagi hasil Propinsi	4,612,625,394.00	8,003,930,885.00
JUMLAH		29,582,979,587.66	25,999,551,727.54

a. Piutang Pajak

Piutang Pajak merupakan tagihan pajak daerah kepada Wajib Pajak Daerah yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan. Piutang Pajak per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp21.012.513.843.00 dan Rp16.366.554.408,88. Rincian Piutang Pajak, penyisihannya dan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value atau NRV*) per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo 31 Des 2020	Saldo 31 Des 2019
		(Rp)	(Rp)
1	Pajak Hotel	2,172,815,317.00	2,169,110,140.00
2	Pajak Restoran	594,473,984.00	1,437,474,341.00
3	Pajak Hiburan	1,702,665,597.00	-
4	Pajak Reklame	386,804,302.00	305,023,002.00
5	Pajak Mineral Bukan Logam	924,372,663.00	-
6	Pajak Air Tanah	60,184,581.00	66,637,466.00
7	Pajak Bumi dan Bangunan	15,171,197,399.00	12,388,309,459.88
Jumlah Piutang Pajak		21,012,513,843.00	16,366,554,408.88
8	Penyisihan Piutang Pajak	(8.438.238.746,50)	(10,735,195,510.10)
Jumlah Piutang Pajak Netto		12.574.275.096,50	5,631,358,898.78

b. Piutang Retribusi

Piutang Retribusi merupakan tagihan Retribusi Daerah Kepada Pihak ketiga (Wajib Retribusi Daerah) yang di harapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan. Piutang Retribusi Pemerintah Kota Ternate per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp1.225.948.425,50 dan Rp523.364.716,83. Rincian Piutang Retribusi, penyisihannya dan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value atau* NRV) per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

No	OPD	Saldo 31 Des. 2020	Saldo 31 Des. 2019
		(Audited)	(Audited)
		(Rp)	(Rp)
1	Piutang Retribusi Pelayanan pasar (BP2RD)	361,889,433.66	361,889,433.66
2	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah CV.AP(Dinas PUPR)	582,840,000.00	582,840,000.00
3	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah CV.AP(waterboom PT.IT-BP2RD))	544,626,500.00	52,000,000.00
4	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah SPBU Soa Sio	-	50,000,000.00
5	piutang Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan BP2RD)	2,451.896.851,00	-
6	Penyisihan Piutang retribusi	(2.715.304.359,16)	(523,364,716.83)
NRV Piutang Retribusi (Netto)		1.225.948.425,50	523,364,716.83

c. Piutang Lain-lain PAD

Saldo Piutang Lain-lain PAD per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp378.114.000.00 dan Rp832.334.500,00 Piutang Lain-lain PAD per 31 Desember 2020 seluruhnya merupakan piutang dana kapitasi Badan Pengelola Jaminan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Ternate. Piutang Lain-lain PAD tidak dilakukan penyisihan karena piutang tersebut akan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya oleh BPJS.

d. Piutang Bagi Hasil Provinsi

Piutang Bagi Hasil Provinsi merupakan saldo tagihan penerimaan yang bersumber dari Transfer Pemerintah Daerah Lainnya berupa bagi hasil pajak daerah dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Piutang Bagi Hasil Provinsi per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp4.612.626.394,00 dan Rp8.003.930.885,00. Piutang tersebut merupakan jumlah bagi hasil pajak daerah sesuai SK Gubernur tetapi belum diterima sampai akhir periode akuntansi.

VI.3.1.8. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi.

Saldo Bagian Lancar tuntutan ganti rugi netto tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp1.677.614.752.00. Dan Rp186.378.586,00 Dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Kasus	Tgl SKTJM	Sisa Per 31 Des 2020 (Rp)	Pelunasan 2018Rp)	Sisa Per 31 Des 2019 (Rp)
1	Novita Yani	Penggunaan uang belanja TA 2012 utk kepentingan pribadi an, Mantan bendahara Ktr KB	22-Dec-20	0.00	0.00	552,124.00
2	Asian Hi, Rufai	Kehilangan kas pada kec,Hiri Thn 2012	24-Dec-14	16,676,462.00	0.00	16,676,462.00
3	Siti Nur Nelny Teng, SE	Penggunaan uang belanja utk kepentingan pribadi di SKPD Kec, Ternate Tengah	4-May-12	154,050,000.00	0.00	154,050,000.00
4	Leni Marlina Ponto	TGR atas tindak lanjut temuan perjalanan dinas oleh BPK Thn 2011 & 2012 (yg sudah ada SKTJM)	04-Nov-14	8,350,000.00	0.00	8,350,000.00
5	Andi Handoko	-	04-Nov-14	6,750,000.00	0.00	6,750,000.00
Total				185,826,462.00	0.00	186,378,586.00

Nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value atau NRV*) saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo 31 Des. 2020	Saldo 31 Des. 2019
		(Rp)	(Rp)
1	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	1,677,614,752.00	186.378.586,00
2	Penyisihan Bagian Lancar TGR	(185,826,462.00)	(186.378.586,00)
3	NRV Bagian Lancar TGR (Netto)	1,491,788,290.00	0,00

VI.3.1.9. Beban dibayar dimuka

Saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp68.106.849,31 dan Rp61.779.773,94 yang berasal dari beban yang sudah dibayar dan manfaatnya belum seluruhnya di terima dengan rincian sebagai berikut :

NO	SKPD	Uraian	2020	2019
1	Dinas Kesehatan	Beban Jasa Dibayar Dimuka	49,613,698.63	49,863,013.70
2	DP3A	Beban Jasa Dibayar Dimuka	16,150,684.93	10,382,513.66
3	Kecamatan Batang Dua	Beban Jasa Dibayar Dimuka	2,342,465.75	1,534,246.58
JUMLAH			68,106,849.31	61,779,773.94

VI.3.1.10. Persediaan

Pos Persediaan merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kota Ternate dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 1 (satu) tahun.

Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp15.909.607.224,60 dan Rp11.301.969.379,70 terdiri dari Alat Tulis Kantor, Obat-obatan, barang cetakan, bahan kimia, bibit dan barang yang akan diberikan kepada pihak ketiga berupa tanah dan peralatan mesin.

Rincian persediaan tersebut per jenis dan per OPD adalah sebagai berikut:

No	Nama SKPD	2020	2019	Ket
1	Dinas Pendidikan	120,000.00	275,000.00	ATK
2	Dinas Kesehatan	5,271,618,368.75	2,712,678,080.99	Obat-obatan
3	Dinas Kebakaran	9,680,000.00	19,360,000.00	Bahan Kimia
4	Dinas Tenaga Kerja	733,600.00	802,404.00	ATK
5	Dinas Pekerjaan umum PUPR	-	6,689,044,384.29	Brg yg diberikan kpd pihak ketiga
6	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	970,400.00	-	ATK
7	Dinas Kependudukan & Pencatatan sipil	279,398,750.00	149,160,000.00	Brg Cetakan
8	Dinas Pengendalian Kependudukan & KB	912,214,100.00	804,908,517.20	Obat-obatan
9	Dinas Ketahanan Pangan	218,200.00	-	ATK
10	Dinas Perhubungan	-	723,100.00	ATK
11	Dinas komunikasi Informatika & Persandian	-	241,000.00	ATK
12	Dinas Penanaman Modal DPMTSP	36,000,000.00	40,000,000.00	ATK
13	Sekretariat DPRD	598,500.00	1,220,000.00	ATK
14	Inspektorat	1,350,000.00	1,505,000.00	ATK
15	Kecamatan Ternate Tengah	-	123,000.00	ATK
16	Kecamatan Ternate Pulau	-	267,500.00	ATK
17	Kecamatan Pulau Hiri	-	187,500.00	ATK
18	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	763,180.00	1,019,920.00	ATK
19	Dinas Pertanian	-	6,929,798.00	Bibit
20	Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah	5,341,000.00	1,005,000.00	ATK
21	Badan Pengelola pajak & Retribusi Daerah	908,369,741.20	872,461,175.22	Brg Cetakan
22	Dinas Pemuda & olahraga	580,000.00	-	
23	Dinas Kebudayaan		58,000.00	ATK
JUMLAH		7.427.955.840,31	11,301,969,379.70	

Pada Dinas Kesehatan persediaan obat-obatan yang disajikan ke neraca sebesar Rp5.271.618.368,75 namun pada saat dilakukan stock opname persediaan obat terdapat sejumlah obat yang sudah kadaluarsa namun tidak tersaji dalam neraca dengan rincian sebagai berikut :

NO	SATKER	EXP 2020
1	IFK Ternate	396.803.124,00
2	PKM Kota	5.686.775,00
3	PKM Bahari Berkesan	3.377.241,00
4	PKM Kalumpang	5.648.507,00
5	PKM Sulamadaha	2.403.615,00
6	PKM Siko	8.241.115,00
7	PKM Kalumata	10.138.364,00
8	PKM Gambesi	1.491.058,00
9	PKM Jambula	4.857.507,00
10	PKM Hiri	3.157.247,00
11	PKM Mayau	3.267.765,00
12	PKM Moti	9.030.707,00
13	UPTD Diabetes Center	605.782,00
14	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	3.191.160,00
JUMLAH		457.899.967,00

VI.3.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah Investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp57.896.703.796,80 dan Rp58.871.704.161,51 seluruhnya dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

VI.3.2.1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp57.896.703.796,80 dan Rp58.871.704.161,52 Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Saldo 31 Des. 2020 (UnAudited)	Saldo 31 Des. 2018 (Audited)
	(Rp)	(Rp)
PT. Bank Maluku Malut	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
Perusahaan Daerah Air Minum	26.787.687.045,50	28.075.045.657,86
PT. Ternate Bahari Berkesan (Holding Company)	27.609.016.751,58	27.296.658.503,66
JUMLAH	57.896.703.796.80	58.871.704.161,52

Saldo akun ini merupakan akumulasi seluruh penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Kota Ternate sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2020.

- a. Penyertaan Modal Pemerintah Kota Ternate pada PT Bank Maluku Malut sebesar Rp3.500.000.000,00 berdasarkan atas kepemilikan 400 saham (Nomor A BM 0016501 s/d 0016900) yang disetor dari Tahun 2005 s.d 2014 sebagai berikut:

No	Penyertaan Modal PT Bank Maluku Malut	Nilai
		(Rp)
1	Sampai Dengan 2005	500.000.000,00
2	Penambahan tahun 2006	500.000.000,00
3	Penambahan tahun 2007	500.000.000,00
4	Penambahan tahun 2009	500.000.000,00
5	Penambahan tahun 2012	500.000.000,00
6	Penambahan tahun 2013	500.000.000,00
7	Penambahan tahun 2014	500.000.000,00
JUMLAH		3.500.000.000,00

Persentase kepemilikan saham Pemerintah Kota Ternate pada PT Bank Maluku Malut berdasarkan laporan keuangan PT Bank Maluku Malut Tahun 2018 adalah 1,25% atau kurang dari 20%. Sehingga pencatatannya menggunakan metode biaya (*Cost Method*).

- b. Penyertaan Modal Pemerintah Kota Ternate pada PDAM Kota Ternate per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp26.787.687.045.50 dan Rp28.075.045.657,86.

Nilai tersebut berdasarkan pencatatan dengan metode ekuitas (*equity method*) karena persentase kepemilikan Pemerintah Kota Ternate pada PDAM Kota Ternate per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sama sebesar 41,78% atau lebih dari 20% . Penyertaan modal tersebut dalam bentuk aset tetap yaitu aset lainnya, instalasi dan jaringan, bangunan, Gedung dan bangunan, alat angkutan serta dana tunai. Nilai ekuitas PDAM Kota Ternate per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar RpRp64.120.993.695,36 dan Rp67.202.510.712,00 (berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Kota Ternate Tahun 2018 *Audited*). Dengan demikian, nilai penyertaan modal Pemerintah Kota Ternate pada PDAM Kota Ternate dengan menggunakan metode ekuitas adalah:

- Per 31 Desember 2020 : Rp26.787.687.045.50 (Rp28.075.045.657,86,- x 41,78%)
- Per 31 Desember 2019: Rp28.075.045.657,86 (Rp67.202.510.712,67 x 41,78%)

- c. Penyertaan Modal Pemerintah Kota Ternate pada PT Ternate Bahari Berkesan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp.27.609.016.751,58 dan Rp27.306.579.025,34.

Nilai tersebut berdasarkan pencatatan dengan metode ekuitas (*equity method*) karena persentase kepemilikan Pemerintah Kota Ternate pada PT Ternate Bahari Berkesan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar 98,89% atau lebih dari 20%. Nilai ekuitas PT Ternate Bahari Berkesan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp27.609.016.751,58 (berdasarkan laporan Keuangan Tahun 2020) dan Rp27.296.658.503,66 (berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2019) .

Dengan demikian, nilai penyertaan modal Pemerintah Kota Ternate pada PT Ternate Bahari Berkesan dengan menggunakan metode ekuitas adalah:

- Per31 Desember 2020: Rp27.609.016.751,58 (Rp27.830.206.564,00 x 99,21%)
- Per 31 Desember 2019: Rp27.296.658.503,66 (Rp27.515.345.856,00 x 99,21)

PT Ternate Bahari Berkesan didirikan pada tahun 2015, dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 6 Januari 2014 berbentuk Perseroan Terbatas dengan tujuan pendirian adalah :

- Sebagai Perusahaan induk (*Holding Company*) bagi BUMD yang telah dan akan didirikan Pemerintah Kota Ternate.
- Meningkatkan Pendapatan Pemerintah Kota Ternate.
- Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan rakyat Kota Ternate.

Modal dasar PT Ternate Bahari Berkesan berasal dari pemasukan (*inbreng*) saham-saham milik Pemerintah Kota Ternate pada PD Apotik Bahari berkesan, PT BPRS Bahari Berkesan dan PT Alga Kastela Bahari Berkesan.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah *Holding Company* Perseroan Terbatas Ternate Bahari Berkesan ini, maka Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Citra Gamalama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga Aset PD Citra Gamalama menjadi Aset PT Ternate Bahari Berkesan.

VI.3.2. ASET TETAP

Sejak ditetapkannya kewajiban penyusunan neraca sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintah pengakuan/pencatatan, klasifikasi, pengukuran/penilaian, dan penyajian serta pengungkapan aset tetap menjadi fokus akuntansi karena aset tetap memiliki nilai yang signifikan dan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktifitas operasi entitas. Aset tetap di bagi menjadi 6 (enam) klasifikasi, yaitu:

- a. Tanah
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Irigasi dan Jaringan;
- e. Aset Tetap Lainnya; dan
- f. Konstruksi dalam Pengerjaan;

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Ternate maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca per 31 Desember 2020 berdasarkan harga perolehan. Pengakuan aset tetap yang perolehannya dari realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah); dan
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai Aset ekstracountable kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Jumlah Aset Tetap Pemerintah Kota Ternate sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp2.477.414.926.402,57 dengan rincian kelompok Aset Tetap dan Mutasi sebagai berikut :

Jenis Aset	Saldo Per 1 Januari 2020	Penambahan (BM)	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	Saldo 31 Desember 2020
Tanah	1.074.856.940.646,00	6.149.586.820,00	7.732.922.580,00	3.188.186.820,00	1.085.551.263.226,00
Peralatan dan Mesin	274.744.026.269,42	14.945.709.311,00	10.942.412.143,04	10.739.541.287,70	289.892.606.435,75
Gedung dan Bangunan	885.029.612.425,52	59.440.064.040,00	11.629.152.490,00	50.927.672.536,88	905.121.156.418,64
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	987.013.814.984,62	103.763.096.799,00	60.829.190.829,00	72.875.758.933,00	1.078.715.343.679,62
Aset Tetap Lainnya	46.866.589.956,90	562.837.750,00	2.183.586.339,00	593.267.746,04	49.019.746.299,87
Konstruksi Dalam Pengerjaan	173.913.996.350,00	-	98.945.667.414,88	24.392.742.623,00	248.466.921.141,88
	3.442.424.980.632,46	184.796.294.720,00	192.262.931.795,92	162.717.169.946,61	3.656.767.037.201,76
Akumulasi Penyusutan	(1.113.549.973.605,72)			93.310.811.178,30	(1.206.861.075.806,02)
T o t a l	2.328.875.007.026,74	184.796.294.720,00	192.262.931.795,92	256.027.981.124,91	2.449.905.961.395,75
Kemitraan Pihak ke 3	33.356.080.000,00				33.356.080.000,00
Aset Tidak Berwujud	2.155.579.169,00		389.294.000,00	300.613.980,00	2.244.259.189,00
Aset lain-lain	28.115.839.336,67			7.779.229.290,00	20.336.610.046,67
Kas yang dibatasi Penggunaannya	-				-
	63.627.498.505,67	-	389.294.000,00	8.079.843.270,00	55.936.949.235,67
Jumlah Aset	2.392.502.505.532,41	184.796.294.720,00	192.652.225.795,92	264.107.824.394,91	2.505.843.201.653,42

VI.3.1.3.1 Tanah

Tanah yang tercatat dalam Aset Tetap Pemerintah Kota Ternate adalah tanah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Kota Ternate, dan dalam kondisi siap dipakai, tanah diperoleh melalui pembelian dan hibah/donasi, termasuk tanah yang digunakan untuk jalan dan bahu jalan yang sudah ada sebelum terbentuknya pemerintah Kota Ternate. Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap dipakai.

Saldo Tanah per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp1.085.551.263.226,00 dan Rp1.074.856.940.646,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo 31 Des. 2020 (Rp) (Audited)	Saldo 31 Des. 2019 (Rp) (Audited)
1.	TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/G.TEMPAT TINGGAL	11.087.384.000,00	10.692.384.000,00
2.	TANAH UNTUK BANGUNAN GED.PERDAGANGAN/PERUSAHAAN	32.767.056.400,00	32.767.056.400,00
3.	TANAH UNTUK BANGUNAN INDUSTRI	598.400.000,00	598.400.000,00
4.	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	106.796.462.910,00	106.530.062.910,00
5.	TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG SARANA OLAH RAGA	11.868.000.000,00	11.868.000.000,00
6.	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT IBADAH	1.467.524.000,00	1.467.524.000,00
7.	TANAH PERSIL LAINNYA	61.831.300,00	61.831.300,00
8.	TANAH BASAH	6.460.000.000,00	6.460.000.000,00
9.	TANAH KERING	37.405.204.000,00	37.257.204.000,00
10.	TANAH PERKEBUNAN	5.795.850.500,00	5.795.850.500,00
11.	TANAH TANDUS	1.909.919.000,00	1.909.919.000,00
12.	TANAH PERTANIAN	231.847.500,00	231.847.500,00

No.	Uraian	Saldo 31 Des. 2020 (Rp) (Audited)	Saldo 31 Des. 2019 (Rp) (Audited)
13.	TANAH LAPANGAN OLAH RAGA	1.652.000.000,00	452.000.000,00
14.	TANAH LAPANGAN PENIMBUNAN BARANG	125.840.000,00	125.840.000,00
15.	TANAH UNTUK JALAN	851.720.639.866,00	844.035.717.286,00
16.	TANAH UNTUK BANGUNAN AIR	649.834.750,00	649.834.750,00
17.	TANAH UNTUK BANGUNAN INSTALASI	1.071.570.000,00	1.071.570.000,00
18.	TANAH UNTUK BANGUNAN BERSEJARAH	122.500.000,00	122.500.000,00
19.	TANAH UNTUK MAKAM	3.797.934.000,00	2.797.934.000,00
20.	TANAH UNTUK TAMAN	9.361.465.000,00	9.361.465.000,00
21.	TANAH KAMPUNG	600.000.000,00	600.000.000,00
	Total	1.085.551.263.226,00	1.074.856.940.646,00

Mutasi Aset Tetap Tanah selama Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 01-01-2020	Rp	1.074.856.940.646,00
Penambahan Realisasi Belanja Modal Tahun 2020	Rp	6.149.586.820,00
Koreksi Tambah	Rp	7.732.922.580,00
Koreksi Kurang	Rp	(3.188.186.820,00)
Saldo per 31-12-2020	Rp	1.085.551.263.226,00

Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah tersebut sebagai berikut:

a) **Penambahan**

Penambahan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp6.149.586.820,00. Dari jumlah tersebut, yang diakui sebagai penambahan Aset Tetap Tanah sebesar Rp3.086.400.000,00,00 dan yang tidak diakui sebagai penambahan aset tanah sebesar Rp3.063.186.820,00 yang terdiri dari reklasifikasi berkurang sebesar Rp2.075.148.820,00, persediaan (barang habis pakai) sebesar Rp968.038.000,00 dan Ekstrakontable Rp20.000.000,00 Rincian yang tidak diakui sebagai penambahan Aset Tetap Tanah tersebut dapat dilihat pada penjelasan Koreksi Kurang.

b) **Koreksi Tambah**

Koreksi Tambah Aset Tetap Tanah berupa utang belanja sebesar Rp148.000.000,00 adalah penambahan aset tanah yang direncanakan untuk pembangunan kantor PLN di pulau Mayau Kecamatan Batang Dua, dan Hibah dari Pengembang Perumahan sebesar Rp 7.584.922.580,00.

c) **Koreksi Kurang**

Koreksi Kurang Aset Tetap Tanah sebesar Rp3.188.186.820,00 terdiri dari:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
	Reklasifikasi	
(1)	Reklasifikasi berkurang ke jalan irigasi dan jaringan pada Dinas Pariwisata berupa perbaikan fasilitas di pantai Sulamadaha;	593.335.000,00
(2)	Relaksifikasi berkurang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan ke gedung dan bangunan berupa perencanaan pembangunan toko pasar sabi-sabi;	17.600.000,00
(3)	Relaksifikasi berkurang pada Kantor Kecamatan Ternate Utara ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp212.500.000,00 terdiri dari Bangunan Gedung Kantor Rp80.000.000,00 dan Pagar Rp132.500.000,00 dan jalan jaringan, Irigasi	235.795.000,00

No.	Uraian	Nilai (Rp)
	berupa nstalasi sebesar Rp23.295.000	
(4)	Relaksifikasi berkurang pada Kantor Kecamatan Ternate Tengah ke gedung dan bangunan berupa taman di kelurahan Salahuddin sebesar Rp74.408.370,00 dan jalan, jaringan dan irigasi berupa jalan paving blok sebesar Rp23.000.000,00;	97.408.370,00
(5)	Relaksifikasi berkurang pada Kantor Kecamatan Ternate Selatan ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp348.637.450,00 terdiri dari Bangunan Gedung Kantor Rp214.564.000,00 dan Pagar Rp134.073.450,00 dan jalan, jaringan dan irigasi berupa jalan paving blok sebesar Rp89.521.000,00	423.158.450,00
(6)	Reklasifikasi berkurang pada Kantor Kecamatan Pulau yang terdiri dari gedung dan bangunan sebesar Rp74.352.000,00 berupa Taman Baca sebesar Rp54.352.000,00 dan garasi Posyandu Rp20.000.000,00	74.352.000,00
(7)	Relaksifikasi berkurang pada Kantor Kecamatan Moti terdiri dari Bangunan Gedung Kantor Rp85.000.000,00	85.000.000,00
(8)	Relaksifikasi berkurang pada Kantor Kecamatan Hiri Ke Bangunan Gedung Kantor Rp220.250.000,00	220.250.000,00
(9)	Relaksifikasi berkurang pada Kantor Kecamatan Batang Dua berupa bangunan gedung halte sebesar Rp210.750.000,000	210.750.000,00
(10)	Relaksifikasi berkurang pada Kantor Kecamatan Ternate Barat Ke Peralatan dan Mesin berupa Huruf Balok sebesar Rp27.500.000,00 Gedung dan Bagunan berupa Tugu sebesar Rp50.000.000 dan jalan,jaringan dan Irigasi sebesar Rp40.000.000,00	117.500.000,00
	Hibah Keluar	
(11)	Tanah Pemerintah Kota Ternate pada Dinas Kesehatan berupa tanah Gedung Puskesmas Sulamadaha dihibahkan Kepada Kepolisian Daerah Maluku Utara seluas 2.500 meter persegi berdasarkan berita acara serah Terima barang Nomor 593/30/SETDA/2020 dan Nomor B/1887/VII/2020	125.000.000,00
	Koreksi ke Persediaan	
(12)	Koreksi berkurang merupakan persediaan pada Kantor Kecamatan Ternate Utara berupa barang yang diserahkan kepada pengurus masjid yaitu microfon, standing mic dan pakaian panitia Qurban	47.000.000,00
(13)	Koreksi berkurang merupakan persediaan pada Kantor Kecamatan Pulau Ternate berupa renovasi Gedung TPQ kelurahan Foradiahi sebesar Rp75.000.000,00	75.000.000,00
(14)	Koreksi berkurang merupakan persediaan (barang habis pakai) pada Kantor Kecamatan Hiri berupa biaya pemeliharaan kantor lurah Dorari Isa sebesar Rp25.000.000,00	25.000.000,00
(15)	Koreksi berkurang merupakan persediaan (barang yang akan diserahkan kepada pihak lain) pada Kantor Kecamatan Batang Dua berupa pembuatan pagar Lingkungan di kelurahan Tifure dan pantai sagu sebesar Rp240.000.000,00 dan sebesar Rp30.000,000,00 berupa tulisan baja.	270.000.000,00
(16)	Koreksi berkurang merupakan persediaan (barang yang akan diserahkan kepada pihak lain) pada Kantor Kecamatan Ternate Barat berupa pembuatan pagar Lingkungan di kelurahan Sulamadaha, Bula dan Tobololo.	528.038.000,00
	Mutasi antar OPD	
(17)	Koreksi kurang Tanah adalah mutasi keluar dari Kantor Kecamatan Pulau Ternate, Kelurahan Jambula berupa pagar Posyandu Puskesmas Jambula	23.000.000,00

No.	Uraian	Nilai (Rp)
	sebesar Rp23.000.000 ke Dinas Kesehatan (Puskesmas Jambula) berdasarkan Berita Acara Mutasi Barang Milik Daerah Nomor: 904/11-KJ/2020 tanggal 06 September Tahun 2020;	
	Ekstra Kontable	
(18)	Koreksi kurang Tanah pada Kecamatan Ternate Barat, kelurahan Takome berupa Gazebo yang nilai perolehannya sebesar Rp5.000.000,00 per unit, yang masuk dalam klasifikasi Gedung dan Bangunan tetapi tidak memenuhi ketentuan kapaltalisasi Gedung dan Bangunan sebesar Rp10.000.000,00	20.000.000,00
	Total	3.188.186.820,00

Jumlah bidang Tanah Pemerintah Kota Ternate sampai dengan 31 Desember 2020 adalah 1.189 bidang tanah dengan nilai sebesar Rp1.085.551.263.226,00 berupa tanah kosong/lapangan, tanah untuk gedung dan bangunan, tanah untuk konstruksi jalan, tanah irigasi dan tanah sekitar daerah irigasi, yang telah bersertifikat sebanyak 160 bidang tanah, dan yang belum bersertifikat sebanyak 1.029 bidang tanah.

Rincian jumlah bidang tanah bersertifikat dan belum bersertifikat per kecamatan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

o.	Uraian	Jumlah (bidang)	Luas (m2)	Nilai (Rp)
A.	Tanah Bersertifikat			
1.	Pulau Ternate	14 (Bidang)	34.789,00	4.362.901.670,00
2.	Ternate Selatan	32 (Bidang)	53.606,00	13.392.120.810,00
3.	Ternate Utara	38 (Bidang)	74.527,53	18.305.408.850,00
4.	Ternate Tengah	39 (Bidang)	4.159.513,00	40.979.977.487,00
5.	Moti	5 (Bidang)	10.980,00	622.141.000,00
6.	Batang Dua	6 (Bidang)	15.622,00	623.820.000,00
7.	Pulau Hiri	10 (Bidang)	11.130,00	1.092.365.000,00
8.	Ternate Barat	16 (Bidang)	98.898,00	6.160.973.810,00
	Sub total	160 (Bidang)	4.459.065,53	85.539.708.627,00
B.	Tanah Belum Bersertifikat			
1.	Pulau Ternate	55 (Bidang)	279.310,58	21.961.529.053,00
2.	Ternate Selatan	329 (Bidang)	2.604.779,65	223.183.369.210,00
3.	Ternate Utara	202 (Bidang)	14.702.740,82	143.122.258.859,00
4.	Ternate Tengah	242 (Bidang)	49.517.796,93	536.823.190.093,00
5.	Moti	42 (Bidang)	326.316,26	12.418.638.310,00
6.	Batang Dua	52 (Bidang)	274.906,80	11.807.996.480,00
7.	Pulau Hiri	42 (Bidang)	130.834,36	27.816.713.025,00
8.	Ternate Barat	65 (Bidang)	182.946,17	22.746.479.569,00
	Sub total	1.029 (Bidang)	68.019.631,57	999.880.174.599,00
	Total Tanah	1.189 (Bidang)	72.478.697,10	1.085.551.263.226,00

Dalam tahun 2020 terdapat penambahan bukti kepemilikan tanah sebanyak 55 setifikat, dari 55 bukti kepemilikan yang diterbitkan tersebut adalah untuk 47 bidang tanah yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Untuk SD Negeri 46 Kota Ternate, terdiri atas 2 (dua) sertifikat karena tanah tersebut terpisah oleh saluran air, sehingga dianggap 2 (dua) bidang tanah.
2. Untuk SD Negeri 56 dan SD Negeri 41 Kota Ternate, juga masing-masing 2 (dua) sertifikat karena tanah Gedung bangunan kelas dan tanah Gedung Perputakaan terpisah, sehingga dianggap 2 bidang tanah.
3. Untuk jalan Halmahera tercatat 1 (satu) bidang tanah akan tetapi sertifikat yang terbit sebanyak 5 (lima) sertifikat, terdiri dari; sertifikat Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Sertifikat Mesjid Al-Munawwar, sertifikat Stake Park, Taman Loloro dan Taman Lelong.

VI.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lain yang nilainya memenuhi syarat untuk kapitalisasi dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam kondisi siap dipakai, perolehan peralatan dan mesin melalui pembelian dan hibah. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh Pemerintah Kota Ternate melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai sedangkan pengakuan aset peralatan dan mesin dari hibah apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah dalam bentuk berita acara serah terima hibah.

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp289.892.606.435,75 dan Rp274.744.026.269,42 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo 31 Des. 2020 (Rp) (Audited)	Saldo 31 Des. 2019 (Rp) (Audited)
1.	Alat-alat Besar	28.904.735.216,00	28.870.554.716,00
2.	Alat-alat Angkutan	79.280.333.862,00	78.267.214.484,00
3.	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	5.474.634.816,00	4.627.420.935,00
4.	Alat-alat Pertanian	3.653.448.024,00	3.653.448.024,00
5.	Alat-alat Kantot dan Rumah Tangga	82.950.294.122,33	77.073.519.989,33
6.	Alat-alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	6.655.264.106,00	6.348.426.106,20
7.	Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan	12.357.046.894,00	11.000.285.994,00
8.	Alat-alat Laboratorium	26.554.610.495,99	25.763.878.733,66
9.	Alat-alat Persenjataan	100.627.500,00	100.627.500,00
10.	Komputer	40.933.749.595,43	37.019.239.183,43
11.	Alat Eksplorasi	-	-
12.	Alat Pengeboran	-	-
13.	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	-	-
14.	Alat Bantu Eksplorasi	-	-
15.	Alat Keselamatan Kerja	1.220.067.804,00	1.089.517.604,00
16.	Alat Peraga	-	-
17.	Peralatan Proses/Produksi	-	-
18.	Rambu-rambu	1.447.937.000,00	676.681.000,00
19.	Peralatan Olahraga	359.857.000,00	253.212.000,00
	Total	289.892.606.435,75	274.744.026.269,42

Mutasi Peralatan dan Mesin selama Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 01-01-2020	Rp	274.744.026.269,42
Penambahan Realisasi Belanja Modal Tahun 2020	Rp	14.945.709.311,00
Koreksi Tambah	Rp	10.942.412.143,04
Koreksi Kurang	Rp	(10.739.541.287,70)
Saldo Nilai Perolehan per 31-12-2020	Rp	289.892.606.435,75
Akumulasi Penyusutan	Rp	(210.744.904.637,39)
Saldo per 31-12-2020	Rp	79.147.701.798,36

Mutasi Peralatan dan Mesin tahun 2020 terdiri dari:

a) **Penambahan**

Peralatan dan Mesin tahun 2020 yang berasal dari kegiatan belanja modal sebesar Rp14.945.709.311,00. Dari nilai tersebut yang diakui sebagai penambahan aset tetap peralatan dan mesin adalah sebesar Rp12.982.866.450,00 dan tidak diakui sebagai aset tetap peralatan dan mesin adalah sebesar Rp1.962.842.861,00 yang terdiri dari ekstra komptabel (tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap) sebesar Rp450.701.889,00, reklasifikasi berkurang sebesar Rp601.694.000,00, dan persediaan sebesar Rp910.446.972,00.

b) **Koreksi Tambah**

Koreksi Tambah Peralatan dan Mesin sebesar Rp10.942.412.143,04 dengan rincian sebagai berikut:

- Reklasifikasi bertambah aset dari kegiatan belanja modal tahun 2020 sebesar Rp502.846.468,04 terdiri dari:
 - 1) Reklasifikasi bertambah pada Dinas Pendidikan sebesar Rp 49.499.468,04 karena perubahan kodefikasi barang dari Aset Tetap lainnya berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - 2) Reklasifikasi bertambah pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp99.495.000,00 karena perubahan kodefikasi barang dari gedung dan bangunan ke peralatan dan mesin berupa peralatan olahraga;
 - 3) Reklasifikasi bertambah pada Dinas Perhubungan sebesar Rp101.882.000,00 karena perubahan kodefikasi barang dari Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin berupa Rambu-rambu Lalu lintas;
 - 4) Reklasifikasi bertambah pada Dinas Pariwisata sebesar Rp121.220.000,00 karena perubahan kodefikasi barang dari Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin;
 - 5) Reklasifikasi bertambah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp48.675.000,00 karena perubahan kodefikasi barang dari Aset Tetap lainnya ke Peralatan dan Mesin berupa Alat Tenun;
 - 6) Reklasifikasi bertambah pada Kecamatan Pulau Batang Dua sebesar Rp54.575.000,00 karena perubahan kodefikasi barang dari Jalan Irigasi dan Jaringan ke Peralatan dan Mesin berupa alat depot air;

- 7) Reklasifikasi bertambah pada Kecamatan Ternate Barat sebesar Rp27.500.000,00 karena perubahan kodefikasi barang dari Tanah ke Peralatan dan Mesin berupa Huruf Balok.
- Dana Bos pada Dinas Pendidikan sebesar Rp 2.131.200.104,00 yang terdiri dari Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp1.482.973.692,00, Alat Laboratorium sebesar Rp107.136.080,00 dan Komputer sebesar Rp541.090.332,00.
 - Mutasi bertambah sebesar Rp176.550.000,00 dari Sekretariat DPRD ke Sekretariat Daerah berupa Kendaraan Roda Empat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 027/215.1/BAST/SETWAN-KT/VI/2020.
 - Reklas bertambah Barang dan Jasa dari Dana Partisipatif Pembangunan Kelurahan sebesar Rp751.140.000,00 yang terdiri dari:
 - 1) Kecamatan Ternate Utara sebesar Rp215.960.000,00 terdiri dari Alat Angkutan sebesar Rp22.000.000,00, Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp113.135.000,00 dan Komputer sebesar Rp80.825.000,00;
 - 2) Kecamatan Ternate Tengah Sebesar Rp101.610.000,00 terdiri dari Alat Besar Rp1.300.000,00, Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp34.800.000,00 dan Komputer sebesar Rp65.510.000,00;
 - 3) Kecamatan Ternate Selatan Sebesar Rp81.210.000,00 terdiri dari Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp42.645.000,00 dan Komputer sebesar Rp38.565.000,00;
 - 4) Kecamatan Pulau Ternate sebesar Rp89.010.000,00 terdiri dari Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp.20.750.000,00 dan Komputer sebesar Rp68.260.000,00;
 - 5) Kecamatan Moti sebesar Rp10.450.000,00 terdiri dari Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp9.250.000,00 dan Komputer Rp1.200.000,00;
 - 6) Kecamatan Batang Dua sebesar Rp119.500.000,00 terdiri dari Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp24.500.000,00, Alat Studio dan Komunikasi sebesar Rp86.500.000,00 dan Komputer sebesar Rp8.500.000,00;
 - 7) Kecamatan Ternate Barat sebesar Rp133.400.000,00 terdiri dari Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp63.400.000,00, Alat Studio dan Komunikasi sebesar Rp20.500.000,00 dan Komputer sebesar Rp49.500.000,00;
 - Koreksi bertambah Hutang Belanja Tahun 2020 sebesar Rp6.803.538.371,00 terdiri dari:
 - 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp2.466.626.640,00;
 - 2) Dinas Kebudayaan sebesar Rp134.864.000,00;
 - 3) Dinas Kesehatan sebesar Rp2.581.147.831,00;
 - 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp374.138.000,00;
 - 5) Dinas Perhubungan sebesar Rp49.700.000,00;
 - 6) Dinas Komunikasi sebesar Rp58.872.000,00;
 - 7) Sekretariat Daerah sebesar Rp325.529.000,00;

- 8) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp449.929.900,00;
 - 9) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp83.188.000,00;
 - 10) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp279.543.000,00.
- Koreksi pencatatan senilai Rp182.685.000,00 yaitu pembelian Rambu-rambu Lalu lintas pada Dinas Perhubungan Tahun 2019 dan baru diakui pada Tahun 2020.
 - Hibah bertambah pada Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp394.452.200,00 terdiri dari Kendaraan Roda Empat sebesar Rp308.100.000,00 berdasarkan Berita Acara Nomor. 4804/I/PLK.03.03/XX.2016 dan Server sebesar Rp86.352.200,00 berdasarkan Berita Acara Nomor. PK.02.08/514/2019.

c) Koreksi Kurang

Koreksi kurang Peralatan dan Mesin sebesar Rp8.414.264.212,70 dengan rincian sebagai berikut:

- Reklasifikasi berkurang sebesar Rp 601.694.000,00 terdiri dari:
 - 1) Reklasifikasi berkurang pada Dinas Pertanian sebesar Rp212.400.000,00 karena perubahan kodefikasi ke Gedung dan Bangunan berupa sekat ruangan;
 - 2) Reklasifikasi berkurang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp40.000.000,00 karena perubahan kodefikasi ke Aset Lain berupa Software Sempel BPKAD;
 - 3) Reklasifikasi berkurang pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp349.294.000,00 karena perubahan kodefikasi ke Aset Lain berupa Software.
- Mutasi Keluar sebesar Rp176.550.000,00 dari Sekretariat DPRD ke Sekretariat Daerah berupa Kendaraan Roda Empat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 027/215.1/BAST/SETWAN-KT/VI/2020.
- Hibah Keluar belanja modal Tahun 2020 sebesar Rp823.921.800,00 yang terdiri dari:
 - 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp625.921.800,00 terdiri dari Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp129.591.400,00, Alat Laboratorium sebesar Rp113.509.000,00 dan Komputer sebesar Rp382.821.400,00;
 - 2) Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar Rp198.000.000,00 berupa Kendaraan Roda Tiga yang dihibahkan pada masyarakat berdasarkan Berita Acara Nomor. 523/DKP-KT/688/2020 Tanggal 5 Nopember 2020.
- Hibah Hutang belanja Tahun 2020 sebesar Rp496.564.590,00 yang terdiri dari Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp33.204.600,00, Alat Laboratorium sebesar Rp167.271.280,00 dan Komputer sebesar Rp296.088.710,00.
- Belanja Modal Tahun 2020 berupa Persediaan Sebesar Rp910.446.972,00 yang terdiri dari:
 - 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp228.864.472,00 berupa Alat Laboratorium;
 - 2) Dinas Kesehatan sebesar Rp16.652.270,00 berupa Alat Kesehatan;

- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp21.229.000,00 berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - 4) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sebesar Rp135.133.900,00 Terdiri dari Alat Bengkel dan Alat ukur sebesar Rp1.631.300,00 dan Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp133.502.600,00;
 - 5) Dinas Perhubungan sebesar Rp49.700.000,00 berupa Marka Jalan;
 - 6) Dinas Komunikasi sebesar Rp2.552.000 berupa Perlengkapan Dapur;
 - 7) Dinas Pertanian sebesar Rp25.984.330,00 berupa perlengkapan dapur;
 - 8) Sekretariat Daerah sebesar Rp22.605.000,00 terdiri dari Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp16.500.000,00, Alat Studio Komunikasi sebesar Rp957.000,00 dan Komputer Rp.5.148.000,00;
 - 9) Sekretariat DPRD sebesar Rp58.101.000,00 berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga terdiri dari karpet sebesar Rp27.750.500 dan Gordyn sebesar Rp30.350.500;
 - 10) Kecamatan Ternate Selatan sebesar Rp79.625.000,00 berupa alat kantor dan rumah tangga;
 - 11) Kecamatan Pulau Ternate sebesar Rp6.000.000,00 berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga yang terdiri papan nama instansi sebesar Rp3.000.000,00 dan papan struktur kantor sebesar Rp.3.000.000,00;
 - 12) Kecamatan Pulau Batang Dua sebesar Rp264.000.000,00 yakni Alat Angkutan berupa Kendaraan Roda Tiga;
- Koreksi kurang dari extra comptable hutang belanja 2020 pada Dinas Pendidikan berupa Peralatan dan Mesin Tahun 2020 senilai Rp707.447.510,00 yang terdiri dari: Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp676.424.000,00, Alat Laboraturim sebesar Rp19.646.220,00 dan Komputer sebesar Rp11.377.290,00;
 - Koreksi Aset yang tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap (*extracomptable*) Dana BOS sebesar Rp401.850.902,00 berupa alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp393.630.902,00, Alat Laboraturium sebesar Rp3.300.000,00 dan Komputer sebesar Rp4.920.000,00;
 - Koreksi kurang ekstra komptabel Tahun 2020 senilai Rp450.701.889,00 yang terdiri dari:
 - 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp41.669.828,00 terdiri dari Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp17.622.000,00, Alat Laboraturium sebesar Rp17.553.128,00 dan Komputer sebesar Rp6.494.700,00;
 - 2) Dinas Kebudayaan sebesar Rp4.408.800,00 berupa Komputer;
 - 3) Dinas Kesehatan sebesar Rp31.861.199,00 terdiri dari Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp9.024.000,00, Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp20.978.639,00 dan Alat Laboraturium sebesar Rp1.858.560,00;

- 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp829.500,00 berupa Komputer;
 - 5) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp7.919.560,00 terdiri dari Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp1.759.560,00 dan Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp6.160.000,00;
 - 6) Dinas Tenaga Kerja senilai Rp24.616.900,00 berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - 7) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp8.425.702,00 berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - 8) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp147.675.000,00 berupa Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - 9) Dinas Pertanian sebesar Rp86.784.940,00 berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - 10) Sekretariat Daerah senilai Rp10.015.500,00 terdiri dari Alat Angkutan sebesar Rp1.980.000,00, Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp1.595.000,00, Alat Pertanian sebesar Rp1.210.000,00, Alat Studio dan Komunikasi sebesar Rp4.290.000,00, Alat Laboratorium sebesar Rp330.000,00 dan Alat Persenjataan sebesar Rp610.500,00;
 - 11) Sekretariat DPRD sebesar Rp24.129.000,00 berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - 12) Kecamatan Ternate Tengah sebesar Rp9.500.000,00 berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - 13) Kecamatan Pulau Batang Dua senilai Rp18.463.260,00 berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - 14) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp2.722.700,00 berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - 15) Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp31.680.000,00 berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga.
- Koreksi kurang dari hutang belanja Tahun 2019 berupa peralatan mesin senilai Rp2.887.051.900,00 yang terdiri dari:
 - 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp198.577.500,00 berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - 2) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp494.122.500,00 berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - 3) Dinas Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp125.000.000,00 terdiri dari Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp46.182.950,00, Alat Studio dan Komunikasi sebesar Rp5.857.500,00 dan Komputer sebesar Rp72.959.550,00;
 - 4) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.556.401.000,00 berupa Alat-alat Besar;

- 5) Sekretariat Daerah sebesar Rp400.000.000,00 berupa Alat Angkutan;
 - 6) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp112.950.900,00 terdiri dari Alat Angkutan senilai Rp53.200.000,00 dan Alat Kantor dan Rumah Tangga senilai Rp59.750.900,00;
 - 7) Koreksi Kurang Barang Habis Pakai Utang Belanja 2020 Dinas Pendidikan sebesar Rp85.774.166,00 berupa alat Laboratorium;
 - 8) Koreksi Kurang Barang Habis Pakai Dana Bos 2020 Dinas Pendidikan sebesar Rp152.986.480,00 terdiri dari Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp120.548.400,00 dan Alat Laboratorium sebesar Rp32.438.080,00;
- Barang Habis Pakai Utang Belanja 2020 senilai Rp85.774.166,00 pada Dinas Pendidikan berupa Alat Laboratorium;
 - Barang Habis Pakai Dana Bos senilai Rp162.381.480,00 pada Dinas Pendidikan berupa Alat Laboratorium;
 - Koreksi ekstra kompatibel 2019 senilai Rp709.879.003,70 terdiri dari:
 - 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp3.086,70 berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - 2) Dinas Kesehatan sebesar Rp349.704.090,00 terdiri dari Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp689.089,00, Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp3.164.172,00 dan Alat Kedokteran sebesar Rp345.850.829,00;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp81.733.757,00 terdiri dari Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp73.799.107,00 Alat Laboratorium sebesar Rp1.162.650,00 dan Komputer senilai Rp6.772.000,00;
 - 4) Dinas Perumahan rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp4.956.600,00 berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - 5) Dinas Tenaga Kerja senilai Rp25.000.000,00 terdiri dari Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp24.255.000,00 dan Komputer sebesar Rp745.000,00;
 - 6) Dinas Ketahanan Pangan senilai Rp1.837.000,00 berupa Komputer;
 - 7) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil senilai Rp46.623.500,00 berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - 8) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp40.167.372,00 terdiri dari Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp1.080.244,00, Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp20.167.500,00 dan Alat Laboratorium sebesar Rp18.919.628,00;
 - 9) Sekretariat Daerah senilai Rp45.919.800,00 terdiri dari Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp43.155.000,00 dan Komputer sebesar Rp2.764.800,00;
 - 10) Kecamatan Ternate Utara sebesar Rp2.000.000,00 berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga;

- 11) Kecamatan Ternate Tengah senilai Rp7.000.000,00 berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - 12) Kecamatan Ternate Selatan sebesar Rp20.318.000,00 berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - 13) Kecamatan Pulau Ternate senilai Rp7.850.000,00 berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - 14) Kecamatan Pulau Moti sebesar Rp6.215.800,00 berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - 15) Kecamatan Pulau Hiri senilai Rp19.300.000,00 terdiri dari Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp18.775.000,00 dan Komputer sebesar Rp525.000,00;
 - 16) Kecamatan Pulau Batang Dua sebesar Rp18.250.000,00 terdiri dari Alat Angkutan sebesar Rp17.500.000,00 dan Alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp750.000,00;
 - 17) Kecamatan Ternate Barat senilai Rp7.000.000,00 berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - 18) Inspektorat Daerah senilai Rp25.999.995,00 berupa Alat kantor dan rumah tangga.
- Koreksi kurang berupa penghapusan karena penjualan kendaraan bermotor dinas operasional milik Pemerintah Kota Ternate Sebesar Rp2.325.277.075.00 yang terdiri dari:
 - 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp16.485.714.00 berupa Kendaraan Roda Dua;
 - 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp16.600.000,00 berupa Kendaraan Roda Dua;
 - 3) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp251.295.000,00 berupa Kendaraan Roda Empat;
 - 4) Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp196.700.000,00 berupa Kendaraan Roda Empat
 - 5) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp18.500.000,00 berupa Kendaraan Roda Dua;
 - 6) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp95.062.589.000 berupa Kendaraan Roda Dua;
 - 7) Dinas Perhubungan sebesar Rp17.291.500,00 berupa Kendaraan Roda Dua;
 - 8) Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp181.802.000,00 berupa Kendaraan Roda Empat; Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp176.000.000,00 berupa Kendaraan Roda Empat;
 - 9) Sekretariat Daerah sebesar Rp283.427.272,00 berupa Kendaraan Roda Empat;
 - 10) Sekretariat DPRD sebesar Rp681.848.000,00 berupa Kendaraan Roda Empat
 - 11) Kecamatan Ternate Selatan sebesar Rp18.400.000,00 berupa Kendaraan Roda Dua;
 - 12) Kecamatan Pulau Ternate sebesar Rp156.000.000.00 berupa Kendaraan Roda Empat;

- 13) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp215.865.000.00 yang terdiri kendaraan Roda empat senilai Rp182.765.000.00 dan Kendaraan Roda Dua sebesar Rp33.100.000.00.

VI.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika Gedung dan Bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Biaya perolehan Gedung dan Bangunan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan.

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp905.121.156.418,64 dan Rp885.029.612.425,52 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo 31 Des. 2020 (Rp) (Audited)	Saldo 31 Des. 2019 (Rp) (Audited)
1.	Bangunan Gedung	877.760.149.996,20	873.772.000.032,08
2.	Monumen	4.571.652.150,00	4.520.627.150,00
3.	Bangunan Menara	1.077.481.314,64	1.077.481.314,64
4.	Tugu Titik Kontrol/Pasti	21.711.872.957,80	5.659.503.928,80
	Total	905.121.156.418,64	885.029.612.425,52

Mutasi Gedung dan Bangunan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 01-01-2020	Rp	885.029.612.425,52
Penambahan Realisasi Belanja Modal Tahun 2020	Rp	59.390.064.040,00
Koreksi Tambah:	Rp	11.057.262.918,00
Koreksi Kurang:	Rp	(50.355.782.964,88)
Saldo Nilai Perolehan per 31-12-2020	Rp	905.121.156.418,64
Akumulasi Penyusutan	Rp	(393.784.788.609,16)
Saldo Nilai Buku per 31-12-2020	Rp	511.336.367.809,48

Mutasi Gedung dan Bangunan Tahun 2020 terdiri dari:

a) Penambahan

Penambahan Gedung dan Bangunan Tahun 2020 adalah sebesar Rp59.390.064.040,00 diperoleh dari kegiatan Belanja Modal, dari nilai tersebut yang diakui sebagai penambahan aset Gedung dan Bangunan adalah sebesar Rp9.362.995.793,12 sedangkan yang tidak diakui sebagai penambahan Aset sebesar Rp50.027.068.246,88 yang terdiri dari Belanja Hutang yang sudah diakui Tahun 2019 sebesar Rp8.438.008.604,00, Reklasifikasi sebesar Rp41.364.359.642,88 dan Belanja pemeliharaan sebesar Rp224.700.000,00.

b) Koreksi Tambah

Koreksi Tambah Gedung dan Bangunan selama Tahun 2020 sebesar Rp11.057.262.918,00 terdiri dari:

- Koreksi Tambah berupa reklasifikasi Tahun 2020 sebesar Rp6.133.850.645,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Reklasifikasi Penambahan Gedung dan Bangunan yang berasal dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp3.662.373.996,00 pada Dinas Dinas Kesehatan Kota Ternate yang terdiri dari Gedung Instalasi Farmasi Rp1.919.361.772,00 dan Gedung Puskesmas Faudu Rp1.743.012.224,00;
 2. Reklasifikasi Penambahan Gedung dan Bangunan yang berasal dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp277.700.000,00 berupa Sekat Ruangan Rp212.400.000,00 dan Renovasi Gedung BPP Rp65.300.000,00 pada Dinas Pertanian;
 3. Reklasifikasi Penambahan Gedung dan Bangunan yang berasal dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp30.500.000,00 berupa Sekat Ruangan pada Dinas Sosial;
 4. Reklasifikasi Penambahan Gedung dan Bangunan yang berasal dari Aset Tetap Tanah sebesar Rp593.335.000,00, berupa Dipan Pantai Sulamadaha pada Dinas Pariwisata;
 5. Reklasifikasi Penambahan Gedung dan Bangunan yang berasal dari Aset Tetap Tanah sebesar Rp17.600.000,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
 6. Reklasifikasi Penambahan Gedung dan Bangunan yang berasal dari Aset Tetap Tanah sebesar Rp212.500.000,00 yang terdiri dari Taman di Kelurahan Tarau Rp20.000.000,00, Gedung Serbaguna di Kelurahan Dufa-dufa Rp60.000.000,00 dan pembangunan Pagar sebesar Rp132.500.000,00;
 7. Reklasifikasi Penambahan Gedung dan Bangunan yang berasal dari Aset Tetap Tanah sebesar Rp74.408.370,00 berupa Taman pada Kelurahan Salahuddin Kecamatan Kota Ternate Tengah;
 8. Reklasifikasi Penambahan Gedung dan Bangunan yang bersal dari Aset Tetap Tanah sebesar Rp348.637.450,00 pada Kecamatan Ternate Selatan yang terdiri dari Bangunan Gedung Rp214.564.000,00 dan pembangunan Pagar sebesar Rp134.073.450,00;
 9. Reklasifikasi Penambahan Gedung dan Bangunan yang berasal dari Aset Tetap Tanah sebesar Rp74.352.000,00, berupa Rehab Taman Baca sebesar Rp54.352.000 pada Kelurahan Rua dan Pembangunan Teras Posyandu di Kelurahan Kastela sebesar Rp20.000.000 ;
 - 10.Reklasifikasi Penambahan Gedung dan Bangunan yang berasal dari Aset Tetap Tanah sebesar Rp85.000.000,00 pada Kecamatan Pulau Moti berupa Taman di Kelurahan Moti Kota
 - 11.Reklasifikasi Penambahan Gedung dan Bangunan yang berasal dari Aset Tetap Tanah sebesar Rp220.250.000,00 pada Kecamatan Pulau Hiri berupa Rumah Adat Soa;
 - 12.Reklasifikasi Penambahan Gedung dan Bangunan yang berasal dari Aset Tetap Tanah sebesar Rp50.000.000,00 pada Kecamatan Ternate Barat.

13. Reklasifikasi Penambahan Gedung dan Bangunan yang berasal dari Aset Tetap Tanah sebesar Rp176.750.000,00 pada Kecamatan Pulau Batang Dua yang terdiri Halte/Ruang Tunggu Rp103.000.000,00 dan Taman sebesar Rp73.750.000,00;
14. Reklasifikasi Penambahan Gedung dan Banguna yang berasal dari Konstriksi dalam Pengerjaan sebesar Rp310.443.829,00 pada Sekretariat Daerah.
- Koreksi tambah berupa Hutang Belanja Tahun 2020, sebesar Rp4.124.492.273,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Penambahan Gedung dan Bangunan dari Hutang Belanja sebesar Rp907.194.757 pada Dinas Pendidikan berupa Gedung dan Bangunan;
 2. Penambahan Gedung dan Bangunan dari Hutang Belanja sebesar Rp1.576.867.984,00 pada Dinas Kesehatan berupa Pembangunan Pagar Rp45.000.000,00, Rumah Medis Hiri Rp297.614.200,00, lanjutan Puskesmas Kota Tahap II Rp594.203.909,00 dan Penambahan Ruang Puskesmas Mayau Rp640.049.875,00;
 3. Penambahan Gedung dan Bangunan dari Hutang Belanja sebesar Rp570.210.860,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pembangunan Lanjutan Plaza Gamalama Rp63.257.040,00 dan Pembangunan Sport Hall Rp506.953.820,00;
 4. Penambahan Gedung dan Bangunan dari Hutang Belanja sebesar Rp239.871.000,00 pada Dinas Perhubungan berupa Pembangunan Kantor Pelabuhan Sulamadaha Rp139.951.000,00 dan Pembanguna Pos jaga Pelabuhan Semut Rp99.920.000,00;
 5. Penambahan Gedung dan Bangunan dari Hutang Belanja sebesar Rp344.367.500,00 pada Dinas Pariwisata berupa Panggung Kesenian di Kelurahan Sulamadaha;
 6. Penambahan Gedung dan Bangunan dari Hutang Belanja sebesar Rp196.514.000,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa lanjutan Pasar Sabi-sabi;
 7. Penambahan Gedung dan Bangunan dari Hutang Belanja sebesar Rp92.536.172,00 pada Sekretariat Daerah berupa lanjutan Pembangunan Kantor Lurah Tongole;
 8. Penambahan Gedung dan Bangunan dari Hutang Belanja sebesar Rp196.930.000,00 pada Kantor Kecamatan Ternate Barat berupa jalan Paving Block Rp146.800.000,00 dan Pembanguna Teras Kantor Camat Rp50.130.000,00.
 - Koreksi tambah aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp51.000.000,00 merupakan Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan (DPPK) yang terdiri dari:
 1. Kantor Kecamatan Ternate Tengah sebesar Rp12.500.000,00 yakni pada kantor Kelurahan Maliaro berupa Bangunan Garasi/Teras depan Kantor,
 2. Kantor Kecamatan Pulau Hiri sebesar Rp38.500.000,00 yakni pembuatan Pagar Kantor Pertemuan pada kantor Kelurahan Faudu ;

- Koreksi tambah Nilai aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp245.000.000,00 dari belanja Barang dan Jasa Tahun 2020 yang memenuhi kriteria sebagai penambahan Aset berupa Bangunan Posyandu/PKK sebesar Rp160.000.000,00 pada Kelurahan Salero dan sebesar Rp85.000.000,00 pada Kelurahan Moti Kota berupa Bangunan Posyandu.
- Koreksi tamba berupa hibah dari Pihak Ketiga sebesar Rp502.920.000,00 berupa Gedung Tempat Ibadah (Musollah) pada Dinas PUPR Rp200.000.000,00 dan Rp302.920.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup berupa Taman.

c) Koreksi Kurang

Koreksi Kurang nilai Aset Gedung dan Bangunan selama Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp50.355.782.964,88 terdiri dari:

- Koreksi Kurang berupa reklasifikasi pada Tahun 2020 sebesar Rp41.364.359.642,88 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Reklasifikasi sebesar Rp 3.884.680.081,00 pada Dinas Pendidikan dari aset Bangunan dan Gedung ke Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Jalan sebesar Rp113.532.931,00 dan Bangunan MCK sebesar Rp3.771.147.150,00;
 2. Reklasifikasi berkurang sebesar Rp1.497.279.315,00 pada Dinas Kesehatan dari aset Gedung dan Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp1.141.805.843,00 berupa lanjutan Puskesmas Kota, ke Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp355.473.472,00 berupa Bangunan Penguat Tebing/Talud di Area Puskesmas Gambesi sebesar Rp33.319.607,00, Jalan Paving Block Rp182.077.705,00 dan Banguna MCK Rp140.076.160,00;
 3. Reklasifikasi berkurang sebesar Rp33.546.262.390,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari aset Gedung dan Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa lanjutan Pembangunan Sport Hall sebesar Rp1.267.384.550,00 dan Plaza Gamalama sebesar Rp32.278.877.840,00;
 4. Reklasifikasi berkurang Aset Gedung dan Bangunan pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp99.495.000,00 ke peralatan dan Mesin (Peralatan Olahraga);
 5. Reklasifikasi berkurang sebesar Rp121.583.025,00 pada Dinas Perhubungan dari aset Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp101.882.000,00 (Rambu-rambu Lalulintas), ke Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp19.701.025,00 (Jembatan);
 6. Reklasifikasi berkurang Aset Gedung dan Bangunan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp95.595.000,00 ke Aset Tetap Lainnya berupa Aset Renovasi;
 7. Reklasifikasi berkurang sebesar Rp1.521.515.036,88 pada Dinas Pariwisata dari aset Gedung dan Bangunan ke Ke Peralatan dan Mesin senilai Rp121.220.000,00 (Tempat Sampah di Kel Sulamada), ke Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp1.216.080.036,88 (Panggung Kesenian) dan ke Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp184.215.000,00 (bangunan MCK);

8. Reklasifikasi berkurang aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp315.789.000,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan ke Ke Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp119.275.000,00 (Bangunan MCK) dan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp.196.514.000,00 (Bangunan Pasar Sabi-sabi);
 9. Reklasifikasi berkurang aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp62.360.795,00 ke Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Sekretariat Daerah berupa Banguna MCK;
 10. Reklasifikasi berkurang sebesar Rp15.000.000,00 pada Kecamatan Ternate Selatan dari aset Gedung dan Bangunan ke Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Bagunan MCK;
 11. Reklasifikasi berkurang sebesar Rp166.800.000,00 pada Kecamatan Ternate Barat dari aset Gedung dan Bangunan ke Ke Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Paving Block Rp146.800.000,00 dan Bangunan Mck Rp20.000.000,00;
 12. Reklasifikasi berkurang sebesar Rp38.000.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Gedung dan Bangunan ke Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Bangunan MCK;
- Koreksi Kurang Hibah Tahun 2020 pada Gedung dan Bangunan sebesar Rp88.308.000,00 berupa Gedung Puskesmas Sulamadaha sesuai dengan Berita Acara Hibah Nomor 593/30/SETDA/2020 Tanggal 06 Juli 2020:
 - Koreksi Kurang Hutang Belanja pada Tahun 2020 yang telah di akui pada Tahun 2019 sebesar Rp8.438.008.604,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Koreksi kurang gedung dan Bangunan dari Hutang Belanja pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.076.344.428,00;
 2. Koreksi kurang gedung dan bangunan dari hutang belanja sebesar Rp1.070.684.742,00 pada Dinas Kesehatan;
 3. Koreksi kurang gedung dan Bangunan dari Hutang Belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp3.954.038.110,00;
 4. Koreksi kurang gedung dan bangunan dari hutang belanja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp1.210.744.700,00;
 5. Koreksi kurang gedung dan bangunan dari hutang belanja pada Sekretariat Daerah sebesar Rp608.477.170,00;
 6. Koreksi kurang gedung dan bangunan dari hutang belanja pada Bappelitbangda sebesar Rp256.321.454,00;
 7. Koreksi kurang gedung dan bangunan dari hutang belanja pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp261.398.000,00.
 - Koreksi Kurang dari Belanja Modal Tahun 2020 yang tidak memenuhi kriteria sebagai Penambahan Aset Tetap sebesar Rp224.700.000,00 berupa Rehab aula Kantor Kecamatan Pulau Ternate (Pemasangan Plafon dan Pemasangan Walpaper Dinding) Rp74.800.000,00 dan sebesar Rp149.900.000,00 Pada Kecamatan Palau Hiri berupa Rehab Kantor Kecamatan (Cat, Pemasangan Palafon dan Pemasangan Tehel)
 - Koreksi Kurang Belanja Modal Tahun 2019 yang tidak memenuhi Standar

Minimum Satuan Kapitalisasi sebesar Rp12.276.718,00 yang terdiri dari Rp6.276.718,00 berupa Bangunan Pagar pada Kantor Kecamatan Ternate Utara dan Rp6.000.000,00 berupa Flat/Rumah Lain-lain pada Kantor Kecamatan Batang Dua.

VI.3.1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan.

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp1.078.715.343.679,62 dan Rp987.013.814.984,62 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo 31 Des. 2020 (Rp) (Audited)	Saldo 31 Des.2019 (Rp) (Audited)
1.	Jalan dan Jembatan	799.469.953.312,89	731.654.848.694,89
2.	Bangunan Air	215.071.541.952,22	193.749.297.070,22
3.	Instalasi	20.586.433.507,57	18.024.754.312,57
4.	Jaringan	43.587.414.906,94	43.584.914.906,94
	Total	1.078.715.343.679,62	987.013.814.984,62

Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 01-01-2020	Rp	987.013.814.984,62
Penambahan Realisasi Belanja Modal Tahun 2020	Rp	103.748.096.799,00
Koreksi Tambah:	Rp	60.829.190.829,00
Koreksi Kurang:	Rp	(72.875.758.933)
Saldo Nilai Perolehan per 31-12-2020	Rp	1.078.715.343.679,62
Akumulasi Penyusutan	Rp	(602.331.382.559,47)
Saldo per 31-12-2020	Rp	476.383.961.120,15

Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan terdiri dari:

a) Penambahan

Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari pelaksanaan program kegiatan dari belanja modal sebesar Rp103.748.096.799 akan tetapi yang diakui sebagai penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebesar Rp33.295.654.529,00 karena terdapat reklasifikasi bertambah sebesar Rp24.900.356.599,00 dan dana DTT sebesar Rp2.726.582.300,00 dan belanja utang 2020 senilai Rp5.668.715.630,00

b) Koreksi Tambah

Koreksi tambah aset Tahun 2020 sebesar Rp33.295.654.529,00 terdiri dari:

- Reklasifikasi tambah sebesar Rp24.900.356.599,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Reklasifikasi bertambah pada Dinas Pendidikan sebesar Rp3.884.680.081,00 reklas dari gedung dan bangunan ke Jalan Irigasi Dan Jaringan berupa MCK;
 2. Reklasifikasi bertambah pada Dinas Kesehatan Reklas dari Gedung dan Bangunan ke Jalan Irigasi dan Jaringan berupa Talud area puskesmas gembesi Sebesar Rp33.319.607 Dan Jalan/Paving block Sebesar Rp 182.077.705 Dan Sebesar 140.076.160 Berupa MCK
 3. Reklasifikasi bertambah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang sebesar Rp19.848.035.226,00 reklas dari KDP ke Jalan Irigasi dan Jaringan Berupa Jalan
 4. Reklasifikasi bertambah Pada Dinas Perhubungan Sebesar Rp19.701.025,00 Reklas dari Gedung dan Bangunan Ke Jalan Irigasi Dan Jaringan Berupa Jembatan di Pulau Moti kelurahan Tadenas
 5. Reklasifikasi bertambah Pada Dinas Pariwisata Sebesar Rp184.215.000,00 Reklas dari Gedung dan Bangunan pada Ke Jalan Irigasi Dan Jaringan berupa (Bangunan MCK)
 6. Reklasifikasi bertambah Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp119.275.000,00 Reklas dari Gedung Dan Bangunan ke Jalan Irigasi dan Jaringan berupa (Bangunan MCK)
 7. Reklasifikasi bertambah Pada sekretariat Daerah Kota Ternate sebesar Rp62.360.795,00 Reklas Dari Gedung dan Bangunan Ke Jalan Irigasi Dan Jaringan berupa (Bangunan MCK)
 8. Reklasifikasi bertambah pada Kecamatan Ternate Utara sebesar Rp23.295.000,00 Reklas Dari Tanah Ke Jalan Irigasi Dan Jaringan Berupa (Instalasi Listrik)
 9. Reklasifikasi bertambah pada Kecamatan Ternate Tengah sebesar Rp23.000.000,00 Reklas dari Tanah Ke jalan Irigasi Dan Jaringan Berupa (Jalan Setapak)
 10. Reklasifikasi bertambah pada Kecamatan Ternate Selatan sebesar Rp74.521.000,00 reklas dari Tanah Ke Jalan Irigasi Dan Jaringan Berupa Jalan Dan Reklas Dari Gedung Dan Bangunan Sebesar Rp15.000.000,00
 11. Reklasifikasi bertambah pada Kecamatan Batang Dua sebesar Rp 46.000.000,00 Reklas dari Tanah Ke Jalan Irigasi Dan Jaringan Berupa Jalan
 12. Reklasifikasi bertambah pada Kecamatan Ternate Barat sebesar Rp 166.800.000,00 Reklas dari Gedung Dan Bangunan ke Jalan Irigasi dan Jaringan Berupa Jalan dan MCK, Dan Sebesar Rp 40.000.000,00 Reklas Dari Tanah Ke Jalan Irigasi Dan Jaringan Berupa Jalan
 13. Reklasifikasi bertambah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp38.000.000,00 reklas dari gedung dan bangunan ke jalan irigasi dan jaringan berupa Bangunan MCK
- Koreksi tambah dari Hutang Belanja Tahun 2020 sebesar Rp5.668.715.630,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Hutang Belanja pada Dinas Pendidikan sebesar Rp230.344.197,00
 2. Hutang Belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang sebesar Rp3.922.282.365,00 berupa Bangunan Penguat Tebing
 3. Hutang Belanja pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.055.426.738,00 berupa IPAL
 4. Utang Belanja pada Dinas Perhubungan sebesar Rp272.349.800,00
 5. Utang Belanja pada Kecamatan Ternate Utara sebesar Rp71.062.530,00 berupa Instalasi PLTS
 6. Utang Belanja Kecamatan Ternate Barat sebesar Rp25.000.000,00 berupa Bangunan Penguat Tebing
 7. Utang Belanja pada Dinas Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp92.250.000,00 berupa Bangunan Penguat Tebing.
- Koreksi tambah belanja Dana Tidak Terduga (DTT) Tahun 2020 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp2.726.582.300,00 berupa bangunan air/irigasi yakni pembangunan talud penahan tanah.
 - Koreksi tamba berupa hibah dari Pihak Ketiga sebesar Rp27.518.536.300,00 yang tercatat pada Dinas PUPR sebesar Rp27.481.036.300,00 berupa Jalan Rp22.066.670.000,00, Saluran Rp4.698.845.000,00 talud Rp715.521.300,00 dan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp37.500.000,00 berupa Jaringan Listrik.

Koreksi Kurang aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2020 sebesar Rp72.875.758.933,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Koreksi berkurang Barang dan Jasa sebesar Rp468.191.000,00 yang terdiri dari:
 1. Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp294.250.000,00 Berupa Survei Kondisi Jalan
 2. Belanja Barang dan Jasa pada Kecamatan Ternate Utara sebesar Rp1.000.000,00
 3. Belanaj Barang dan Jasa pada Kecamatan Ternate Pulau sebesar Rp95.000.000,00 Berupa Renovasi Bangunan Air
 4. Belanja Barang dan Jasa pada Kecamatan Pulau Batang Dua sebesar Rp77.941.000,00 Berupa Istalasi Air Bersih
- Koreksi berkurang karena Reklasifikasi sebesar Rp62.339.690.573,00 yang terdiri dari:
 1. Reklas Berkurang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp62.273.115.573,00 Reklas Ke KDP Berupa Jalan
 2. Reklas berkurang pada Kecamatan Pulau Batang Dua sebesar Rp54.575.000 rekla ke alat kantor dan rumah tangga berupa alat dep air dan sebesar Rp12.000.000 reklas ke Gedung dan Bangunan berupa bangunan depot air
- Koreksi berkurang karena Kesalahan Pencatatan Dari Dinas Pendididkan Sebesar Rp11.000,00 Berupa Bak Kontrol Kelurahan Kasturyan

- Koreksi Kurang Belanja Utang Tahun 2019 sebesar Rp10.067.866.360,00 yang terdiri dari:
 1. Belanja Utang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang sebesar Rp9.887.365.050;
 2. Belanja Utang pada Dinas Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp180.501.310,00.

VI.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp49.019.746.299,87 dan Rp46.866.589.956,90 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	Saldo 31 Des. 2020 (Rp) (Audited)	Saldo 31 Des. 2019 (Rp) (Audited)
1.	Bahan Perpustakaan	28.278.743.023,97	26.390.460.430,10
2.	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	305.426.000,00	305.426.000,00
3.	Hewan	-	-
4.	Biota Perairan	-	-
5.	Tanaman	764.975.870,00	695.497.120,00
6.	Barang Koleksi Non Budaya	-	-
7.	Aset Tetap Dalam Renovasi	19.670.601.405,90	19.475.206.405,90
	Total	49.019.746.299,87	46.866.589.956,90

Mutasi Aset Tetap Lainnya selama Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 01-01-2020	Rp	46.866.589.956,90
Penambahan Realisasi Belanja Modal Tahun 2020	Rp	562.837.750,00
Koreksi Tambah	Rp	2.183.586.339,00
Koreksi Kurang	Rp	(593.267.746,04)
Saldo Nilai Perolehan per 31-12-2020	Rp	49.019.746.299,86

Mutasi Aset Tetap Lainnya terdiri dari:

a) Penambahan

Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Pelaksanaan kegiatan belanja modal Tahun 2020 senilai Rp562.837.750,00 yang diakui sebagai penambahan aset tetap lainnya sebesar Rp128.719.281,96 dan yang tidak diakui sebagai penambahan aset sebesar Rp434.118.468,04 merupakan dari relaksifikasi berkurang sebesar Rp185.034.468,04 dan persediaan (barang habis pakai) sebesar Rp249.084.000,00.

b) Koreksi Tambah

Koreksi tambah Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.183.586.339,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Reklasifikasi bertambah dari Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap dalam Renovasi sebesar Rp95.595.000,00 pada Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu;
- Koreksi Bertambah dari Hutang Belanja Tahun 2020 sebesar Rp497.540.802,00 pada Dinas Pendidikan berupa Buku-buku Perpustakaan;
- Koreksi tambah berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp1.590.450.537,00 berupa Buku-buku Perpustakaan pada Dinas Pendidikan.

c) Koreksi Kurang

Koreksi kurang Aset Tetap Lainnya sebesar Rp593.267.746,04 dengan rincian sebagai berikut:

- Koreksi kurang persediaan sebesar Rp249.084.000,00 berupa tanaman dan bibit tanaman Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- Koreksi kurang berupa Relaksifikasi sebesar Rp193.974.468,04 yang terdiri dari :
 1. Reklasifikasi berkurang sebesar Rp65.300.000,00 berupa Renovasi gedung Kantor Balai Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian;
 2. Relaksifikasi berkurang sebesar Rp48.675.000,00 berupa alat tenun pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 3. Relaksifikasi berkurang sebesar Rp30.500.000,00 berupa sekat ruangan pada Dinas Sosial, dan
 4. Reklasifikasi berkurang sebesar Rp49.499.468,04 pada Dinas Pendidikan berupa Lemari/Rak Buku.
- Koreksi Kurang berupa Hibah ke Sekolah Swasta sebesar Rp149.909.278,00 pada Dinas Pendidikan berupa Buku-buku Perpustakaan.
- Koreksi Kurang pada Dinas Pendidikan sebesar Rp300.000,00 berupa barang persediaan.

VI.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp248.466.921.141,88 dan Rp173.913.996.350,00 dengan rincian sebagai berikut.

No.	OPD	Nama KDP	Keterangan	Saldo 31 Des. 2020 (Rp) (Audited)	Saldo 31 Des. 2019 (Rp) (Audited)
1.	Dinas Pekerjaan Umum	Sport Hall Kelurahan Ubo-Ubo Sumber Dana : (APBD)	-Kontrak Nomor: 600/130/SP/DPU-PR/KT/2018. Tgl. 02/08/2018 Nilai kontrak Rp 27.740.277.000,00 Jk. Waktu 380 hari (02/08/2018 s.d 14/08/2019) Progres Fisik 17% Keuangan 100%	27.740.277.000,00	27.740.277.000,00

No.	OPD	Nama KDP	Keterangan	Saldo 31 Des. 2020 (Rp) (Audited)	Saldo 31 Des. 2019 (Rp) (Audited)
			-Kontrak Nomor: 600/3172/SP/DPUPR/KT/2019 Tgl. 26/07/2019 Nilai kontrak Rp 1.574.282.000,00 Jk. Waktu 90 hari (26/07/2019 s.d 23/10/2019) Progres Fisik 62% Keuangan 100%	1.574.282.000,00	1.574.282.000,00
			-Kontrak Nomor: 600/2981/DPUPR/KT/2020 Tgl. 01/10/2020 Nilai Kontrak Rp 2.668.178.000,00 Jk. Waktu 90 HK (01/10/2020 s.d. 29/12/2020) Progres Fisik 80% Keuangan 50%	1.267.384.550,00	
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan - Penunjang Lainnya	422.840.000,00 374.660.000,00 113.715.000,00	422.840.000,00 374.660.000,00 113.715.000,00
			Total	31.493.158.550,00	30.225.774.000,00
2.	Dinas Pekerjaan Umum	Pasar Modern Gamalama Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah Sumber Dana: (APBD)	-Kontrak Nomor: 600/3434/DPU-PR/KT/2017 Tgl.14-Jul- 2017 Nilai kontrak Rp.19.757.600.000,00 Jk. Waktu160 hari (14/07 2017 s/d 20/12/ 2017 Progres Fisik 27% Keuangan 100%	19.757.600.000,00	19.757.600.000,00
			- Kontrak Nomor: 600/5709/DPU-PR/KT/2018. Tgl. 10 Oktober 2018 Nilai kontrak Rp.3.438.569.000,00	3.438.569.000,0	3.438.569.000,0
			Jk. Waktu 80 hari (10/10/2018 s/d 28/12/2018 Progres Fisik 34% Keuangan 100%	-	-
			- Kontrak Nomor: 600/4666/DPUPR/KT/2019 Tgl. 14- Oct-2019 Nilai kontrak Rp.69.357.036.000,00 Jk. Waktu 485 hari (14/10/2019 s/d 09/02/2021) Progres Fisik 97% Keuangan 57,84%	42.500.000.000,00	10.403.555.400,00
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan - Penunjang Lainnya	1.236.897.000,00 664.498.240,00 246.420.500,00	1.236.897.000,00 482.065.000,00 246.420.500,00

No.	OPD	Nama KDP	Keterangan	Saldo 31 Des. 2020 (Rp) (Audited)	Saldo 31 Des. 2019 (Rp) (Audited)
			Total	67.843.984.740,00	35.565.106.900,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum	Revitalisasi Rumah Jabatan Walikota Menjadi Museum Timur Barat Sumber Dana: (APBD)	-Kontrak Nomor: 600/3048/DPUPR/KT/2019 Tgl. 22 Juli 2019 Nilai kontrak Rp.1.474.517.000,00 Jk. Waktu 150 hari (22/07/2019 s/d 18/12/2019) Progres Fisik 100% Keuangan 100%	1.474.517.000,00	1.474.517.000,00
			Biaya atribusi:		
			- Perencanaan	60.885.000,00	60.885.000,00
			- Pengawasan	41.222.000,00	41.222.000,00
			- Penunjang Lainnya	39.000.000,00	39.000.000,00
			Total	1.615.624.000,00	1.615.624.000,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum	Pembangunan Jalan Baru Salero-Dufa-Dufa/Reklamasi Sumber Dana: (APBD)	- Kontrak Nomor: 600/3478/SP/TR/DPUPR-KT/2018. Tgl. 10 Juli 2018 Nilai kontrak Rp 748.000.000,00 Jk. Waktu 150 hari (10/07/2018 s.d 12/12/2018) Progres Fisik -% Keuangan 100%	748.750.000,00	748.750.000,00
			- Kontrak Nomor: 600/4870.a/SP/TR/DPU-PR/Kota-Tte/2019 Tgl. 24 Oktober 2019 Nilai Kontrak Rp. 29.558.807.000 Jk. Waktu 360 hari (24/10/2019 s/d 18/10/2020)	14.722.000.000,0	8.472.000.000,0
			Progres Fisik 100% Keuangan 43,51%	-	-
			Biaya atribusi:		
			- Perencanaan	248.600.000,00	248.600.000,00
			- Pengawasan	98.780.000,00	98.780.000,00
			Total	15.818.130.000,00	9.568.130.000,00
5.	Dinas Pekerjaan Umum	Reklamasi Kawasan Kayu Merah - Kalumata Sumber Dana: (APBD)	- Kontrak Nomor: 600/3919/SP/TR/DPU-PR/KT/2017 Tgl. 02-Aug-2017 Nilai kontrak Rp 34.734.000.000,00 Jk. Waktu 360 hari (02/08/2017 s/d 28/07/ 2018) Progres Fisik 26% Keuangan 100%	35.233.576.000,00	35.233.576.000,00
			- Kontrak Nomor: 600/2378/DPUPR/Kota-Tte/2019 Tgl. 19 Juni 2019 Nilai kontrak Rp 199.820.000,00 Jk. Waktu 150 hari (19/06/2019 s/d 20/11/ 2019)	192.320.000,00	192.320.000,00

No.	OPD	Nama KDP	Keterangan	Saldo 31 Des. 2020 (Rp) (Audited)	Saldo 31 Des. 2019 (Rp) (Audited)
			Progres Fisik -% Keuangan 100%		
			- Kontrak Nomor: 600/4869/SP/TR/DPU-PR/Kota Tte/2019 Tgl. 24 Oktober 2019 Nilai Kontrak Rp 68.354.760.284,00 Jk. Waktu 360 hari (24/10/2019 s/d 18/10/2020) Progres Fisik 52% Keuangan 100%	35.500.000.000,00	10.253.214.043,00
			- Kontrak Nomor: 600/5154/SP/TR/DPU-PR/Kota- Tte/2019 Tgl. 11 November 2019 Nilai Kontrak Rp 34.724.000.717 Jk. Waktu 360 hari (11/11/ 2019 s/d 10/11/2020) Progres Fisik 100% Keuangan 79,85%	27.347.560.136,00	5.000.000.000,00
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan - Penunjang Lainnya	1.066.169.330,00 495.244.200,00 14.375.001,00	1.066.169.330,00 295.537.000,00 14.375.001,00
			Total	99.849.244.667,00	52.055.191.374,00
6.	Dinas Pekerjaan Umum	Peningkatan Jalan Lapen ke Hotmix Jalan Keliling Pulau Moti Sumber Dana: (APBD)	-Kontrak Nomor : 600/4544/SP/BM/DPU-KT/2016, Tgl.29 JULI 2016 Nilai Kontrak Rp. 2.951.900.000 Jk. Waktu 120 hari (29/07/2016 s.d 24/11/2016) Progres Fisik 9% Keuangan 100%		2.951.900.000,00
			-Kontrak Nomor : 620/4738/SP/BM/DPUPR-KT/2018 Tgl. 30 Agustus 2018 Nilai Kontrak Rp. 3.446.815.000 Jk. Waktu 120 hari (30/08/2018 s.d 27/12/2018) Progres Fisik 27% Keuangan 100%		3.446.815.001,00
			-Kontrak Nomor : 600/2119/BM/DPUPR/KT/2019 Tgl. 24 Mei 2019 Nilai Kontrak Rp. 4.711.086.000 Jk. Waktu 210 hari (24/05/2019 s/d 20/12/2019) Progres Fisik 100% Keuangan 100%		3.945.534.525,00
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan		247.714.000,00 24.340.000,00

No.	OPD	Nama KDP	Keterangan	Saldo 31 Des. 2020 (Rp) (Audited)	Saldo 31 Des. 2019 (Rp) (Audited)
			- Penunjang Lainnya		269.884.100,00
			Total	-	10.886.187.626,00
7.	Dinas Pekerjaan Umum	Revitalisasi Kawasan Terminal Gamalama (Jl. Terminal Baru Gamalama) Sumber Dana: (APBD)	-Kontrak Nomor: 600/4626/SP/TR/DPUPR/KOTA- TTE/2019 Tgl. 10 Oktober 2019 Nilai kontrak Rp.3.486.201.000 Jk. Waktu 70 hari (10/10/2019 s/d 18/12/2019) Progres Fisik 25% Keuangan 100%	3.486.201.000,00	3.486.201.000,00
			-Kontrak Nomor: 600/316/SP/TR/DPUPR/Kota- Tte/2020 Tgl. 29 Januari 2020 Nilai kontrak Rp4.930.206.000,00 Jk. Waktu 180 hari (29/01/2020 s/d 28/07/2020) Progres Fisik 58% Keuangan 100%	4.930.206.000,00	
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan - Penunjang Lainnya	97.845.000,00 178.282.280,00 14.250.000,00	97.845.000,00 49.445.000,00 14.250.000,00
			Total	8.706.784.280,00	3.647.741.000,00
8.	Dinas Pekerjaan Umum	Revitalisasi Kawasan Makassar Timur Sumber Dana: (APBD)	-Kontrak Nomor : 600/3348/SP/TR/DPUPR/KOTA- TTE/2019 Tgl. 06 Agustus 2019 Nilai kontrak Rp.3.351.767.000 Jk. Waktu 120 hari (06/08/2019 s/d 04/12/2019) Progres Fisik 54% Keuangan 100%		3.351.767.000,00
			-Kontrak Nomor : 600/913/SP/DPUPR/KOTA-TTE/2020 Tgl. 11 Maret 2020 Nilai kontrak Rp2.943.283.000,00 Jk. Waktu 180 hari (11/03/2020 s/d 10/09/2020) Progres Fisik 100% Keuangan 100%		
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan - Penunjang Lainnya		79.000.000,00 38.984.000,00 95.179.000,00
			Total	-	3.564.930.000,00
9.	Dinas Pekerjaan Umum	Peningkatan Jalan Ternate Utara (DAK Jalan) Sumber Dana: (APBD)	-Kontrak Nomor : 600/2437/BM/DPUPR/KT/2019 Tgl. 24 Juni 2019 Nilai kontrak Rp 2.916.360.000 Jk. Waktu 170 hari (24/06/2019 s/d 11/12/2019) Progres Fisik 100% Keuangan 100%		2.333.088.000,00
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan - Penunjang Lainnya		70.826.600,00
			Total	-	2.403.914.600,00

No.	OPD	Nama KDP	Keterangan	Saldo 31 Des. 2020 (Rp) (Audited)	Saldo 31 Des. 2019 (Rp) (Audited)
10.	Dinas Pekerjaan Umum	Pembangunan Ruko Kelurahan Soa Sio (Multy Year) Sumber Dana: (APBD)	-Kontrak Nomor : 600/852/SP/BJK/DPU-KT/2013 Tgl. 01 Agustus 2013 Nilai Kontrak Rp 4.952.400.000,00 Jk. Waktu 500 hari (01/08/2013 s/d 12/12/2014)	1.274.747.760,0	1.274.747.760,0
			Progres Fisik 25,74% Keuangan 25,74%	-	-
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan - Penunjang Lainnya	84.100.000,00 55.555.000,00 10.200.000,00	84.100.000,00 55.555.000,00 10.200.000,00
			Total	1.424.602.760,00	1.424.602.760,00
11.	Dinas Pekerjaan Umum	Air Bersih Kelurahan Foramadiahi Sumber Dana: (APBD)	-Kontrak Nomor : 600/1113.b/SPK/CK/DPU-KT/2015 Tgl. 20-Mei-2015 Nilai Kontrak Rp 171.015.000,00 Jk. Waktu 90 hari (20/05/2015 s/d 18/08/2015) Progres Fisik 63% Keuangan 63%	102.609.000,00	102.609.000,00
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan		
			Total	102.609.000,00	102.609.000,00
12.	Dinas Pekerjaan Umum	Perencanaan Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jembatan Kota Ternate Sumber Dana: (APBD)	-Kontrak Nomor : 600/3388/DPUPR/KT/2020 Tgl. 11-November-2020 Nilai Kontrak Rp 78.925.000,00 Jk. Waktu 30 hari (11/11/2020 s/d 10/12/2020) Progres Fisik -% Keuangan 100%	78.925.000,00	
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan		
			Total	78.925.000,00	-
13.	Dinas Pekerjaan Umum	Perencanaan Revitalisasi Kawasan Terminal Bastiong Sumber Dana: (APBD)	- Kontrak Nomor : 600/46/SP/TR/DPUPR/KOTA-Tte/2020 Tgl. 07-Januari-2020 Nilai Kontrak Rp 98.091.000,00 Jk. Waktu 180 hari (07/01/2020 s/d 06/02/2020) Progres Fisik -% Keuangan 100%		
			Biaya atribusi: - Perencanaan	98.091.000,00	

No.	OPD	Nama KDP	Keterangan	Saldo 31 Des. 2020 (Rp) (Audited)	Saldo 31 Des. 2019 (Rp) (Audited)
			- Pengawasan		
			Total	98.091.000,00	-
14.	Sekretariat Daerah	Pembangunan Gedung Kantor Lurah Rua Sumber Dana: (APBD)	-Kontrak Nomor: 600/04/SPK/KON/BAPEN/2018 Tgl. 16-Juli-2018 Nilai kontrak Rp 189.700.000,00 Jk. Waktu 90 hari (16/07/2018 s.d.19/11/2018) Progres Fisik 80% Keuangan 30%		56.910.000,00
			- Kontrak Nomor: 600/04/SPK/KON-PKL/BAPEN / 2019 Tgl. 23-Agustus-2019 Nilai kontrak Rp 248.357.829,00 Jk. Waktu 90 hari (23/08/2019 s.d.31/12/2019) Progres Fisik 100% Keuangan 100%		228.612.127,00
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan		18.008.052,62 6.913.649,38
			Total		310.443.829,00
15.	Dinas Kesehatan	Pembangunan Puskesmas Kota Tahap I dan Tahap II Sumber Dana: (APBD)	- Kontrak Nomor: 440/2033/SP/2019 Tgl. 18-Sep-2019 Nilai kontrak Rp 2.442.517.000,00 Jk. Waktu 105 hari (18/09/2019 s.d. 31/12/2019) Progres Fisik 100% Keuangan 100%	2.442.517.000,00	2.320.391.150,00
			-Kontrak Nomor: 440/2013/SP-JK/Dinkes/DAU/2020 Tgl. 31-Ags-2020 Nilai kontrak Rp 1.418.253.612,31 Jk. Waktu 120 hari (31/08/2020 s.d. 29/12/2020) Progres Fisik 100% Keuangan 60%	978.594.993,00	
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan - Penunjang lainnya	96.767.000,00 110.110.000,00 6.800.000,00	96.767.000,00 69.025.000,00 6.800.000,00
			Total	3.634.788.993,00	2.492.983.150,00
16.	Dinas Kesehatan	Pembangunan Baru Puskesmas faudu/Hiri Sumber Dana:	-Kontrak Nomor: 440/1473/SP-JK/PKM FAUDU.HIRI/DINKES/DAK/2019 Tgl. 22-Jul-2019		1.588.001.224,0

No.	OPD	Nama KDP	Keterangan	Saldo 31 Des. 2020 (Rp) (Audited)	Saldo 31 Des. 2019 (Rp) (Audited)
		(APBD)	<p>Nilai kontrak Rp 1.834.779.000,00</p> <p>Jk. Waktu 150 hari (17/07/ 2019 s.d.10/12/ 2019)</p> <p>Progres Fisik 100% Keuangan 100%</p>		-
			<p>Biaya atribusi:</p> <p>- Perencanaan</p> <p>- Pengawasan</p> <p>- Penunjang lainnya</p>		<p>76.461.000,00</p> <p>51.150.000,00</p> <p>27.400.000,00</p>
			Total	-	1.743.012.224,00
17.	Dinas Kesehatan	<p>Penambahan Gedung Instalasi Farmasi</p> <p>Sumber Dana: (APBD)</p>	<p>-Kontrak Nomor:</p> <p>440/2152/SP-JK / IFK /DINKES /DAK/2019 Tgl. 27-Sep-2019</p> <p>Nilai kontrak Rp 1.918.858.000,00</p> <p>Jk. Waktu 95 hari (27/09/2019 s.d. 30/12/2019)</p> <p>Progres Fisik 100% Keuangan 100%</p>		1.788.026.772,00
			<p>Biaya atribusi:</p> <p>- Perencanaan</p> <p>- Pengawasan</p> <p>- Penunjang lainnya</p>		<p>68.475.000,00</p> <p>49.060.000,00</p> <p>13.800.000,00</p>
			Total	-	1.919.361.772,00
18.	Dinas Kesehatan	<p>Pembangunan Rumah Sakit Daerah</p> <p>Sumber Dana: (APBD)</p>	<p>-Kontrak Nomor:</p> <p>440/2123/SP-MASTER PLAIN RSD/DINKES/DAU/2019 Tgl. 25-Sep-2019</p> <p>Nilai kontrak Rp 1.709.679.000,00</p> <p>Jk. Waktu 90 hari (25/09/2019 s.d. 23/12/2019)</p> <p>Progres Fisik -% Keuangan 100%</p>		
			<p>Biaya atribusi:</p> <p>- Perencanaan</p> <p>- Pengawasan</p>	<p>1.709.679.000,00</p>	<p>1.709.679.000,00</p>
			Total	1.709.679.000,00	1.709.679.000,00
19.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	<p>Pembangunan Gedung Pasar Sabi-Sabi</p> <p>Sumber Dana: (APBD)</p>	<p>- Kontrak Nomor:</p> <p>602/SP-PBB.2/DAK/DPP-KT/2017 Tgl. 14-Juli-2017</p> <p>Nilai kontrak Rp 9.935.000.000,00</p> <p>Jk. Waktu 160 hari (14/07/2017 s.d. 20/12/2017)</p> <p>Progres Fisik - % Keuangan 100 %</p>	<p>9.935.000.000,0</p>	<p>9.935.000.000,0</p>

No.	OPD	Nama KDP	Keterangan	Saldo 31 Des. 2020 (Rp) (Audited)	Saldo 31 Des. 2019 (Rp) (Audited)
				-	-
			-Kontrak Nomor: 602/SP-LPS2/PERINDAG/2018 Tgl. 03-September-2018 Nilai kontrak Rp 492.788.000,00 Jk. Waktu 120 hari (03/09/2018 s.d. 31/12/2018) Progres Fisik - % Keuangan 100 %	492.788.000,00	492.788.000,00
			- Kontrak Nomor: 602/SP-PPSS/DPP-KT/2019 Tgl. 23- Agustus-2019 Nilai kontrak Rp 1.588.206.715,52 Jk. Waktu 120 hari (23/08/2019 s.d. 20/12/2019) Progres Fisik - % Keuangan 100 %	1.588.206.715,00	1.588.206.715,00
			-Kontrak Nomor: 800/420/SPK.a/DDP-KT/2020 Tgl. 1- Desember-2020 Nilai Kontrak Rp196.514.000,00 Jk. Waktu 30 Hari Kerja (1/12/2020 s.d. 31/12/2020) Progres Fisik 100% Keuangan 100%	196.514.000,00	
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan - Penunjang lainnya	347.000.000,00 286.000.000,00 554.610.400,00	347.000.000,00 286.000.000,00 554.610.400,00
			Total	13.400.119.115,00	13.203.605.115,00
20.	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pembuatan Tribun Gelora Kie Raha Sumber Dana: (APBD)	-Kontrak Nomor: 900/185/2016 Tgl. 29-Juni-2016 Nilai kontrak Rp 1.376.900.000,00 Jk. Waktu 150 hari (29/06/2016 s.d. 25/11/2016) Progres Fisik 100% Keuangan 100%	1.376.900.000,00	1.376.900.000,00
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan	63.200.000,00 35.000.000,00	63.200.000,00 35.000.000,00
			Total	1.475.100.000,00	1.475.100.000,00
21.	Dinas Pariwisata	Sumber Dana: (APBD) Pembuatan Panggung Kesenian/ Pertunjukan (DAK)	-Kontrak Nomor: 05.a/SP-PPH/Dispar-KT/2018. Tgl. 13- Nov-2018 Nilai Kontrak Rp 422.870.000,00 Jk. Waktu 45 HK (31/08/20 s.d. 28/12/18) Progres Fisik 20% Keuangan 100%	422.870.000,00	
			-Kontrak Nomor: 10.a/SP-PKPH/Dispar-KT/2019. Tgl. 05-Nov-2019 Nilai Kontrak Rp 687.405.036,88 Jk. Waktu 45 HK (05/11/20 s.d. 20/12/20) Progres Fisik 40% Keuangan 100%	687.405.036,88	

No.	OPD	Nama KDP	Keterangan	Saldo 31 Des. 2020 (Rp) (Audited)	Saldo 31 Des. 2019 (Rp) (Audited)
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan	84.045.000,00 21.760.000,00	
			Total	1.216.080.036,88	-
JUMLAH TOTAL				248.466.921.141,88	173.913.996.350,00

Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan selama Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 01-01-2020	Rp	173.913.996.350,00
Penambahan Realisasi Belanja Modal Tahun 2020	Rp	0,00
Koreksi tambah:	Rp	98.373.777.842,88
Koreksi Kurang:	Rp	(23.820.853.051,00)
Saldo per 31-12-2020	Rp	248.466.921.141,88

Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan terdiri dari:

a) Penambahan

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp248.466.921.141,88. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang timbul sebagai akibat belum selesainya pekerjaan pembangunan fisik konstruksi dan belum ada Berita Acara Serah Terima selesainya pekerjaan dari Pihak Ketiga kepada Pengguna Barang dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut ini:

No.	NAMA OPD	Konstruksi Dalam Pengerjaan Per31 Des 2020 (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	5.344.467.993,00
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	227.031.153.997,00
3.	Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah	1.475.100.000,00
4.	Dinas Pariwisata	1.216.080.036,88
5.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	13.400.119.115,00
	Jumlah	248.466.921.141,88

b) Koreksi Tambah

Koreksi reklasifikasi tambah aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Tahun 2020 sebesar Rp98.373.777.842,88 yang terdiri dari:

1. Dinas Kesehatan sebesar Rp 1.141.805.843,00 reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan berupa Pembangunan lanjutan Puskesmas Kota Tahap II;
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp95.819.377.963,00 yang merupakan reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan senilai Rp33.546.262.390,00 yang terdiri dari *Sport Hall* Kelurahan Ubo-Ubo Kecamatan Kota Ternate Selatan senilai Rp1.267.384.550,00, dan Pasar Modern Gamalama Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah senilai Rp32.278.877.840,00. Kemudian pada Jalan Irigasi, dan Jaringan senilai Rp62.273.115.573,00 yang terdiri dari Pembangunan Jalan Baru Salero - Dufa-Dufa/Reklamasi senilai Rp6.250.000.000,00, Reklamasi Kawasan Kayu Merah-Kalumata senilai Rp47.794.053.293,00,

Revitalisasi Kawasan Terminal Gamalama (Jl. Terminal Baru Gamalama) senilai Rp5.059.043.280,00, Revitalisasi Kawasan Makassar Timur senilai Rp2.993.003.000,00, Perencanaan Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jembatan Kota Ternate senilai Rp78.925.000,00, dan Perencanaan Revitalisasi Kawasan Terminal Bastiong senilai Rp98.091.000,00;

3. Dinas Pariwisata sebesar Rp 1.216.080.036,88 reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan berupa Pembangunan Panggung Kesenian Pulau Hiri;
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp196.514.000,00 reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan berupa Pembangunan Kios Pedagang Pasar Sabi-Sabi.

c) Koreksi Kurang

Koreksi kurang nilai aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) selama tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp23.820.853.051,00 yang hanya merupakan reklasifikasi berkurang dari:

1. Dinas Kesehatan sebesar Rp3.662.373.996,00 reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan berupa penambahan Gedung Instalasi Farmasi senilai Rp1.919.361.772,00 dan pembangunan baru Puskesmas Faudu/Hiri senilai Rp1.743.012.224,00;
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp19.848.035.226,00 yang merupakan reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan senilai Rp6.557.933.000,00 berupa revitalisasi Kawasan Makassar Timur, Kemudian Reklasifikasi ke Jalan Jembatan dan Irigasi senilai Rp13.290.102.226,00 yang berupa Peningkatan Jalan Ternate Utara senilai Rp2.403.914.600,00 dan Peningkatan Jalan Lapen ke Hotmix Jalan Keliling Pulau Moti senilai Rp10.886.187.626,00.
3. Sekretariat Daerah sebesar Rp310.443.829,00 reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan berupa Pembangunan Kantor Lurah Rua.
 - Rincian Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan yang telah selesai sebagai berikut:

No.	NAMA OPD	Per 31 Desember 2020 (Rp)
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	19.848.035.226,00 6.557.933.000,00 13.290.102.226,00
2.	Sekretariat Daerah Gedung dan Bangunan	310.443.829,00 310.443.829,00
3.	DINAS KESEHATAN Gedung dan Bangunan	3.662.373.996,00 3.662.373.996,00
	Jumlah	23.820.853.051,00

VI.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Nilai Akumulasi Penyusutan merupakan akumulasi penyusutan untuk Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar (Rp1.206.861.075.806,02) dan (Rp1.113.974.651.986,72) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo 31 Des. 2020 (Rp) (Audited)	Saldo 31 Des.2019 (Rp) (Audited)
1.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	210.744.904.637,39	187.623.558.418,47
2.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	393.784.788.609,16	368.070.903.537,14
3.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	602.331.382.559,47	557.871.953.651,11
	J u m l a h	1.206.861.075.806,02	1.113.566.415.606,72

Apabila disandingkan nilai perolehan Aset Tetap, maka akan diperoleh Nilai Buku untuk masing-masing Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

No.	Uraian		Nilai Buku 31 Des. 2020 (Rp)
1.	Tanah		1.085.551.263.226,00
2.	Peralatan dan Mesin Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Nilai Buku Peralatan dan Mesin	289.892.606.435,75 (210.744.904.637,39)	79.147.701.798,36
3.	Gedung dan Bangunan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Nilai Buku Gedung dan Bangunan	905.121.156.418,64 (393.784.788.609,16)	511.336.367.809,48
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan Akum Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Nilai Buku Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.078.715.343.679,62 (602.331.382.559,47)	476.383.961.120,15
5.	Aset Tetap Lainnya		49.019.746.299,87
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan		248.466.921.141,88
	Total Aset Tetap		2.449.905.961.395,74

VI.3.3. ASET LAINNYA

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan.

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp55,921,989,235.67 dan Rp63,627,498,505.67 terdiri dari:

No.	Uraian	Saldo 31 Desember 2020 (Rp) (Audited)	Saldo 31 Desember 2019 (Rp) (Audited)
1.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	33.356.080.000,00	33.356.080.000,00
2.	Aset Tak Berwujud	2,229,299,189,00	2.155.579.169,00
3.	Aset Lain-lain	20.336.610.046,67	28,115,839,336,67
	Jumlah	55,921,989,235.67	63,627,498,505.67

VI.3.1.4.1 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah aset milik Pemerintah Kota Ternate yang digunakan oleh pihak ketiga melalui perjanjian dalam rangka mengoptimalkan daya guna

dan hasil guna barang milik daerah dan/atau meningkatkan pendapatan daerah.

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sama sebesar Rp33.356.080.000,00 atau tidak ada perubahan. Nilai yang diakui Pemerintah Kota Ternate atas aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga ini mengacu pada isi perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Ternate dan pihak ketiga, sebagaimana tampak dalam tabel berikut:

No.	Aset Pemkot Ternate yang Dikerjasamakan	Pengakuan Nilai Tanah yang Dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga (Rp)	Penggunaan oleh Pihak Ketiga (Aset Bangun Guna Serah)	Keterangan - Nama Pihak Ketiga - Nomor & Tanggal Perjanjian - Masa Kerjasama - Keterangan Lain
1.	Tanah seluas 26.162 M2	3.350.000.000,00	Bangunan Waterboom	<ul style="list-style-type: none"> • PTIndoteranusa • Perjanjian Nomor : 556.35/2012 dan 00102/IN/PK/TP/T/II/2012 • tanggal 02 Februari 2012 • Masa Pengembalian 30 tahun.
2.	Tanah seluas 38.457 M2 (Sertifikat Hak Pengelolaan No.01 tanggal 25 Oktober 2004)	26.524.546.000,00	Mall JatiLand	<ul style="list-style-type: none"> • PT Jati Luhur Gemiling • Perjanjian Nomor 80///KOTA TTE/2014 tanggal 11 Mei 2004 • Masa Pengembalian 25 tahun • Diatas tanah tersebut terdapat sertifikat HGB atas Nama PT Jati Luhur Gemiling No.26 tanggal 24 Nopember 2004 seluas 33.073 M2
3.	Tanah seluas 6.750 M2	2.314.624.000,00	Mall Hypermart	<ul style="list-style-type: none"> • PT Sumber Arta Bahari Sejahtera • Masa Pengembalian 30 tahun.
4.	Tanah seluas 1.470 M2 (Sertifikat Hak Pengelola No 05 Tanggal 05 Agustus 2015)	1.166.910.000,00	SPBU	<ul style="list-style-type: none"> • PT Yuseda Mandiri • Masa Pengembalian 30 tahun.
	Total	33.356.080.000,00		

VI.3.1.4.2 Aset Tak Berwujud

Aset Tidak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp3.990.598.175,00 dan Rp3.601.304.175,00 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Aset Tidak Berwujud	OPD	Saldo 31 Des. 2020 (Rp) (Audited)	Saldo 31 Des.2019 (Rp) (Audited)
1.	Software	Kesbangpol	5.000.000,00	5.000.000,00
2.	Software	Bappelitbangda	92.000.000,00	92.000.000,00
3.	Software	BP2RD	2.439.561.970,00	2.090.267.970,00
4.	Software	BPKAD	222.888.300,00	182.888.300,00

No.	Aset Tidak Berwujud	OPD	Saldo 31 Des. 2020 (Rp) (Audited)	Saldo 31 Des.2019 (Rp) (Audited)
5.	Software	Dinas Cacatan Sipil	17.300.000,00	17.300.000,00
6.	Software	Dinas Kelautan dan Perikanan	9.555.550,00	9.555.550,00
7.	Software	Dinas Kesehatan	237.491.855,00	237.491.855,00
8.	Software	Diskominfo	569.197.000,00	569.197.000,00
9.	Software	DLH	31.993.000,00	31.993.000,00
10.	Software	DP3A	76.238.500,00	76.238.500,00
11.	Software	DPMPTSP	56.400.000,00	56.400.000,00
12.	Software	Inspektorat Daerah	6.825.000,00	6.825.000,00
13.	Software	Kantor Satpol PP	14.960.000,00	14.960.000,00
14.	Software	Kec. Pulau Moti	11.968.000,00	11.968.000,00
15.	Software	Kec. Ternate Utara	92.849.000,00	92.849.000,00
16.	Software	Ketahan Pangan	7.370.000,00	7.370.000,00
17.	Software	Sekda	99.000.000,00	99.000.000,00
Jumlah Aset Tidak Berwujud			3.990.598.175,00	3.601.304.175,00

Mutasi Aset Tidak Berwujud selama Tahun 2020 dan 2019 serta amortisasi dan nilai nettonya adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2020 (Rp) (Audited)	Tahun 2019 (Rp) (Audited)
1.	Saldo Awal Aset Tak Berwujud	2.155.579.169,00	2.337.353.973,00
2.	Realisasi Belanja Modal Tahun 2020	-	-
3.	Koreksi tambah dari reklasifikasi aset yang dihasilkan dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin	389.294.000,00	113.687.970,00
4.	Saldo Akhir	2.544.873.169,00	2.451.041.943,00
5.	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(315.573.980,00)	(295.462.774,00)
6.	Nilai Aset Tak Berwujud Netto	2.229.299.189,00	2.155.579.169,00

Koreksi Tambah Aset Tidak Berwujud berupa reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang terdiri dari:

No.	Uraian	Tahun 2020 (Rp) (Audited)	Tahun 2019 (Rp) (Audited)
1.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	349.294.000,00	-
2.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	40.000.000,00	-
3.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	-	14.687.970,00
4.	Sekretariat Daerah	-	99.000.000,00
Total		389.294.000,00	113.687.970,00

VI.3.1.4.3 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain adalah aset yang tidak dapat dikategorikan sebagai aset tetap karena tidak dapat digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. Aset Lain-Lain per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sama sebesar Rp28.818.261.430,96 atau tidak ada perubahan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Aset Tidak Berwujud	Saldo 31 Desember 2020 (Rp) (Audited)	Saldo 31 Desember 2019 (Rp) (Audited)
1.	Aset dalam kondisi rusak berat yang sedang dalam proses usulan penghapusan	10.611.658.730,00	14.872.233.296,00
2.	Aset yang tidak di ketahui keberadaannya	4.998.666,67	4.998.666,67
3.	Aset Persediaan (yang akan diserahkan ke masyarakat)	1.883.305.034,00	2.322.266.000,00

No.	Aset Tidak Berwujud	Saldo 31 Desember 2020 (Rp) (Audited)	Saldo 31 Desember 2019 (Rp) (Audited)
4.	Aset Persediaan (yang akan diserahkan ke pihak ketiga)	16.318.299.000,29	9.838.052.650,00
	Jumlah Aset Lain-lain	28.818.261.430,96	27.037.550.612,67

1. Aset dalam kondisi rusak berat sebesar Rp10.611.658.730,00 sedang dalam proses usulan penghapusan.
2. Aset yang tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp4.998.666,67.
3. Aset Persediaan yang akan diserahkan ke pihak ketiga sebesar Rp18.201.604.034,29 saat ini prosesnya masih dalam tahap Pembuatan BAST.

VI.3.2. KEWAJIBAN

Pemerintah Kota Ternate hanya berupa Kewajiban Jangka Pendek, tidak memiliki kewajiban jangka panjang.

VI.3.5.1 Kewajiban Jangka Pendek

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp41.147.173.304,20 dan Rp36.614.883.310,88 atau mengalami kenaikan sebesar Rp4.532.289.993,00. Kewajiban Jangka Pendek tersebut terdiri dari:

VI.3.5.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang sampai dengan akhir tahun belum disetor ke kas Negara atau pihak ketiga lainnya, yaitu per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp6.944.635.329,20 dan Rp10.350.092.496,22. Rincian Utang PFK tersebut adalah sebagai berikut.

No.	OPD	Saldo 31 Des. 2020 (Rp) (Audited)	Saldo 31 Des. 2019 (Rp) (Audited)
1.	BUD	5.983.209.263,75	9.639.109.936,21
2.	Dinas Pendidikan (Dana BOS)	115.247.575,00	9.510.837,00
3.	Kecamatan Kota Ternate Utara	98.204.247,00	1.102.088,00
4.	Kecamatan Kota Ternate Tengah	88.759.059,00	27.272.726,00
5.	Kecamatan Kota Ternate Selatan	315.912.373,44	313.864.498,00
6.	Kecamatan Pulau Ternate	-	1.367.565,00
7.	Kecamatan Ternate Barat	4.545.456,00	141.054.106,00
8.	Kecamatan Moti	221.028.206,01	108.831.586,01
9.	Kecamatan Pulau Hiri	117.729.149,00	107.979.154,00
	Total	6.944.635.329,20	10.350.092.496,22

Rincian utang PFK disajikan dalam Lampiran 2.

VI.3.5.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan penerimaan daerah atas jasa pelayanan yang belum diberikan oleh Pemerintah Kota Ternate. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp475.198.666,66 seluruhnya berasal dari penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar.

VI.3.5.1.3 Utang Belanja

Utang Belanja merupakan belanja barang jasa yang belum terbayar sampai dengan akhir periode akuntansi. Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp16.592.430.553,00 dan Rp4.578.720.945,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	OPD	Saldo 31 Des. 2020 (Rp) (Audited)	Saldo 31 Des. 2019 (Rp) (Audited)
1	Dinas Pendidikan	1.746.860.538,00	-
2	Dina Kesehatan	5.108.075.377,00	682.337.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	884.472.500,00	1.637.881.145,00

No.	OPD	Saldo 31 Des. 2020 (Rp) (Audited)	Saldo 31 Des. 2019 (Rp) (Audited)
4	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman & Pertanahan	1.030.432.340,00	-
5	Satuan Polisi Pamong Praja	23.000.000,00	-
6	Dinas Sosial	88.500.000,00	-
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	4.300.000,00	-
8	Dinas Lingkungan Hidup	926.528.250,00	1.001.067.800,00
9	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	118.728.000,00	-
10	Dinas Pengendalian Kependudukan & Keluarga Berencana	1.276.222.000,00	-
11	Dinas Komunikasi Informatika & Persandian	843.110.022,00	-
12	Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah	13.300.000,00	-
13	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	15.000.000,00	-
14	Dinas Kebudayaan	66.878.000,00	-
15	Dinas Perpustakaan & Arsip Daerah	32.145.000,00	-
16	Dinas Pemuda & Olahraga	-	1.257.435.000,00
17	Dinas Kelautan & Perikanan	1.281.553.812,00	-
18	Dinas Pariwisata	99.715.000,00	-
19	Sekretariat Daerah	332.370.600,00	-
20	Sekretariat DPRD	549.427.550,00	-
21	Kecamatan Ternate Utara	149.999.000,00	-
22	Kecamatan Ternate Tengah	130.800.000,00	-
23	Kecamatan Pulau Batang Dua	78.766.667,00	-
24	Kecamatan Ternate Barat	44.115.000,00	-
25	Inspektorat Daerah	56.400.000,00	-
26	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian & Pengembangan Daerah	170.300.000,00	-
27	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	30.000.000,00	-
28	Badan Pengelolaan Pajak & Retribusi Daerah	1.208.129.905,00	-
29	Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	149.200.992,00	-
30	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	134.100.000,00	-
	Total	16.592.430.553,00	4.578.720.945,00

Rincian Utang Belanja per kegiatan per OPD dapat dilihat pada lampiran 3.

VI.3.5.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah belanja aset tetap yang belum terbayar sampai dengan akhir periode akuntansi. Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp17.590.123.448,00 dan Rp21.210.871.203,00 terdiri dari:

No.	OPD	Saldo 31 Des. 2020 (Rp) (Audited)	Saldo 31 Des. 2019 (Rp) (Audited)
1	Dinas Pendidikan	4.101.706.396,00	1.274.921.928,00
2	Dinas Kesehatan	4.828.189.553,00	1.070.684.742,00
3	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	4.866.631.225,00	13.841.403.160,00
4	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman & Pertanahan	375.260.144,00	494.122.500,00
5	Dinas Komunikasi Informatika & Persandian	58.872.000,00	-
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	125.000.000,00
7	Dinas Kebudayaan	128.986.000,00	-
8	Dinas Pariwisata	656.782.500,00	-

No.	OPD	Saldo 31 Des. 2020 (Rp) (Audited)	Saldo 31 Des. 2019 (Rp) (Audited)
9	Sekretariat Daerah	467.565.172,00	804.166.960,00
10	Sekretariat DPRD	20.000.000,00	-
11	Kecamatan Ternate Utara	71.062.530,00	-
12	Kecamatan Ternate Barat	221.930.000,00	-
13	BAPPELITBANGDA	599.706.128,00	369.272.354,00
14	BP2RD	279.543.000,00	261.398.000,00
15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	196.514.000,00	1.210.744.700,00
16	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	1.556.401.000,00
17	Dinas Lingkungan Hidup	-	180.501.310,00
18	BPKAD	83.188.000,00	-
19	Utang ke rekanan di Rek Retur	-	22.254.549,00
20	Dinas Perhubungan	561.920.800,00	-
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	92.250.000,00	-
	Total	17.610.107.448,00	21.210.871.203,00

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per kegiatan per OPD dapat dilihat pada lampiran 4.

VI.3.3. EKUITAS

Ekuitas merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp2.561.270.994.370,98 dan Rp2.445.426.904.860,11 terjadi kenaikan sebesar Rp115.844.089.510,87 atau 4,74%.

VI.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

VI.4.1 PENDAPATAN - LO

Pendapatan - LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Transaksi Pendapatan - LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih dan penerimaan pendapatan dalam bentuk barang/jasa. Selain itu transaksi Pendapatan - LO tidak hanya mencakup transaksi yang sudah dianggarkan dalam APBD tetapi juga mencakup seluruh transaksi penerimaan yang tidak melalui mekanisme APBD. Pada Tahun 2020 Pendapatan - LO direalisasikan sebesar Rp986.548.905.172,30.

No.	Uraian	Realisasi 2020 (Rp) (Audited)	Realisasi 2019 (Rp) (Audited)
1.	Pendapatan Asli Daerah - LO	106.524.261.322,30	110.098.851.249,13
2.	Pendapatan Transfer - LO	843.433.200.269,00	873.159.507.664,00
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	36.591.443.581,00	882.820.000,00
	Jumlah	986.548.905.172,30	984.141.178.913,13

VI.4.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO

Pendapatan Asli Daerah – LO pada Tahun 2020 direalisasikan sebesar Rp106.524.261.322,30 lebih kecil jika dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp110.098.851.249,13. Realisasi Tahun 2020 tersebut yang mengalami penurunan sebesar (Rp3.574.589.926,83) atau (3,25%).

Berikut rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah - LO:

No.	Uraian	Realisasi 2020 (Rp) (Audited)	Realisasi 2019 (Rp) (Audited)
1.	Pendapatan Pajak Daerah - LO	54.090.117.725,12	59.852.761.183,00
2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	19.446.464.596,66	20.005.794.871,75
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	1.310.008.542,79	1.206.784.356,00
4.	Lain-lain PAD yang Sah - LO	31.677.670.457,73	29.033.510.838,38
	Jumlah	106.524.261.322,30	110.098.851.249,13

VI.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO

Pendapatan Pajak Daerah – LO adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menjadi hak Pemerintah Daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp54.090.117.725,12 dan Rp59.852.761.183,00 terdiri dari:

No.	Uraian	Realisasi 2020 (Rp) (Audited)	Realisasi 2019 (Rp) (Audited)
1.	Pajak Hotel – LO	3.326.083.464,00	4.437.274.112,00
2.	Pajak Restoran – LO	7.102.987.164,00	12.899.158.724,00
3.	Pajak Hiburan - LO	3.538.049.882,00	3.063.299.779,00
4.	Pajak Reklame – LO	2.069.721.640,00	2.373.628.729,00
5.	Pajak Penerangan Jalan - LO	21.261.231.736,00	20.248.026.102,00
6.	Pajak Parkir – LO	580.382.600,00	835.016.300,00
7.	Pajak Air Tanah – LO	796.044.006,00	785.110.675,00
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan- LO	2.048.892.759,00	2.254.092.675,00
9.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan – LO	7.646.534.901,12	7.067.627.091,00
10.	BPHTB - Pemberian Hak Baru - LO	5.720.189.573,00	5.889.526.996,00
	Jumlah	54.090.117.725,12	59.852.761.183,00

Berdasarkan rincian di atas, jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi penerimaan terbesar terhadap Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2020 adalah Pajak Penerangan Jalan – LO, yaitu sebesar Rp21.261.231.736,00 atau 39,31% dibanding total Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp54.090.117.725,12. Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2020 turun sebesar (Rp5.762.643.457,88) atau (9,63%) jika dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar Rp59.852.761.183,00.

Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah - LO tidak saja berasal dari transaksi penerimaan kas tetapi juga berasal dari transaksi penerbitan hak tagih pajak yang sampai dengan akhir tahun belum dipenuhi oleh Wajib Pajak. Berikut rincian penerimaan pajak daerah berdasarkan jenis transaksi dan perbedaannya jika dibandingkan dengan pendapatan pada laporan realisasi anggaran sebagai berikut:

No.	Uraian	Realisasi LO 2020 (Rp) (Audited)	Realisasi LRA 2020 (Rp) (Audited)	Perbedaan (Rp)
1.	Pajak Hotel	3.326.083.464,00	3.318.954.477,00	7.128.987,00
2.	Pajak Restoran	7.102.987.164,00	8.372.772.021,00	(1.269.784.857,00)
3.	Pajak Hiburan	3.538.049.882,00	1.835.384.285,00	1.702.665.597,00
4.	Pajak Reklame	2.069.721.640,00	1.987.665.840,00	82.005.800,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	21.261.231.736,00	21.261.231.736,00	-
6.	Pajak Parkir	580.382.600,00	580.382.600,00	-
7.	Pajak Air Tanah	796.044.006,00	737.925.216,00	58.118.790,00
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.048.892.759,00	1.124.520.096,00	924.372.663,00
9.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	7.646.534.901,12	4.863.881.425,00	2.782.653.476,12
10.	BPHTB - Pemberian Hak Baru	5.720.189.573,00	5.720.189.573,00	-
	Jumlah	54.090.117.725,12	49.802.907.269,00	4.287.210.456,12

Berdasarkan rincian Pendapatan Pajak Daerah di atas terdapat perbedaan pada laporan operasional jika dibandingkan dengan laporan realisasi anggaran sebesar Rp4.287.210.456,12 kenaikan piutang pajak tahun 2020.

VI.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan Retribusi Daerah – LO adalah pungutan Pemerintah Daerah yang menjadi hak Pemerintah Daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan kepada orang atau badan berdasarkan norma-norma yang ditetapkan. Retribusi berhubungan dengan jasa timbal (kontraprestasi) yang diberikan secara langsung atas permohonan dan untuk kepentingan umum maupun yang diberikan oleh pemerintah.

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp19.446.162,66 dan Rp20.005.794.871,75 terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp) (Audited)	Realisasi 2019 (Rp) (Audited)
1	Retribusi Tempat Pelelangan - LO	155.025.100,00	7.700.000,00
2	Retribusi Pengambilan/Pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembunagan sementara - LO	2.386.031.500,00	3.255.529.000,00
3	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	638.700.000,00	775.200.000,00
4	Retribusi Fasilitas Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO	10.701.803.846,66	8.751.335.651,00
5	Retribusi Alat Penanggulangan Kebakaran - LO	712.540.000,00	1.105.440.000,00
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	8.100.000,00	19.200.000,00
7	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan - LO	1.459.632.588,00	2.393.392.188,00
8	Retribusi Kendaraan Bermotor - LO	-	300.850.000,00
9	Retribusi Tempat Kegiatan Usaha/ Terminal - LO	166.430.000,00	347.176.000,00
10	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LO	369.000.000,00	622.600.000,00
11	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong – LO	129.002.000,00	168.487.000,00
12	Retribusi Pelayanan Jasa kepelabuhanan - LO	162.165.100,00	146.361.900,00
13	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi - LO	191.311.000,00	223.982.000,00
14	Retribusi Pemberian Izin untuk Mendirikan Bangunan - LO	2.307.681.962,00	1.749.798.132,75
15	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA Tenaga Kerja Asing - LO	-	18.000.000,00
16	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LO	4.191.000,00	20.410.000,00
17	Retribusi Tera Ulang - LO	54.850.500,00	100.333.000,00
	Jumlah	19.446.464.596,66	20.005.794.871,75

Terdapat perbedaan antara Pendapatan Retribusi – LO dan LRA:

No.	Uraian	Realisasi LO 2020 (Rp) (Audited)	Realisasi LRA 2020 (Rp) (Audited)	Perbedaan (Rp)
1	Tempat pelelangan	155.025.100,00	155.025.100,00	-
2	Pengambilan/Pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembunagan sementara - LO	2.386.031.500,00	2.386.031.500,00	-
3	Penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum - LO	638.700.000,00	638.700.000,00	-
4	Retribusi Fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang - LO	10.701.803.846,66	7.774.982.829,00	2.926.821.017,66

No.	Uraian	Realisasi LO 2020 (Rp) (Audited)	Realisasi LRA 2020 (Rp) (Audited)	Perbedaan (Rp)
5	Alat penanggulangan kebakaran - LO	712.540.000,00	712.540.000,00	-
6	Penyediaan dan/atau penyedotan kakus - LO	8.100.000,00	8.100.000,00	-
7	Penyewaan tanah dan bangunan - LO	1.459.632.588,00	1.017.006.088,00	442.626.500,00
8	Tempat kegiatan usaha/ Terminal - LO	166.430.000,00	166.430.000,00	-
9	Pelayanan tempat khusus parkir - LO	369.000.000,00	369.000.000,00	-
10	Pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum di potong - LO	129.002.000,00	129.002.000,00	-
11	Pelayanan jasa ke pelabuhan - LO	162.165.100,00	162.165.100,00	-
12	Pelayanan tempat rekreasi - LO	191.311.000,00	191.311.000,00	-
13	Pemberiaan izin untuk mendirikan bangunan - LO	2.307.681.962,00	2.307.681.962,00	-
14	Pemberian izin trayek kepada orang pribadi - LO	4.191.000,00	4.191.000,00	-
15	Retribusi Tera Ulang - LO	54.850.500,00	54.850.500,00	-
	Jumlah	19.446.464.596,66	16.077.017.079,00	3.369.447.517,66

Perbedaan Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp3.369.447.517,66 tersebut merupakan :

- Piutang retribusi pasar sebesar Rp2.926.821.017,66 tahun 2020;
- Pendapatan retribusi pasar yang diterima dimuka tahun 2019 sebesar Rp474.924.166,66;
- Piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp442.626.500,00 pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2020.

VI.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp1.310.008.542,79 dan Rp1.206.784.356,00. Berikut adalah rincian pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan jika dibandingkan dengan laporan realisasi anggaran:

Uraian	Realisasi 2020 (Rp) (Audited)	Realisasi 2019 (Rp) (Audited)
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah - LO	1.310.008.542,79	1.206.784.356,00
Jumlah	1.310.008.542,79	1.206.784.356,00

Tidak ada perbedaan antara hasil pengelolaan kekayaan daerah – LO dan LRA :

Uraian	Realisasi LO 2020 (Rp) (Audited)	Realisasi LRA 2020 (Rp) (Audited)	Perbedaan (Rp)
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah - LO	1.310.008.542,79	1.310.008.542,79	-
Jumlah	1.310.008.542,79	1.310.008.542,79	-

VI.4.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah - LO

Akun Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp31.677.670.457,73 dan Rp29.033.510.838,38 terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp) (Audited)	Realisasi 2019 (Rp) (Audited)
1	Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LO	708.115.000,00	398.638.889,00
2	Jasa Giro Kas Daerah - LO	162.108.129,29	46.125.339,35
3	Jasa Giro Kas Bendahara - LO	-	25.000,00
4	Pendapatan Bunga Deposito - LO	14.221.000,00	1.983.979.763,25
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum - LO	43.331.080,00	604.838.362,57
6	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor - LO	27.946.767,00	-
7	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	23.823.116,00	-
8	Pendapatan Denda Pajak Parkir - LO	3.614.368,00	-
9	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LO	718.816,00	-
10	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO	126.334,00	-
11	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar - LO	1.022.387,00	-
12	Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 - LO	1.781.721,00	20.000.900,00
13	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LO	273.118.836,00	7.147.633,00
14	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas - LO	998.018.764,95	-
15	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	-	(199.997.500,00)
16	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LO	1.272.400.643,00	-
17	Pendapatan Lain-lain BLUD - LO	41.741.250,00	-
18	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	4.616.736.141,43	3.246.973.422,09
19	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO	3.151.347.569,09	4.440.669.533,62
20	Dana Non Kapitasi	123.024.827,00	301.810.000,00
21	Pendapatan Dana Bos - LO	20.214.473.707,97	18.183.299.495,50
	Jumlah	31.677.670.457,73	29.033.510.838,38

Terdapat perbedaan antara Lain-Lain PAD yang Sah pada LO dan LRA sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp) (Audited)	Realisasi LRA 2020 (Rp) (Audited)	Perbedaan (Rp)
1	Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LO	708.115.000,00	708.115.000,00	-
2	Jasa Giro Kas Daerah - LO	162.108.129,29	162.108.129,29	-
3	Jasa Giro Kas Bendahara - LO	-	-	-
4	Pendapatan Bunga Deposito - LO	14.221.000,00	14.221.000,00	-

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp) (Audited)	Realisasi LRA 2020 (Rp) (Audited)	Perbedaan (Rp)
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum - LO	43.331.080,00	43.331.080,00	-
6	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor - LO	27.946.767,00	27.946.767,00	-
7	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	23.823.116,00	24.097.916,00	(274.800,00)
8	Pendapatan Denda Pajak Parkir - LO	3.614.368,00	3.614.368,00	-
9	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LO	718.816,00	738.368,00	(19.552,00)
10	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO	126.334,00	126.334,00	-
11	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar - LO	1.022.387,00	1.022.387,00	-
12	Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 - LO	1.781.721,00	1.781.721,00	-
13	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LO	273.118.836,00	273.118.836,00	-
14	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas - LO	998.018.764,95	998.018.764,95	-
15	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	-	-	-
16	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LO	1.272.400.643,00	1.272.400.643,00	-
17	Pendapatan Lain-lain BLUD - LO	41.741.250,00	-	41.741.250,00
18	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	4.616.736.141,43	4.616.736.141,43	-
19	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO	3.151.347.569,09	2.773.233.569,09	378.114.000,00
20	Dana Non Kapitasi	123.024.827,00	123.024.827,00	-
21	Pendapatan Dana Bos - LO	20.214.473.707,97	20.214.473.707,97	-
	Jumlah	31.677.670.457,73	31.258.109.559,73	419.560.898,00

Perbedaan sebesar Rp419.560.898,00 yang terdiri dari :

- Selisih sebesar (Rp274.800) merupakan denda beba balik nama kendaraan bermotor yang belum disetorkan ke kas daerah;
- Selisih sebesar (Rp19.552,00) merupakan denda pajak air tanah yang belum disetorkan kas daerah;
- Selisih sebesar Rp41.741.250,00 yang merupakan koreksi saldo kas tunai di PKM Kalumata yang belum tercatat sebesar Rp26.290.750,00 dan PKM Kalumpang sebesar Rp15.450.500,00;
- Selisih sebesar Rp378.114.000,00 merupakan dana kapitasi (JKN) yang belum dibayarkan oleh BPJS sampai dengan 31 Desember 2020.

VI.4.1.2 PENDAPATAN TRANSFER - LO

Pendapatan Transfer – LO merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pemerintah lain, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, yang menjadi hak Pemerintah Daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Pendapatan Transfer – LO diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Daerah dan/atau pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, dalam hal dengan kurang salur.

Realisasi Pendapatan Transfer – LO Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp843.433.200.269,00 dan Rp815.771.604.397,00, terdiri dari:

No.	Uraian	Realisasi 2020 (Rp) (Audited)	Realisasi 2019 (Rp) (Audited)
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	753.906.203.283,00	797.014.845.832,00
2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	65.584.074.000,00	44.225.740.000,00
3.	Pendapatan Transfers Pemerintah Daerah - Lainnya	23.942.922.986,00	31.918.921.832,00
	Jumlah	843.433.200.269,00	873.159.507.664,00

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa relisasi Pendapatan Transfer – LO Tahun 2020 secara total mengalami penurunan sebesar (Rp43.108.642.549,00) atau (5,41%) dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp873.159.507.664,00.

VI.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - LO

Transfer Pemerintah Pusat – LO adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN berupa Dana Perimbangan yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp753.906.203.283,00 dan Rp797.014.845.832,00 terdiri dari:

No.	Uraian	Realisasi 2020 (Rp) (Audited)	Realisasi 2019 (Rp) (Audited)
1.	Dana Bagi Hasil Pajak	17.998.507.800,00	12.255.786.432,00
2.	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	25.322.364.016,00	8.763.514.762,00
3.	Dana Alokasi Umum	599.701.700.000,00	653.094.117.000,00
4.	Dana Alokasi Khusus	110.883.631.467,00	122.901.427.638,00
	Jumlah	753.906.203.283,00	797.014.845.832,00

VI.4.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak - LO

Dana Bagi Hasil Pajak – LO yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN khususnya Pajak yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak – LO Tahun 2020 sebesar Rp17.998.507.800,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp12.255.786.432,00, maka realisasi Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp5.742.721.368,00 atau 46,86%.

Rincian realisasi Dana Bagi Hasil Pajak – LO tersebut sebagai berikut:

No.	Uraian	Realisasi 2020 (Rp) (Audited)	Realisasi 2019 (Rp) (Audited)
1.	Bagi Hasil dari Pajak Pertambahan, Perkebunan, Perhutanan - LO	4.644.850.724,00	5.290.741.689,00
2.	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LO	13.353.657.076,00	6.965.044.743,00
	Jumlah	17.998.507.800,00	12.255.786.432,00

VI.4.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LO Tahun 2020 sebesar Rp25.322.364.016,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp8.763.514.762,00, maka realisasi Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp16.558.849.254,00 atau 188,95%. Rincian realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LO tersebut sebagai berikut:

No.	Uraian	Realisasi 2020 (Rp) (Audited)	Realisasi 2019 (Rp) (Audited)
1.	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan – LO	517.452.237,00	9.075.200,00
2.	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) - LO	2.010.081.850,00	8.141.595.762,00
3.	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan – LO	788.276.289,00	590.155.800,00
4.	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi – LO	7.904.609,00	22.688.000,00
5.	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi – LO	48.785.045,00	-
6.	Bagi Hasil Pertambangan Umum	21.949.863.986,00	-
	Jumlah	25.322.364.016,00	8.763.514.762,00

VI.4.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum - LO

Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum – LO Tahun 2020 adalah sebesar Rp599.701.700.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp653.094.117.000,00, maka realisasi Tahun 2020 tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp53.392.417.000,00) atau (8,18%).

VI.4.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus - LO

Realisasi Dana Alokasi Khusus – LO Tahun 2020 adalah sebesar Rp110.883.631.467,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp122.901.427.638,00, maka realisasi Tahun 2020 tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp12.017.796.171) atau (9,78%). Rincian realisasi Dana Alokasi Khusus – LO tersebut sebagai berikut:

No.	Uraian	Realisasi 2020 (Rp) (Audited)	Realisasi 2019 (Rp) (Audited)
1	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	8.319.060.250,00	14.154.723.000,00
2	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	4.261.054.000,00	2.540.726.000,00
3	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	-	-
4	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	1.795.500.750,00	2.230.431.300,00
5	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	712.936.250,00	4.223.172.000,00
6	DAK Bidang Kesehatan	16.622.985.248,00	13.770.294.761,00

No.	Uraian	Realisasi 2020 (Rp) (Audited)	Realisasi 2019 (Rp) (Audited)
7	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	859.581.000,00	2.978.122.520,00
8	DAK Bidang Perdagangan	-	3.080.545.180,00
9	DAK Bidang Pertanian	-	2.311.148.850,00
10	DAK Bidang Pendidikan	11.481.904.010,00	15.603.268.050,00
11	DAK Non Fisik - TPG PNSD	40.654.003.000,00	39.853.699.210,00
12	DAK Non Fisik - Tambahan Penghasilan Guru PNSD	509.288.000,00	1.308.000.000,00
13	DAK Non Fisik - BO Penyelenggaraan PAUD	3.039.100.000,00	1.956.600.000,00
14	DAK Non Fisik - Bantuan Operasional Kesehatan	11.595.775.460,00	8.210.794.075,00
15	DAK Non Fisik - Bantuan Operasional Keluarga Berencana	2.922.959.000,00	2.129.504.950,00
16	DAK Non Fisik - Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	914.923.269,00	1.106.580.000,00
17	DAK Bidang Pariwisata	2.958.029.000,00	3.423.135.692,00
18	DAK Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah	-	2.065.394.250,00
19	DAK Bidang Industri Kecil dan Menengah	352.040.000,00	990.651.800,00
20	DAK Bidang Prasarana Pemerintahan - LO	2.138.808.750,00	-
21	Dana Pelayanan Kepariwisata	-	521.736.000,00
22	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1.328.325.480,00	442.900.000,00
23	Peningkatan Kapasitas Koperasi UKM	417.358.000,00	-
	Jumlah	110.883.631.467,00	122.901.427.638,00

VI.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO seluruhnya berupa Dana Penyesuaian – LO.

VI.4.1.2.2.1 Dana Perimbangan - LO

Realisasi Dana Perimbangan - LO Tahun 2020 adalah sebesar Rp65.584.074.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp44.225.740.000,00 maka realisasi Tahun 2020 tersebut naik sebesar Rp21.358.334.000,00 atau 48,29%. Rincian realisasi Dana Penyesuaian – LO tersebut sebagai berikut:

No.	Uraian	Realisasi 2020 (Rp) (unAudited)	Realisasi 2019 (Rp) (Audited)
1.	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	622.462.000,00	-
2.	Dana Insentif Daerah	64.961.612.000,00	44.225.740.000,00
	Jumlah	65.584.074.000,00	44.225.740.000,00

Untuk Tahun 2020, Pendapatan Dana Penyesuaian seluruhnya berasal dari pendapatan dalam bentuk kas dan seluruhnya telah diterima di Rekening Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

VI.4.1.2.3 Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO

Realisasi Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO seluruhnya merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi – LO.

VI.4.1.2.3.1 Bagi Hasil Pajak Provinsi - LO

Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi – LO Tahun 2020 sebesar Rp23.942.922.986,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp31.918.921.832,00 maka realisasi Tahun 2020 tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp7.975.998.846,00) atau (24,99%).

No.	Uraian	Realisasi 2020 (Rp) (Audited)	Realisasi 2019 (Rp) (Audited)
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	16.780.296.256,00	25.140.973.209,00
2.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO	7.162.626.730,00	6.777.948.623,00
	Jumlah	23.942.922.986,00	31.918.921.832,00

Terdapat perbedaan antara realisasi di LO dan LRA dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	2020 - LO (Rp)	2020 - LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	16.780.296.256,00	20.171.601.747,00	(3.391.305.491,00)
2.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO	7.162.626.730,00	7.162.626.730,00	-
	Jumlah	23.942.922.986,00	27.334.228.477,00	(3.391.305.491,00)

Perbedaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak senilai (Rp3.391.305.491,00) merupakan koreksi atas saldo piutang dana bagi hasil provinsi.

VI.4.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO seluruhnya berupa Pendapatan Hibah – LO

VI.4.1.3.1 Pendapatan Hibah - LO

Pendapatan Hibah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri; dan atau kelompok masyarakat/perorangan. Penerimaan ini tidak bersifat mengikat sehingga dapat mempengaruhi kebijakan daerah.

Pendapatan hibah digunakan untuk menunjang peningkatan fungsi pemerintahan dan layanan umum, serta pemberdayaan aparatur daerah. Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp394.452.200,00 dan Rp882.820.000,00 seluruhnya merupakan hibah dari pemerintah pusat.

Uraian	Realisasi 2020 (Rp) (Audited)	Realisasi 2019 (Rp) (Audited)
Pendapatan Hibah	36.591.443.581,00	882.820.000,00
Jumlah	36.591.443.581,00	882.820.000,00

Terdapat perbedaan nilai realisasi Pendapatan Hibah LO dengan LRA sebagai berikut:

Uraian	2020 - LO (Rp)	2020 - LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
Pendapatan Hibah	36.591.443.581,00	-	36.591.443.581,00
Jumlah	36.591.443.581,00	-	36.591.443.581,00

Perbedaan sebesar Rp36.591.443.581,00 tersebut merupakan hibah dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berupa :

- Alat angkutan darat bermotor sesuai BAP : 4804/I/PLK.03.03/XII.2016 senilai Rp308.100.000,00;
- Peralatan Jaringan Komputer sesuai BAP : PK.02.08/514/2019 senilai Rp86.352.200,00;
- Pendapatan hibah persediaan obat-obatan untuk puskesmas, UPTD Diabetes Center dan UPTD Labkesda sebesar Rp590.612.501,00;
- Hibah aset tetap TA 2020 sebesar Rp7.584.922.580,00 pada DISPERKIM Kota Ternate;
- Hibah aset tetap TA 2020 sebesar Rp37.500.000,00 pada Dinas Perhubungan Kota Ternate;
- Hibah aset tetap TA 2020 sebesar Rp302.920.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate;
- Hibah aset tetap TA 2020 sebesar Rp27.681.036.300,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

VI.4.2 BEBAN

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban bantuan keuangan, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga. Realisasi Beban Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp837.734.912.991,66 dan Rp859.577.849.959,08.

VI.4.2.1.1 Beban Pegawai

Realisasi Beban Pegawai Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp400.201.577.338,00 dan Rp374.039.975.403,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Beban Pegawai	Realisasi 2020 (Rp) (Audited)	Realisasi 2019 (Rp) (Audited)
1	Beban Gaji Pegawai	334.936.232.530,00	339.193.195.814,00
2	Beban Tambahan Penghasilan	56.521.674.741,00	25.840.618.297,00
3	Beban Tunjangan Operasional Walikota & Kepala SKPD	5.141.938.942,00	5.192.943.792,00
4	Beban Insentif Pajak dan Retribusi	3.043.645.625,00	3.234.125.000,00
5	Beban Lembur	558.085.500,00	579.092.500,00
	Jumlah	400.201.577.338,00	374.039.975.403,00

Terdapat perbedaan nilai realisasi Beban Pegawai (LO) dengan realisasi Belanja Pegawai (LRA) sebagai berikut:

No.	Beban/Belanja Pegawai	Realisasi LO 2020 (Rp) (Audited)	Realisasi LRA 2020 (Rp) (Audited)	Perbedaan (Rp)
1	Beban Gaji Pegawai	334.936.232.530,00	334.936.232.530,00	-
2	Beban Tambahan Penghasilan	56.521.674.741,00	56.521.674.741,00	-
3	Beban Tunjangan Operasional Walikota & Kepala SKPD	5.141.938.942,00	5.141.938.942,00	-
4	Beban Insentif Pajak dan Retribusi	3.043.645.625,00	2.110.289.375,00	933.356.250,00
5	Beban Lembur	558.085.500,00	558.085.500,00	-
	Jumlah	400.201.577.338,00	399.268.221.088,00	933.356.250,00

Pada beban insentif pajak dan retribusi daerah terdapat selisih sebesar Rp933.356.250,00 yang merupakan utang beban pegawai tahun 2020 pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

VI.4.2.1.2 Beban Persediaan

Realisasi Beban Persediaan Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp25.603.365.272,10 dan Rp31.098.247.149,27 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Beban Persediaan	Realisasi 2020 (Rp) (Audited)	Realisasi 2019 (Rp) (Audited)
1.	Beban Persediaan Pakai Habis	13.255.872.847,66	14.990.821.813,78
2.	Beban Persediaan Bahan /Material	12.347.492.424,44	16.107.425.335,49
	Jumlah	25.603.365.272,10	31.098.247.149,27

Terdapat perbedaan nilai realisasi Beban Persediaan (LO) dengan realisasi Belanja Persediaan (LRA) sebagai berikut:

No.	Beban/Belanja Persediaan	Realisasi LO 2020 (Rp) (Audited)	Realisasi LRA 2020 (Rp) (Audited)	Perbedaan (Rp)
a.	Beban/Belanja Persediaan Pakai Habis	13.255.872.847,66	12.941.247.053,00	314.625.794,66
1	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	5.482.470.250,00	5.244.374.039,00	238.096.211,00
2	Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	475.517.312,00	475.517.312,00	-
3	Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	226.810.500,00	226.810.500,00	-
4	Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	570.432.682,00	435.298.782,00	135.133.900,00
5	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	2.142.237.347,00	2.128.937.347,00	13.300.000,00
6	Beban Persediaan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	2.560.000,00	2.560.000,00	-
7	Beban Tropi, Hadiah, Sertifikat dan sejenisnya	45.025.000,00	45.025.000,00	-
8	Beban Bahan	4.310.819.756,66	4.382.724.073,00	(71.904.316,34)

No.	Beban/Belanja Persediaan	Realisasi LO 2020 (Rp) (Audited)	Realisasi LRA 2020 (Rp) (Audited)	Perbedaan (Rp)
b.	Beban/Belanja Persediaan Bahan /Material	12.347.492.424,44	12.901.279.619,00	(553.787.194,56)
1	Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan	4.117.995.032,00	5.375.430.032,00	(1.257.435.000,00)
2	Beban Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	515.715.210,00	266.631.210,00	249.084.000,00
3	Beban Persediaan Bibit Ternak	151.499.800,00	151.499.800,00	-
4	Beban Persediaan Bahan Obat-obatan	2.052.436.063,44	1.591.272.258,00	461.163.805,44
5	Beban Persediaan Bahan Kimia	126.555.720,00	116.875.720,00	9.680.000,00
6	Beban Bahan Pameran / Sample Produk	127.290.280,00	127.290.280,00	-
7	Beban Hadiah / Penghargaan	482.200.000,00	482.200.000,00	-
8	Beban Bahan / Material Penggantian Suku Cadang	287.445.500,00	303.725.500,00	(16.280.000,00)
9	Beban Bahan Kelengkapan/perangkat kebutuhan ibadah	19.600.000,00	19.600.000,00	-
10	Beban Bahan Peralatan / Kelengkapan Pertukangan	1.400.000,00	1.400.000,00	-
11	Beban bahan peralatan / kelengkapan pertanian, peternakan dan perikanan	534.582.469,00	534.582.469,00	-
12	Beban bahan peralatan / kelengkapan olah raga	5.000.000,00	5.000.000,00	-
13	Beban bahan/Peralatan/kelengkapan Kemasan Produk	28.000.000,00	28.000.000,00	-
14	Beban bahan/peralatan/kelengkapan Bantuan	3.130.384.350,00	3.130.384.350,00	-
15	Beban Bahan Rumah Tangga	128.118.000,00	128.118.000,00	-
16	Beban Bahan Pakaian Jadi / Bahan Pakaian	325.425.000,00	325.425.000,00	-
17	Beban Bahan Peralatan/Kelengkapan Seni Budaya	27.000.000,00	27.000.000,00	-
18	Beban Bahan Perlengkapan Penanganan Bencana	52.800.000,00	52.800.000,00	-
19	Beban Bahan Baku Pemberian Makanan Tambahan	146.165.000,00	146.165.000,00	-
20	Beban Bahan MTQ Tingkat Kecamatan	87.880.000,00	87.880.000,00	-
	Jumlah	25.603.365.272,10	25.842.526.672,00	(239.161.399,90)

Penjelasan perbedaan sebesar (Rp239.161.399,90) tersebut dirinci sebagai berikut:

- a. Perbedaan Beban dengan Belanja Persediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp238.096.211,00 merupakan persediaan Tahun 2019 sebesar Rp47.427.424,00 dan utang belanja tahun 2020 sebesar Rp237.343.667,00 dikurangi sisa persediaan tahun 2020 sebesar Rp46.674.880,00 .

- b. Perbedaan Beban dan Belanja Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih sebesar Rp135.133.900,00 koreksi dari pengakuan belanja aset peralatan mesin dari belanja barang dan jasa yang merupakan barang habis pakai DISPERKIM Kota Ternate Tahun 2020.
- c. Perbedaan Beban dengan Belanja Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas sebesar Rp13.300.000,00 yang merupakan utang beban pada DPPKBD Tahun 2020.
- d. Perbedaan Beban dengan Belanja Bahan sebesar (Rp71.904.316,34) merupakan sisa Persediaan bahan cetakan Tahun 2019 senilai Rp1.021.621.175,22, koreksi pengakuan aset tahun 2020 dari belanja barang dan jasa senilai Rp72.305.000,00 yang merupakan barang pakai habis, utang beban tahun 2020 senilai Rp21.938.000,00 pada DPPKBD Kota Ternate dikurangi dengan sisa persediaan bahan cetakan Tahun 2020 senilai Rp1.187.768.491,56
- e. Perbedaan Beban dengan Belanja Persediaan Bahan Baku Bangunan sebesar (Rp Rp1.257.435.000,00) merupakan utang beban tahun 2019 pada Dinas Pemuda & Olahraga.
- f. Perbedaan Beban dengan Belanja Persediaan Bibit/Tanaman senilai Rp249.084.000,00 merupakan koreksi pengakuan aset dari belanja barang dan jasa yg merupakan belanja bahan pakai habis pada DISPRKIM Kota Ternate.
- g. Perbedaan Beban dengan Belanja Persediaan Obat-Obatan sebesar Rp461.163.805,44 merupakan:
 - Sisa Persediaan Obat Tahun 2019 pada Dinas Kesehatan senilai Rp2.712.678.080,99;
 - Sisa Persediaan Obat Tahun 2019 pada Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana senilai Rp804.908.517,20;
 - Sisa Persediaan Obat Tahun 2019 pada Dinas Pertanian senilai Rp6.929.798,00;
 - Pencatatan aset dari belanja barang dan jasa sebesar (Rp385.253.000,00) pada Dinas Kesehatan Kota Ternate;
 - Utang beban persediaan obat pada Dinas Kesehatan Kota Ternate senilai (Rp2.915.120.377,00) tahun 2020;
 - Sisa persediaan bahan obat-obatan pada DPPKBD tahun 2020 senilai Rp912.214.100,00 dan Dinas Kesehatan senilai Rp4.681.005.867,75.
- h. Perbedaan Beban dengan Belanja Persediaan Bahan Kimia sebesar Rp9.680.000,00 merupakan sisa persediaan pada Dinas Kebakaran Tahun 2019 senilai Rp19.360.000,00 dikurangi sisa persediaan Tahun 2020 senilai Rp9.680.000,00.
- i. Perbedaan Beban dengan Belanja Persediaan Beban Bahan Material/Penggantian Suku Cadang sebesar (Rp16.280.000,00) merupakan utang beban tahun 2019 pada Dinas Lingkungan Hidup.

VI.4.2.1.3 Beban Jasa

Realisasi Beban Jasa Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp206.648.307.918,89 dan Rp233.130.152.528,85. Realisasi Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar (Rp26.481.844.609,96) atau (11,36%). Rincian realisasi Beban Jasa tersebut sebagai berikut:

No.	Beban Jasa	Realisasi 2020 (Rp) (Audited)	Realisasi 2019 (Rp) (Audited)
1	Beban Jasa Kantor	21.043.760.512,00	25.883.076.836,77
2	Beban Premi Asuransi	5.068.773.193,00	3.652.581.367,00
3	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	7.904.818.491,00	8.992.847.032,00
4	Beban Cetak dan Penggandaan	5.284.526.133,00	8.436.629.776,00
5	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.015.213.344,63	3.221.088.612,53
6	Beban Sewa Sarana Mobilitas	600.228.000,00	1.100.644.400,00
7	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	634.208.273,00	1.457.602.000,00
8	Beban Makanan dan Minuman	11.893.463.784,00	23.623.518.516,00
9	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	814.929.500,00	1.517.184.600,00
10	Beban Pakaian Kerja	181.894.575,00	613.816.000,00
11	Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	373.680.000,00	596.459.950,00
12	Beban Jasa Konsultasi	1.501.477.600,00	446.928.400,00
13	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	31.728.445.472,91	21.885.493.398,42
14	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	1.038.465.000,00	680.000.000,00
15	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	932.970.000,00	3.873.179.811,00
16	Beban Honorarium Non Pegawai	10.000.000,00	279.835.250,00
17	Beban Honorarium PNS – LO	16.859.459.556,00	33.527.470.012,00
18	Beban Honorarium Non PNS	70.954.975.000,00	63.598.878.917,00
19	Beban Honorarium Pengelola Dana BOS	3.493.602.809,00	3.743.227.070,00
20	Beban Barang Dana BOS	12.994.560.082,00	14.989.305.975,53
21	Beban yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	5.067.488.399,35	3.733.017.422,60
22	Beban BMD di bawah Nilai Satuan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap	3.345.366.291,00	7.277.367.182,00
23	Beban Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	2.895.609.400,00	-
24	Beban Penghapusan Piutang	10.392.503,00	-
	Jumlah	206.648.307.918,89	233.130.152.528,85

Terdapat perbedaan nilai realisasi Beban Jasa (LO) dengan realisasi Belanja Jasa (LRA) sebagai berikut:

No.	Beban/Belanja Jasa	Realisasi LO 2020 (Rp) (Audited)	Realisasi LRA 2020 (Rp) (Audited)	Perbedaan (Rp)
1	Beban Jasa Kantor	21.043.760.512,00	19.423.028.550,00	1.620.731.962,00
2	Beban Premi Asuransi	5.068.773.193,00	4.870.266.701,00	198.506.492,00
3	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	7.904.818.491,00	7.963.078.041,00	(58.259.550,00)
4	Beban Cetak dan Penggandaan	5.284.526.133,00	5.219.586.133,00	64.940.000,00
5	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.015.213.344,63	2.021.540.420,00	(6.327.075,37)
6	Beban Sewa Sarana Mobilitas	600.228.000,00	583.228.000,00	17.000.000,00

No.	Beban/Belanja Jasa	Realisasi LO 2020 (Rp) (Audited)	Realisasi LRA 2020 (Rp) (Audited)	Perbedaan (Rp)
7	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	634.208.273,00	634.208.273,00	-
8	Beban Makanan dan Minuman	11.893.463.784,00	11.311.873.784,00	581.590.000,00
9	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	814.929.500,00	617.679.500,00	197.250.000,00
10	Beban Pakaian Kerja	181.894.575,00	181.894.575,00	-
11	Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	373.680.000,00	298.680.000,00	75.000.000,00
12	Beban Jasa Konsultasi	1.501.477.600,00	1.028.137.050,00	473.340.550,00
13	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	31.728.445.472,91	28.307.188.607,91	3.421.256.865,00
14	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	1.038.465.000,00	1.038.465.000,00	-
15	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	932.970.000,00	958.440.000,00	(25.470.000,00)
16	Beban Honorarium Non Pegawai	10.000.000,00	10.000.000,00	-
17	Beban Honorarium PNS - LO	16.859.459.556,00	15.048.644.556,00	1.810.815.000,00
18	Beban Honorarium Non PNS	70.954.975.000,00	68.893.617.000,00	2.061.358.000,00
19	Beban Honorarium Pengelola Dana BOS	3.493.602.809,00	3.493.602.809,00	-
20	Beban Barang Dana BOS	12.994.560.082,00	12.994.560.082,00	-
21	Beban yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	5.067.488.399,35	5.065.875.899,35	1.612.500,00
22	Beban bmd dibwh nilai sat min kapitalisasi aset tetap	3.345.366.291,00	401.700.000,00	2.943.666.291,00
23	Beban Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Mod erator	2.895.609.400,00	2.743.609.400,00	152.000.000,00
24	Beban Penghapusan Piutang	10.392.503,00	-	10.392.503,00
	Jumlah	206.648.307.918,89	193.108.904.381,26	13.539.403.537,63

Perbedaan sebesar Rp13.539.403.537,63 tersebut dirinci sebagai berikut:

- a. Perbedaan Beban dengan Belanja Jasa Kantor sebesar Rp1.620.731.962,00 yang terdiri dari:
 - Utang Beban Barang dan Jasa tahun 2020 pada DPPKBD senilai Rp46.530.000,00;
 - Utang Beban Barang dan Jasa tahun 2020 pada Dinas Kesehatan senilai Rp10.300.000,00;
 - Utang Beban Barang dan Jasa tahun 2020 pada DISKOMINFO senilai Rp843.110.022,00;
 - Utang Beban Barang dan Jasa tahun 2020 pada Sekretariat Daerah senilai Rp84.430.600,00;
 - Utang Beban Barang dan Jasa tahun 2020 pada DISPERKIM senilai Rp537.646,00;
 - Utang Beban Barang dan Jasa tahun 2020 pada Dinas Pariwisata senilai Rp99.715.000,00.

- b. Perbedaan Beban dengan Belanja Premi Asuransi sebesar Rp198.506.492,00 merupakan utang beban Tahun 2019 pada Dinas Kesehatan senilai Rp682.337.000,00 dikurangi utang beban Tahun 2020 senilai Rp880.843.492,00.
- c. Perbedaan Beban/Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor sebesar (Rp58.259.550,00) merupakan utang beban tahun 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp926.528.250,00,00 dikurangi utang beban tahun 2019 Rp984.787.800,00.
- d. Perbedaan Beban Cetak dan Penggandaan sebesar Rp64.940.000,00 merupakan utang beban tahun 2020 pada Sekretariat Daerah Kota Ternate senilai Rp49.940.000,00 dan DPMPTSP senilai Rp15.000.000,00.
- e. Perbedaan Beban dengan Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir sebesar (Rp6.327.075,37) merupakan beban sewa dibayar dimuka tahun 2020 sebesar Rp68.106.849,31 dikurangi beban sewa dibayar dimuka sebesar Rp61.779.773,94 pada tahun 2019.
- f. Perbedaan Beban dengan Belanja Sewa Sarana Mobilitas sebesar Rp17.000.000,00 yang merupakan utang beban tahun 2020 pada Dinas Kesehatan Kota Ternate.
- g. Perbedaan Beban dengan Belanja Makan dan Minum sebesar Rp581.590.000,00 merupakan utang beban Tahun 2020 dengan rincian :
 - Utang beban makan minum pada Sekretariat DPRD sebesar Rp162.245.000,00;
 - Utang beban makan minum pada Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp32.145.000,00;
 - Utang beban makan minum pada BKPSDM sebesar Rp18.000.000,00;
 - Utang beban makan minum pada Dinas Kesehatan sebesar Rp7.400.000,00;
 - Utang beban pada DPPKBD senilai Rp361.800.000,00.
- h. Perbedaan Beban dengan Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya sebesar Rp197.250.000,00 yang merupakan utang beban barang dan jasa pada Sekretariat DPRD Tahun 2020.
- i. Perbedaan Beban dengan Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu sebesar Rp75.000.000,00 merupakan Utang beban barang dan jasa pada Sekretariat DPRD Tahun 2020.
- j. Perbedaan Beban dengan Belanja Jasa Konsultasi senilai Rp473.340.550,00 merupakan:
 - Pencatatan aset yg berasal dari belanja barang dan jasa sebesar Rp294,250,000.00 pada Dinas PUPR;
 - Utang beban jasa konsultasi senilai Rp74.090.050,00 pada Sekretariat DPRD tahun 2020;
 - Utang beban jasa konsultasi senilai Rp4.300.000,00 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak tahun 2020;
 - Utang beban jasa konsultasi senilai Rp99.858.000,00 pada DIPERKIM tahun 2020.
- k. Perbedaan Beban dengan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga sebesar Rp3.421.256.865,00 merupakan:

- Utang beban tahun 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum senilai 1.206.299.585,00;
 - Persediaan tahun 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum senilai (Rp6.689.004.384,29);
 - Pencatatan aset yang berasal dari belanja barang dan jasa senilai (Rp4.618.439.000,00);
 - Koreksi dobel pencatatan persediaan sebesar Rp561.105.000,00 pada dinas PUPR tahun 2020;
 - Reklasifikasi antar rekening beban senilai (Rp864.148.538,00);
 - Utang beban Tahun 2020 pada Kecamatan Ternate Utara senilai (Rp149.999.000,00) dan Dinas Kelautan & Perikanan senilai Rp1.281.553.812,00;
 - Persediaan tahun 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp8.481.651.384,29.
- l. Perbedaan Beban dan Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS sebesar (Rp25.470.000,00) yang merupakan reklasifikasi antar beban pada Kec. Ternate Tengah.
 - m. Perbedaan Beban dengan Belanja Honorarium PNS sebesar Rp1.810.815.000,00 merupakan utang beban tahun 2020 senilai Rp1.810.802.000,00, koreksi beban pada Dinas Kesehatan senilai Rp13.000,00.
 - n. Perbedaan Beban dengan Belanja Honorarium Non PNS sebesar Rp2.061.358.000,00 merupakan utang beban tahun 2020.
 - o. Perbedaan Beban dengan Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebesar Rp1.612.500,00 merupakan utang beban tahun 2020 pada Dinas Kesehatan Kota Ternate.
 - p. Perbedaan Beban dengan Belanja bmd dibwh sat nilai kapitalisasi aset tetap senilai Rp2.943.666.291,00 merupakan reklasifikasi pencapatan aset tahun 2020.
 - q. Perbedaan Beban dengan Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator senilai Rp152.000.000,00 yang merupakan utang beban tahun 2020 pada Sekretariat DPRD senilai Rp40.000.000,00 dan BAPPELITBANGDA senilai Rp112.000.000,00.
 - r. Perbedaan Beban dengan Belanja Penghapusan Piutang sebesar Rp10.392.503,00 yang merupakan penghapusan piutang pajak Restoran tahun 2020.

VI.4.2.1.4 Beban Pemeliharaan

Realisasi Beban Pemeliharaan Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp4.166.608.938,00 dan Rp6.342.063.722,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Beban Pemeliharaan	Realisasi 2020 (Rp) (Audited)	Realisasi 2019 (Rp) (Audited)
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	442.147.000,00	633.240.980,00
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.679.790.094,00	3.137.204.689,00

No.	Beban Pemeliharaan	Realisasi 2020 (Rp) (Audited)	Realisasi 2019 (Rp) (Audited)
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	529.203.450,00	822.600.000,00
4	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.500.000,00	-
5	Beban Pemeliharaan Alat Alat Rumah Tangga	115.014.300,00	500.653.484,00
6	Beban Pemeliharaan Jaringan LAN/WAN/Internet	465.006.094,00	303.807.669,00
7	Beban Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	135.027.500,00	327.120.900,00
8	Beban Pemeliharaan Jaringan Air Minum	-	-
9	Beban Pemeliharaan Jaringan listrik	-	-
10	Beban Pemeliharaan/Normalisasi/Drainase/Saluran	797.920.500,00	617.436.000,00
	Jumlah	4.166.608.938,00	6.342.063.722,00

Terdapat perbedaan nilai realisasi Beban Pemeliharaan (LO) dengan realisasi Belanja Pemeliharaan (LRA) sebagai berikut:

No.	Beban/Belanja Pemeliharaan	Realisasi LO 2020 (Rp) (Audited)	Realisasi LRA 2020 (Rp) (Audited)	Perbedaan (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	442.147.000,00	442.147.000,00	-
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.679.790.094,00	1.382.271.439,00	297.518.655,00
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	529.203.450,00	1.360.369.110,00	(831.165.660,00)
4	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	-
5	Beban Pemeliharaan Alat Alat Rumah Tangga	115.014.300,00	115.014.300,00	-
6	Beban Pemeliharaan Jaringan LAN / WAN / Internet	465.006.094,00	396.206.094,00	68.800.000,00
7	Beban pemeliharaan perlengkapan kantor	135.027.500,00	135.027.500,00	-
8	Beban Pemeliharaan/Normalisasi/Drainase/Saluran	797.920.500,00	-	797.920.500,00
	Jumlah	4.166.608.938,00	3.833.535.443,00	333.073.495,00

Rincian penjelasan perbedaan sebesar Rp297.518.655,00 tersebut sebagai berikut:

- Perbedaan Beban dengan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp297.518.655,00 merupakan penambahan utang beban tahun 2020 masing – masing SKPD : DPPKBD senilai Rp48.800.000,00, Sekretariat Daerah senilai Rp199.000.000,00 dan BP2RD senilai Rp49.718.655,00.
- Perbedaan Beban dengan Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar (Rp831.165.660,00) merupakan pencatatan aset dari barang dan jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Perbedaan Beban dengan Belanja Pemeliharaan Jaringan LAN/WAN/Internet sebesar Rp68.800.000,00 merupakan utang pengadaan Tahun 2020 pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Ternate.
- Perbedaan Beban dengan Belanja Pemeliharaan/Normalisasi/Drainasi/Saluran senilai Rp797.920.500,00 merupakan penambahan utang tahun 2020 senilai Rp1.229.502.060,00 dikurangi utang beban tahun 2019 senilai Rp431.581.560,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

VI.4.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas

Realisasi Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp38.867.061.705,00 dan Rp68.962.968.203,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Beban Perjalanan Dinas	Realisasi 2020 (Rp) (Audited)	Realisasi 2019 (Rp) (Audited)
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.238.551.850,00	17.554.210.050,00
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.421.764.016,00	47.835.498.275,00
3	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	125.584.000,00	250.000.000,00
4	Beban Transportasi dan Akomodasi	7.081.161.839,00	3.323.259.878,00
	Jumlah	38.867.061.705,00	68.962.968.203,00

Terdapat perbedaan nilai realisasi Beban Perjalanan Dinas (LO) dengan realisasi Belanja Perjalanan Dinas (LRA) sebagai berikut:

No.	Beban/Belanja Perjalanan Dinas	Realisasi LO 2020 (Rp) (Audited)	Realisasi LRA 2020 (Rp) (Audited)	Perbedaan (Rp)
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.238.551.850,00	9.238.551.850,00	-
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.421.764.016,00	22.421.764.016,00	-
3	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	125.584.000,00	125.584.000,00	-
4	Beban Transportasi dan Akomodasi	7.081.161.839,00	6.317.241.839,00	763.920.000,00
	Jumlah	38.867.061.705,00	38.103.141.705,00	763.920.000,00

Perbedaan Beban dengan Belanja Transportasi Akomodasi senilai Rp763.920.000,00 yang merupakan utang beban pada Dinas Kesehatan senilai Rp50.000.000,00 dan DPPKBD senilai Rp713.920.000,00.

VI.4.2.1.6 Beban Hibah

Realisasi Beban Hibah Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp59.116.604.398,00 dan Rp38.082.186.652,00. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2019, realisasi Beban Hibah Tahun 2020 mengalami kenaikan cukup besar sebesar Rp21.034.417.746,00 atau 55,23%.

Rincian realisasi Beban Hibah tersebut sebagai berikut:

No.	Beban Hibah	Realisasi 2020 (Rp) (Audited)	Realisasi 2019 (Rp) (Audited)
1	Beban Hibah kepada Pemerintah	-	1.714.738.342,00
2	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	75.416.479,00
3	Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD	-	4.471.413.077,00
4	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	227.260.144,00	11.990.638.754,00
5	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	53.295.294.420,00	13.902.400.000,00
6	Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar	-	1.257.300.000,00
7	Beban Hibah Dana BOS ke SD Swasta	2.779.299.834,00	2.423.340.000,00
8	Beban Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota....	832.870.000,00	-
9	Beban Hibah BOSDA Madrasah Ibtidaiyah	209.360.000,00	280.560.000,00

No.	Beban Hibah	Realisasi 2020 (Rp) (Audited)	Realisasi 2019 (Rp) (Audited)
10	Beban Hibah BOSDA Madrasah Tsanawiyah	210.120.000,00	309.780.000,00
11	Beban Hibah BOP PAUD	1.562.400.000,00	1.656.600.000,00
	Jumlah	59.116.604.398,00	38.082.186.652,00

Terdapat perbedaan nilai realisasi Beban Hibah (LO) dengan realisasi Belanja Hibah (LRA) sebagai berikut:

No.	Beban/Belanja Hibah	Realisasi LO 2020 (Rp) (Audited)	Realisasi LRA 2020 (Rp) (Audited)	Perbedaan (Rp)
1	Beban Hibah kepada Pemerintah	-	-	-
2	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-
3	Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD	-	-	-
4	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	227.260.144,00	-	227.260.144,00
5	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	53.295.294.420,00	52.608.550.500,00	686.743.920,00
6	Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar	-	-	-
7	Beban Hibah Dana BOS ke SD Swasta	2.779.299.834,00	1.193.000.000,00	1.586.299.834,00
8	Beban Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota....	832.870.000,00	832.870.000,00	-
9	Beban Hibah BOSDA Madrasah Ibtidaiyah	209.360.000,00	209.360.000,00	-
10	Beban Hibah BOSDA Madrasah Tsanawiyah	210.120.000,00	210.120.000,00	-
11	Beban Hibah BOP PAUD	1.562.400.000,00	1.562.400.000,00	-
	Jumlah	59.116.604.398,00	56.616.300.500,00	2.500.303.898,00

Penjelasan perbedaan sebesar Rp2.500.303.898,00 tersebut dirinci sebagai berikut:

- Perbedaan Beban dengan Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp227.260.144,00 yang merupakan hibah aset Gedung dari DISPERKIM Kota Ternate Tahun 2020;
- Perbedaan Beban dengan Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp686.743.920,00 merupakan reklasifikasi dari beban transfer Tahun 2020;
- Perbedaan Beban dengan Belanja Hibah Dana Bos ke SD/SMP Swasta sebesar Rp1.586.299.834,00 merupakan hibah aset ke SD & SMP Swasta oleh Dinas Pendidikan Kota Ternate Tahun 2020.

VI.4.2.1.7 Beban Bantuan Sosial

Realisasi Beban Bantuan Sosial Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp2.015.750.000,00 dan Rp11.883.758.020,00. Realisasi Beban Bantuan Sosial tersebut seluruhnya untuk organisasi sosial kemasyarakatan dan sosial keagamaan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Realisasi 2020 (Rp) (Audited)	Realisasi 2019 (Rp) (Audited)
1	Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	-	9.316.186.500,00
2	Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat	2.015.750.000,00	2.567.571.520,00
	Jumlah	2.015.750.000,00	11.883.758.020,00

Tidak ada perbedaan nilai realisasi Beban Bantuan Sosial (LO) dengan Belanja Bantuan Sosial (LRA).

VI.4.2.1.8 Beban Penyusutan Dan Amortisasi

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp97.948.697.414,63 dan Rp91.769.624.275,03 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp) (Audited)	Realisasi 2019 (Rp) (Audited)	Kenaikan/ (Penurunan) Rp)	%
1.	Beban Penyusutan Peralatan & Mesin	25.903.540.649,11	24.787.497.792,03	1.116.042.857,08	4,50
2.	Beban Penyusutan Gedung & Bangunan	27.607.228.191,16	27.272.431.915,00	334.796.276,16	1,23
3.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	44.144.684.594,66	39.414.231.794,00	4.730.452.800,36	12,00
4.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	293.243.980,00	295.462.774,00	(2.218.794,00)	(0,75)
	Jumlah	97.948.697.414,63	91.769.624.275,03	6.179.073.139,60	6,73

VI.4.2.1.9 Beban Penyisihan Piutang

Realisasi Beban Penyisihan Piutang Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp2.191.939.642,33 dan 3.523.949.501,93 terdiri dari:

No.	Uraian	Realisasi 2020 (Rp) (Audited)	Realisasi 2019 (Rp) (Audited)
1.	Beban Penyisihan Piutang Pajak	-	3.090.535.822,10
2.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	2.191.939.642,33	417.249.386,83
3.	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	-	16.164.293,00
	Jumlah	2.191.939.642,33	3.523.949.501,93

VI.4.2.1.10 Beban Transfer

Realisasi Beban Transfer Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp744.924.504,00. Realisasi Beban Transfer adalah beban pengeluaran uang yang diberikan kepada Partai Politik.

VI.4.2.1.11 SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI

Surplus (Defisit) dari Operasi Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp148.813.992.180,64 dan Rp124.563.328.954,05. Realisasi Surplus (Defisit) dari Operasi Tahun 2020 tersebut turun sebesar Rp24.250.663.226,59 atau 19,47% dibanding Tahun 2019.

VI.4.2.2 SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non operasional Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp40.588.000,00 dan Rp687.359.852,00. Seluruhnya defisit tersebut merupakan berasal dari Defisit Penghapusan Aset LO dan penurunan nilai investasi perusahaan daerah tahun 2020.

VI.4.2.2.1 Defisit Penghapusan Aset LO

Defisit Penghapusan Aset LO Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp40.558.000,00 dan Rp687.359.852,00 Penghapusan tersebut merupakan :

- Penghapusan Gedung Kantor pada Inspektorat Kota Ternate dengan nilai Gedung Rp40.558.000,00 dan defisit penghapusan aset dengan nilai yang sama.

VI.4.2.2.2 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Defisit dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp975.000.364,71 merupakan penurunan nilai investasi perusahaan daerah tahun 2020.

VI.4.2.2.3 SUPRLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp148.773.404.180,64 dan Rp123.875.969.102,05. Realisasi Surplus Sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2020 tersebut turun sebesar Rp24.897.435.078,59 atau 20,10% dibanding Tahun 2019.

VI.4.2.3 POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- (a) kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
- (b) tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
- (c) kejadian diluar kendali Pemerintah Daerah

Pos Luar Biasa Tahun 2020 dan 2019 seluruhnya berasal dari Beban Luar Biasa.

VI.4.2.3.1 Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp33.318.441.938,00 dan Rp617.580.000,00 yang seluruhnya bersumber dan belanja tidak terduga tahun 2020 sebesar Rp36.383.124.238,00 dikurangi setor kembali uang harian tim medis penanggulangan covid-19 sebesar Rp338.100.000,00 dan mutasi berkurang pencatatan aset dan belanja barang dan jasa oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp2.726.582.300,00.

VI.4.2.3.2 SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA

Surplus dari Pos Luar Biasa Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp33.318.441.938,00 dan Rp617.580.000,00. Realisasi Surplus dari Pos Luar Biasa Tahun 2020 tersebut naik sebesar Rp32.700.861.938,00 atau 5,295 dibanding Tahun 2019.

VI.4.2.4 SURPLUS/DEFISIT LO

Surplus/Defisit – LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Surplus/Defisit LO Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp115.454.962.242,64 dan Rp123.258.389.102,05. Realisasi Surplus Sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2020 tersebut turun sebesar (Rp7.803.426.859,41) atau (6,33) dibanding Tahun 2019.

VI.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas di bawah pengelolaan Kas Daerah dan yang disetarakan dengan Kas Daerah selama Tahun Anggaran 2020. Penerimaan dan pengeluaran kas ini diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

VI.5.1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah selama satu periode akuntansi. Arus Kas dari Aktivitas Operasi menunjukkan kemampuan menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp190.012.597.224,55 dan Rp229.908.956.717,01, yang berasal dari Arus Kas Masuk dan Keluar sebagai berikut:

VI.5.1.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi terdiri dari:

VI.5.1.1.1 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Pajak Daerah

Arus Kas Masuk dari Penerimaan Pajak Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari Pajak Daerah yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan yang terdiri dari:

No.	Uraian	Realisasi 2020 (Rp) (audited)	Realisasi 2019 (Rp) (audited)
1.	Pajak Hotel	3.318.954.477,00	4.437.274.112,00
2.	Pajak Restoran	8.372.772.021,00	12.899.158.724,00
3.	Pajak Hiburan	1.835.384.285,00	3.063.299.779,00
4.	Pajak Reklame	1.987.665.840,00	2.126.151.528,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	21.261.231.736,00	20.248.026.102,00
6.	Pajak Parkir	580.382.600,00	835.016.300,00
7.	Pajak Air Tanah	737.925.216,00	764.546.039,00
8.	Pajak Mineral Bukan Logam	1.124.520.096,00	2.254.092.675,00
9.	Pajak Bumi dan Bangunan	4.863.352.610,00	5.479.750.633,00
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	5.720.189.573,00	5.889.526.996,00
JUMLAH		49.802.378.454,00	57.996.842.888,00

VI.5.1.1.2 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Retribusi Daerah

Arus masuk dari Penerimaan Retribusi Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari Retribusi Daerah yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan yang terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp) (audited)	Realisasi 2019 (Rp) (audited)
I	Retribusi Jasa Umum	3.800.222.000,00	5.526.639.000,00
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.386.031.500,00	3.255.529.000,00
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	638.700.000,00	775.200.000,00
3	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	712.540.000,00	1.406.290.000,00
4	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	8.100.000,00	19.200.000,00
5	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	54.850.500,00	70.420.000,00
II	Retribusi Jasa Usaha	9.964.922.117,00	10.734.107.178,00
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.017.006.088,00	1.758.552.188,00
2	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	7.774.982.829,00	7.459.248.090,00
3	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	155.025.100,00	7.700.000,00
4	Retribusi Terminal	166.430.000,00	347.176.000,00
5	Retribusi Tempat Khusus Parkir	369.000.000,00	622.600.000,00
6	Retribusi Rumah Potong Hewan	129.002.000,00	168.487.000,00
7	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	162.165.100,00	146.361.900,00
8	Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga	191.311.000,00	223.982.000,00
III	Retribusi Perijinan Tertentu	2.311.872.962,00	1.788.208.132,75
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.307.681.962,00	1.749.798.132,75
2	Retribusi Izin Gangguan	-	-
3	Retribusi Izin Trayek	4.191.000,00	20.410.000,00
4	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	-	18.000.000,00
JUMLAH		16.077.017.079,00	18.048.954.310,75

VI.5.1.1.3 Arus Kas Masuk dari Hasil Penerimaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Arus masuk dari Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp1.310.008.542,79,00 dan Rp1.206.784.356,00.

VI.5.1.1.4 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Arus Kas Masuk dari Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang telah disetorkan ke Kas Daerah dan yang disetarakan dengan Kas Daerah selama tahun pelaporan yang terdiri dari:

No.	Uraian	Realisasi 2020 (Rp) (audited)	Realisasi 2019 (Rp) (audited)
1.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	-	398.638.889,00
2.	Penerimaan Jasa Giro	162.108.129,29	46.150.339,35
3.	Pendapatan Bunga	14.221.000,00	1.983.979.763,25
4.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	4.616.736.141,43	3.244.987.412,00
5.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan	43.331.080,00	604.838.363,00
6.	Pendapatan Denda Pajak	56.523.753,00	26.960.900,00
7.	Pendapatan Denda Retribusi	1.022.387,00	-
8.	Dana Non Kapitasi	123.024.827,00	301.810.000,00

No.	Uraian	Realisasi 2020 (Rp) (audited)	Realisasi 2019 (Rp) (audited)
9.	Pendapatan dari Pengembalian	1.272.919.321,95	22.298.056.278,00
10.	Penerimaan Jasa Giro dari Puskesmas	25.876.765,00	-
	Jumlah	6.315.763.404,67	6.210.738.777,26

VI.5.1.1.5 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

Arus Kas Masuk dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan terdiri dari:

No.	Uraian	Realisasi 2020 (Rp) (audited)	Realisasi 2019 (Rp) (audited)
1.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan	4.644.850.724,00	5.290.741.689,00
2.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan	13.353.657.076,00	6.965.044.743,00
	JUMLAH	17.998.507.800,00	12.255.786.432,00

VI.5.1.1.6 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan terdiri dari:

No.	Uraian	Realisasi 2020 (Rp) (audited)	Realisasi 2019 (Rp) (audited)
1.	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	517.452.237,00	-
2.	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	-	-
3.	Bagi Hasil dari Iuran Tetap Sewa Lahan (Land-Rent)	-	9.075.200,00
4.	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	2.010.081.850,00	8.141.595.762,00
5.	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	788.276.289,00	590.155.800,00
6.	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	48.785.045,00	22.688.000,00
7.	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	7.904.609,00	22.688.000,00
8.	Bagi Hasil dari Pertambangan Umum	21.949.863.986,00	22.688.000,00
	JUMLAH	25.322.364.016,00	8.763.514.762,00

VI.5.1.1.7 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Alokasi Umum

Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Alokasi Umum merupakan penerimaan yang berasal dari Dana Alokasi Umum yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp599.701.700.000,00 dan Rp653.094.117.000,00.

VI.5.1.1.8 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus

Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus merupakan penerimaan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp110.883.631.467,00 dan Rp122.901.427.638,00.

VI.5.1.1.9 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Penyesuaian

Arus Kas Masuk dari Dana Penyesuaian dari Pemerintah Pusat yang telah disetorkan ke Kas Daerah Dana Insentif Daerah selama Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp65.584.074.000,00 dan Rp44.225.740.000,00.

VI.5.1.1.10 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi

Arus Kas Masuk dari Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi merupakan penerimaan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan, yang terdiri dari:

No.	Uraian	Realisasi 2020 (Rp) (audited)	Realisasi 2019 (Rp) (audited)
1.	PKB	6.003.010.871,00	300.850.000,00
2.	BBNKB	5.243.927.517,00	16.961.353.294,00
3.	PBBKB	8.924.663.359,00	8.540.906.867,00
4.	P3ABT	-	-
5.	Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	7.162.626.730,00	7.778.650.818,00
	Jumlah	27.334.228.477,00	33.581.760.979,00

VI.5.1.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi terdiri dari:

VI.5.1.2.1 Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pegawai

Arus Kas Keluar ini merupakan pengeluaran yang berasal dari Pembayaran Belanja Pegawai yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp399.268.221.088,00 dan Rp370.296.748.333,00. Pengeluaran kas pada belanja ini diantaranya diperuntukkan bagi pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan CPNS (termasuk guru), gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, honor panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim, honorarium TKK, dan honorarium tenaga ahli.

VI.5.1.2.2 Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Barang

Arus Kas Keluar ini merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Pembayaran Belanja Barang yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah dan yang disetarakan dengan Kas Daerah selama Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp235.685.036.269,91 dan Rp320.671.448.569,00. Pengeluaran pos ini diantaranya digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan habis pakai, pembayaran jasa perkantoran, pembayaran barang cetakan dan penggandaan, pembayaran jasa pemeriksaan laboratorium, pembelian obat-obatan dan pupuk (termasuk benih unggul), penyediaan pelayanan kesehatan di puskesmas, pemenuhan perjalanan dinas dalam daerah dan keluar daerah, dan pemeliharaan aset tetap Pemerintah Kota Ternate.

VI.5.1.2.3 Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Hibah

Arus Kas Keluar ini merupakan pengeluaran yang berasal dari pembayaran hibah yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp56.616.300.500,00 dan Rp19.829.980.000,00.

VI.5.1.2.4 Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Bantuan Sosial

Arus Kas Keluar dari Bantuan Sosial merupakan pengeluaran yang berasal dari Pos Pembayaran Bantuan Sosial yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp2.015.750.000,00 dan Rp11.883.758.020,00. Pengeluaran arus kas ini diperuntukan bagi pemberian bantuan kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan.

VI.5.1.2.5 Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Tidak Terduga

Arus Kas Keluar ini merupakan pengeluaran yang berasal dari Pembayaran Tidak Terduga yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp36.045.024.238,00 dan Rp4.949.851.000,00.

VI.5.1.2.6 Arus Kas Keluar Untuk Bantuan Keuangan

Arus Kas Keluar ini merupakan pengeluaran yang diperuntukkan untuk bantuan kepada partai politik untuk Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp686.743.920,00 dan Rp744.924.504,00.

VI.5.2 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

Arus kas ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Kota Ternate kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp(187.809.830.361,00) dan Rp(223.513.188.770,75,00) yang berasal dari Arus Kas Masuk dan Keluar sebagai berikut:

VI.5.2.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi diperoleh dari penjualan atas peralatan dan mesin yaitu kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat selama Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp708.115.000,00 dan Rp398.638.889,00 .

VI.5.2.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi terdiri dari:

VI.5.2.2.1 Arus Kas Keluar untuk Perolehan Tanah

Arus Kas Keluar dari Perolehan Tanah merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Modal Tanah yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah.

Arus Kas Keluar dari Perolehan Tanah Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp6.149.586.820,00 dan Rp13.410.478.426,72.

VI.5.2.2.2 Arus Kas Keluar untuk Perolehan Peralatan dan Mesin

Arus Kas Keluar dari Perolehan Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran dalam rangka memperoleh aset tetap berupa peralatan dan mesin.

Arus Kas Keluar dari Perolehan Peralatan dan Mesin Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp17.076.909.415,00 dan Rp32.338.148.496,00.

VI.5.2.2.3 Arus Kas Keluar untuk Perolehan Gedung dan Bangunan

Arus Kas Keluar dari Perolehan Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran dalam rangka memperoleh aset tetap berupa gedung dan bangunan.

Arus Kas Keluar dari Perolehan Gedung dan Bangunan Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp59.390.064.040,00 dan Rp77.852.294.958,81. Sebagian besar pengeluaran untuk pos ini digunakan untuk melaksanakan pembangunan gedung sekolah dan gedung pertokoan/pasar.

VI.5.2.2.4 Arus Kas Keluar untuk Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Arus Kas Keluar dari Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam rangka memperoleh aset tetap berupa jalan, irigasi, dan jaringan.

Arus Kas Keluar dari Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengeluaran Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp103.748.096.799,00 dan Rp98.142.571.908,22. Sebagian besar pengeluaran untuk pos ini dikeluarkan untuk melaksanakan peningkatan jalan lingkungan dan jalan kota.

VI.5.2.2.5 Arus Kas Keluar untuk Perolehan Aset Tetap Lainnya

Arus Kas Keluar dari Perolehan Aset Tetap Lainnya merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dalam rangka memperoleh aset tetap berupa buku dan barang perpustakaan, alat olah raga air dan tanaman hias.

Arus Kas Keluar dari Perolehan Aset Tetap Lainnya Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp2.153.288.287,00 dan Rp2.168.333.870,00.

VI.5.3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus Kas ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas ini untuk Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan (Rp5.000.000.000,00) seluruhnya merupakan penyertaan modal ke BUMD.

VI.5.4 ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan Pemerintah Kota Ternate.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas ini untuk Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp(2.652.552.619,46) dan Rp(903.541.493,42) yang berasal dari Arus Kas Masuk dan Keluar sebagai berikut:

VI.5.4.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris terdiri dari:

VI.5.4.1.1 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Arus Kas Masuk dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga merupakan penerimaan pungutan PPh, PPN, Taspen, Askes, Taperum, dan pungutan lainnya yang harus disetorkan ke Kas Negara sampai dengan akhir tahun.

Arus Kas Masuk dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp63.217.688.812,54 dan Rp65.474.808.580,58.

VI.5.4.1.2 Arus Kas Masuk dari Saldo UP Tahun Lalu

Arus Kas Masuk dari Saldo UP Tahun Lalu merupakan sisa Kas Tunai Tahun sebelumnya di bendahara pengeluaran. Arus Kas Masuk dari Saldo UP Tahun Lalu untuk Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp2.084.850,00.

VI.5.4.1.4 Arus Kas Masuk dari Saldo Bendahara Penerima Tahun Lalu

Saldo Bendahara Penerima Tahun Lalu merupakan Saldo kas di bendahara penerima tahun lalu pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang disetor tahun ini. Saldo Bendahara Penerima Tahun Lalu Untuk Tahun 2020 & 2019 masing-masing Sebesar Rp1.004.913.000,00 dan Rp0,00.

VI.5.4.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris terdiri dari:

VI.5.4.2.1 Arus Kas Keluar untuk Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Arus Kas Keluar untuk Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga ini merupakan pembayaran pungutan PPh, PPN, Taspen, Askes, Taperum, dan pungutan lainnya yang harus disetorkan ke Kas Negara Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020.

Arus Kas Keluar untuk Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp66.873.589.485,00 dan Rp66.380.434.924,00.

VI.5.4.2.2 Arus Kas Keluar untuk Saldo Uang Persediaan Tahun Berjalan

Arus Kas Keluar untuk Saldo Uang Persediaan Tahun Berjalan ini merupakan sisa kas yang ada pada Bendahara pengeluaran di masing-masing organisasi perangkat daerah, untuk Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp1.036.132,00 dan Rp0,00.

VI.5.5 KENAIKAN (PENURUNAN) KAS

Kenaikan (Penurunan) Kas Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar (Rp449.256.940,91) dan Rp492.226.452,84.

VI.5.6 SALDO KAS

Total Kas per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp2.433.047.993,06 dan Rp4.562.837.822,82 terdiri dari:

No.	Uraian	Realisasi 2020 (Rp) (audited)	Realisasi 2019 (Rp) (audited)
1.	Kenaikan (Penurunan) Kas	(449.256.940,91)	492.226.452,84
2.	Saldo Awal Kas di BUD	497.494.798,33	5.268.345,49
3.	Saldo Akhir Kas di BUD (1+2)	.48.237.857,42	497.494.798,33
4.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	1.036.132,00	-
5.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	-	1.004.913.000,00
6.	Kas di FKTP	946.255.465,02	2.320.806.457,16
7.	Kas di Bendahara BOS	33.301.183,29	28.641.007,32
8.	Kas di BLUD	442.791.289,88	-
9.	Kas Lainnya	961.426.039,45	710.982.560,61
10.	Total Kas (3+4+5+6+7+8+9)	2.433.047.993,06	4.562.837.822,82

VI.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara laporan Operasional dengan Neraca yang menginformasikan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktifitas operasional pada periode pelaporan yang terdiri dari ekuitas awal, Surplus (Defisit) - LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar, dan ekuitas akhir.

Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun yang berakhir per 31 Desember 2020 dan 2019 disajikan pada tabel berikut ini:

No.	Laporan Perubahan Ekuitas	Saldo 2020 (Rp) (audited)	Saldo 2019 (Rp) (audited)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)	%
1.	Ekuitas Awal	2.445.426.904.860,11	2.316.339.423.764,80	129.087.481.095,31	5,57
2.	Surplus/Defisit-LO	115.454.962.242,64	123.258.389.102,05	(7.803.426.859,41)	-6,33
3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar (Netto)	389.127.268,23	5.829.091.993,26	(5.439.964.725,03)	-93,32
4.	Ekuitas Akhir	2.561.270.994.370,98	2.445.426.904.860,11	115.884.089.510,87	4,74

VI.6.1 Ekuitas Awal

Saldo Ekuitas Awal Tahun 2020 sebesar Rp2.445.426.904.860,11, sedangkan Saldo Ekuitas Awal Tahun 2019 (audited) sebesar Rp2.316.339.423.764,80. Saldo Awal Tahun 2020 tersebut naik sebesar Rp129.087.481.095,31 atau 5,57%.

VI.6.2 Surplus/Defisit – LO

Surplus/Defisit – LO Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp115.454.962.242,64 dan Rp123.258.389.102,05.

VI.6.3 Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif kesalahan mendasar sebesar Rp389.127.268,23 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo Awal	5.829.091.993,26
2	Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun 2019	1.899.351.804,33
3	Koreksi Aset tetap	(526.970.646,70)
4	Mutasi berkurang (EC) Tahun 2019	(647.921.171,00)
5	Jurnal balik atas saldo LPE Tahun 2019	(3.356.095.967,36)
6	Aset Lain-lain	(2.440.366.000,00)
7	Piutang Pajak	193.142.255,70
8	Barang yang diserahkan ke masyarakat	(561.105.000,00)
	Total	389.127.268,23

VI.6.4 Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2020 sebesar Rp2.561.270.994.370,98 sedangkan Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2019 (audited) sebesar Rp2.445.426.904.860.11. Saldo Akhir Tahun 2020 tersebut naik sebesar Rp115.884.089.510,87 atau 4,74%.

BAB VII

PENUTUP

Pemerintah Kota Ternate memiliki 41 SKPD yang berfungsi sebagai entitas akuntansi. Setiap entitas akuntansi diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan SAL, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan konsolidasi dari 41 SKPD entitas akuntansi tersebut kemudian disampaikan kepada Wali Kota melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk selanjutnya dikonsolidasikan menjadi sebuah Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Ternate Tahun Anggaran 2020 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2020 diharapkan mampu memberikan informasi tentang kinerja pengelolaan keuangan Daerah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah serta sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan manajemen, baik dibidang ekonomi, sosial maupun politik bagi Pemerintah Kota Ternate.

Demikian Laporan Keuangan Kota Ternate Tahun Anggaran 2020.



The image shows a circular official stamp of the Mayor of Ternate. The stamp contains the text "WALIKOTA TERNATE" at the top and "TERNATE" at the bottom. In the center of the stamp is a logo featuring a bird, likely a Garuda. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "Dr. M. TAUHID SOLEMAN, M.Si" is printed in black text.